





ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2014-2019 BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
BENGKALIS-BANTAN			
1.	IRMI SYAKIP ARSALAN, SSOS	PKB	1.544
2.	ZULHELMI, SHI	PKS	1.198
3.	SOFYAN, SPdI	PDIP	3.575
4.	H. INDRA GUNAWAN EET, MH	GOLKAR	2.474
5.	INDRAWAN SUKMANA, ST	GERINDRA	1.529
6.	Dr H SULAIMAN ZAKARIA Dipl Ps, MSi	DEMOKRAT	2.859
7.	H HERU WAHYUDI, SH	PAN	3.190
8.	ZAMZAMI, SH	PAN	2.556
9.	MUHAMMAD TARMIZI, SSY	PPP	2.044
10.	H MAWARDI	PBB	1.845
BUKIT BATU-SIAK KECIL			
1.	JOHAN WAHYUDI	NASDEM	1.456
2.	H AZMI BIN ROZALI, SIP, MSi	PKS	1.389
3.	MISRAN	PDIP	837
4.	Hj AISYAH	GOLKAR	1.150
5.	FAKHRUL NIZAM, ST	PAN	2.737
MANDAU A			
1.	FRANSISCA	NASDEM	1.589
2.	dr H FIDEL FUADI	PKS	1.478
3.	H ABI BAHRUN, SS, MSi	PKS	1.629
4.	KADERISMANTO	PDIP	2.053
5.	H THAMRIN MALI	GOLKAR	1.407
6.	SIHOL PANGARIBUAN	GOLKAR	3.987
7.	EDDY BUDIANTO	GERINDRA	789
8.	RISMAYENI, SPd	DEMOKRAT	2.632
9.	ANDRIYAN PRAMA PUTRA	PAN	2.867
10.	SYAIFUL ARDI	PAN	1.504
11.	ZULKIFLI	HANURA	676
12.	LAMHOT NAINGGOLAN	PKPI	661
MANDAU B			
1.	H JASMI	PKS	966
2.	SIMON LUMBAN GAOL	PDIP	1.967
3.	HENDRI, SAg, MSi	GOLKAR	3.375
4.	Ir H SAMSU DALIMUNTHE	GOLKAR	3.462
5.	SUKADDI	DEMOKRAT	1.423
6.	RIANTO	PAN	3.535
7.	SAFRANA FIZAR, ST	GERINDRA	764
PINGGIR			
1.	PIPIT LESTARY, SPd	NASDEM	1.493
2.	SUSIANTO, SR	PKS	919
3.	DAUD GULTOM, STHI	PDIP	1.251
4.	AMRIL MUKMININ, SE, MM	GOLKAR	4.027
5.	ADIHAN, SH	GERINDRA	2.947
6.	ITA AZMI	PAN	920
7.	LEONARDUS MARBUN	PKS	1.627
RUPAT-RUPAT UTARA			
1.	SYAHRIAL, ST	GOLKAR	1.220
2.	ZAMZAMI HARUN, ST	GERINDRA	1.972
3.	NUR AZMI HASYIM, ST	DEMOKRAT	4.096
4.	ABDUL KADIR, SAg	PAN	4.408





Sekapur Sirih

Ir ZULFADLI
Sekretaris DPRD Bengkalis

Tak Kenal Maka Tak Sayang

TANPA terasa, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2014-2019 telah setahun menjalani masa pengabdian, dan akan memasuki tahun kedua sebagai wakil rakyat.

Dari 45 anggota DPRD Bengkalis yang dipercaya duduk menjadi wakil rakyat saat ini, sebagian merupakan muka-muka baru. Yang secara luas mungkin belum begitu diketahui latar belakang dan kiprahnya oleh masyarakat.

Bak kata pepatah, "tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta", maka Sekretariat DPRD Bengkalis mencoba menerbitkan sebuah buku yang berisi tentang gagasan, pemikiran, ide-ide serta latar belakang para wakil rakyat yang duduk di DPRD Bengkalis saat ini, sehingga bisa dikenal luas oleh masyarakat.

Melalui penerbitan buku ini, Kami berharap mampu memperkenalkan dan menyosialisasikan secara luas kiprah dan sosok para wakil rakyat periode 2014-2019. Selain itu juga untuk memberitahukan kepada khalayak masing-masing anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang mengabdikan saat ini. Terutama agenda-agenda perjuangan yang mereka usung, capaian-capaian yang berhasil mereka raih, termasuk juga prioritas pembangunan ke depan selama masa jabatan mereka.

Harapan Kami, dengan penerbitan buku ini, antara lain dengan batas-batas tertentu, para pembaca khususnya dan masyarakat Kabupaten Bengkalis pada umumnya, mengetahui setidaknya secara garis besar tentang figure yang mewakili mereka di lembaga legislatif, juga tentang kiprah dan sepak terjang mereka di masyarakat sebelum mereka duduk menjadi wakil rakyat.

Sasaran akhirnya adalah bagaimana anggota DPRD Kabupaten Bengkalis bisa dikenal luas oleh masyarakat, karena sesuai fungsinya, para anggota dewan adalah penyambung lidah rakyat. Selain itu juga masyarakat hendaknya mengetahui tentang apa-apa saja yang telah diperbuat oleh para wakilnya di lembaga legislatif, baik untuk kepentingan daerah maupun untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 45 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2014-2019 yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk menerima tim penulis buku ini untuk diwawancarai atau dihubungi melalui telepon guna mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan terkait kepentingan penerbitan buku ini.

Ucapan serupa dan penghargaan yang tidak terhingga, juga Kami sampaikan kepada tim penulis yang telah bersusah payah menemui, mewawancarai, menggali informasi dan mendapatkan bahan-bahan lain yang diperlukan, sehingga buku ini bisa terbit sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian sambutan kami, semoga buku ini memberi manfaat bagi banyak pihak.

Wassalam



Daftar Isi

SELALU JALIN KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT	1	MENGUJI KEMAMPUAN PROFESIONAL DI	
BANYAK YANG BELUM SAYA LAKUKAN	5	PANGGUNG POLITIK MELALUI POLITIK PRAKTIS	76
WUJUDKAN MASYARAKAT		MEMBANGUN HARUS DILANDASI KEBERSAMAAN	81
MADANI LEWAT PARLEMEN	9	PORSI PEMBANGUNAN DESA KURANG ADIL	85
TERINSPIRASI SEMANGAT SANG PROKLAMATOR	13	JADI POLITISI UNTUK MELAYANI UMAT	89
DARI AKTIVIS DUDUK DI KURSI DEWAN	17	RELA MENGUNDURKAN DIRI DARI CPNS	93
SUKSES DIAWALI DARI MIMPI	20	BUANG EGO, BANGUN SINERGISITAS	97
MEMBANGUN RUPAT YANG LEBIH BERMARWAH	24	JANGAN HANYA BERTUMPU PADA APBD	101
BERJUANG BERSAMA BURUH	27	ISTERI SEMPAT TIDAK SETUJU	105
BUTUH KERJA KERAS TUNTASKAN		PEMUDA SALAH SATU ELEMEN PENTING	
PERSOALAN INFRASTRUKTUR	31	DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	109
LEBIH FOKUS PERJUANGKAN		PENGABDIAN TIDAK PERNAH BERHENTI	113
ASPIRASI MASYARAKAT	35	AKTIF TURUN KE DESA LIHAT PERSOALAN	
MENGABDI UNTUK MASYARAKAT	39	MASYARAKAT	117
MASYARAKAT BUTUH JALAN PASARKAN		JANGAN BERHENTI BERBUAT BAIK	121
KOMODITAS PERTANIAN	43	BERAWAL DARI KESENJANGAN DI DEPAN MATA	125
PEDULI NASIB PETANI DAN NELAYAN	47	SEMPAT HIJRAH	131
TERJUN KE POLITIK UNTUK MEMPERJUANGKAN		MEMAHAMI APA YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT	135
ASPIRASI RAKYAT	51	TIDAK ADA YANG MUSTAHIL, SEMUA	
LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF HARUS KOMPAK	54	TERGANTUNG NIAT	139
SDM BERKUALITAS DAN KOMPETITIF		PETANI SAWIT MENJADI LEGISLATIF	143
HARUS DIPERSIAPKAN	57	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DASAR JADI TARGET	147
ANGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		ASA MASYARAKAT HARAPAN BARU	151
MELALUI PERTANIAN, PETERNAKAN		789 YANG BAWA HOKI	155
DAN PERIKANAN YANG TERINTEGRASI	61	BERAWAL DARI FOTO COPY KTP	159
KALAU TIDAK BISA BERBUAT, UNTUK APA		HASIL HARI INI ADALAH PERBUATAN MASA LALU	162
JADI WAKIL RAKYAT	65	AWALNYA SEMPAT MENOLAK	165
BIROKRAT MENJADI POLITISI	68	PRIHATIN MELIHAT SULITNYA AKSES MASYARAKAT	169
ANTARA HARAPAN DAN IMPIAN	72	JANGAN SEBUT RUPAT PULAU HARAPAN	173

H HERU WAHYUDI, SH



Selalu Jalin Komunikasi dengan Masyarakat

Pria yang satu ini tidak hanya berhasil memperpanjang jabatannya sebagai anggota DPRD Bengkalis untuk periode 2014 – 2019, juga berhasil memperbaiki posisi sebagai ketua DPRD. Jabatan itu diperoleh setelah partai yang dipimpinnya, Partai Aman Nasional (PAN), berhasil menjadi pemenang dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2014.

"Ini semua berkat kerja keras seluruh pengurus PAN di bawah kepemimpinan Ketua DPW PAN Riau, Bapak H Herliyan Saleh. Kemudian dukungan dari sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkalis yang telah memilih wakil-wakil mereka dari PAN," ujar Heru Wahyudi mengawali perbincangannya.

Bagi Heru, menjadi pemimpin tertinggi di lembaga wakil rakyat bukanlah hal yang ia cita-citakan. Sejak awal, ketika duduk menjadi anggota dewan, bagi dirinya yang terpenting adalah bagaimana bisa menjadi sosok wakil rakyat yang benar-benar bisa menjalankan amanah. Kalau ternyata dalam perjalanannya sekarang ia menjabat sebagai ketua dewan, maka itu semua tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh rakyat dan kehendak Allah SWT.

Sedikit menyibak ke belakang perjalanan politik suami dari Eli Kusumawati ini. Awal duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis tahun 2009, ia diberi kepercayaan sebagai ketua Fraksi PAN. Selain itu juga pernah menjabat ketua Badan Legislasi dan ketua Komisi II. Pada masa ini, terjadi pemekaran wilayah dengan disahkannya Kepulauan Meranti menjadi kabupaten baru. Akibatnya, terjadi pengurangan kursi PAN di DPRD Bengkalis, semula 4 kursi menjadi 2 kursi.

"Sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Bengkalis, saya sangat terpukul dengan pengurangan kursi ini," cerita Heru yang sejak saat itu berazam untuk menjadikan PAN sebagai partai pemenang Pemilu.

Pada tahun 2014, kembali dilaksanakan Pemilu Legislatif. Berbekal pengalamannya sebagai anggota dewan pada periode sebelumnya dan juga sebagai ketua DPD PAN Bengkalis, serta dukungan penuh dari Ketua DPW PAN Riau, PAN tidak hanya mengantarkan dirinya kembali sebagai anggota DPRD periode



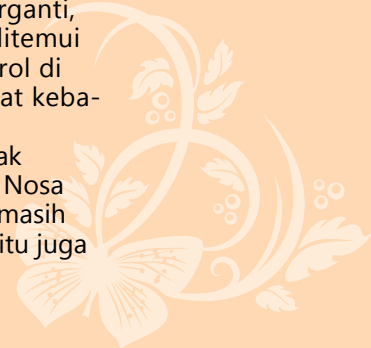
2014-2019. Tapi menjadi pemenang Pemilu di Kabupaten Bengkalis dengan merebut 8 kursi. Dari jumlah kursi, sebenarnya antara PAN dan Golkar sama-sama meraih 8 kursi. Namun partai berlambang matahari ini unggul dari perolehan suara. Maka, sesuai aturan perundang-undangan, otomatis kursi pimpinan DPRD dipegang PAN.

Perolehan suara Heru Wahyudi yang maju dari daerah pemilihan Bengkalis – Bantan pun tidak mengecewakan. Dari 10 kursi yang diperebutkan, dirinya berhasil memperoleh suara yang cukup signifikan. Ini tentunya tidak terlepas dari kemampuan Heru Wahyudi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Masyarakat menurut Heru, merupakan bagian terpenting dalam kedudukannya sebagai anggota dewan. Karena merekalah dirinya bisa duduk di kursi legislatif dengan berbagai fasilitas yang diberikan Pemerintah.

"Tanpa mereka, maka kita tidak ada apa-apanya. Jadi sudah sewajarnya kita selalu membangun komunikasi dengan mereka dan berusaha untuk selalu ada di samping mereka ketika kita dibutuhkan," kata Heru.

Dengan pandangannya yang seperti itu pula, Heru mengaku selalu berusaha untuk tampil apa adanya. Baik sebagai anggota DPRD, maupun dengan jabatannya sebagai ketua DPRD, tidak membuat dirinya bersikap seperti menara gading. Kehidupan sehari-harinya nyaris tidak berubah, selalu murah senyum. Nomor ponselnya jarang berganti, sehingga selalu bisa dihubungi dan ditemui kapan saja. Bahkan, mau diajak ngobrol di kedai kopi berbaur dengan masyarakat kebanyakan.

Sikap seperti itu, menurut Heru, tidak terlepas dari didikan ayahnya Chairum Nosa (almarhum) dan ibunya Hj Jasmi sejak masih kecil. Terutama sang ayah yang waktu itu juga





pernah menjadi anggota DPRD Bengkalis pada tahun 1971. "Orang tua selalu mengajarkan saya untuk selalu optimis dalam menjalani hidup ini dan jangan sombong," ujarnya.

Dalam mengemban visi dan misi yang diamanahkan untuk memimpin DPRD Bengkalis, Heru akan berusaha bersama anggota DPRD lainnya untuk bekerja sesuai fungsi dan kerja yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Orientasi lainnya juga pengabdian kepada masyarakat dan daerah karena dengan fungsi sebagai pimpinan DPRD yang notabenenya sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah juga harus menanamkan komitmen membangun daerah, diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bervisi keadilan dengan menempatkan kepentingan masyarakat sesuai porsinya.

"Fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus bisa saling berkoordinasi antara legislatif dengan eksekutif dalam rangka menjalankan pemerintahan ini. Salah satunya fungsi legislasi yang kita punya



harus membantu pemerintah menjalankan dengan cara membuat peraturan daerah yang bervisi kemasyarakatan,” katanya.

Harapan lain juga bisa membangun kebersamaan dalam menjalankan peran di DPRD sesuai tugas dan fungsi yang ada dan diharapkan juga anggota DPRD lainnya untuk saling bahu membahu, walaupun berbagai dinamika terjadi dan banyak mewakili kepentingan, tetapi tidak melupakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD dalam menjalankan pemerintahan.

Alhamdulillah, sambung Heru, sejak pelantikan anggota DPRD Bengkalis periode 2014 – 2019, kinerja DPRD Bengkalis secara kelembagaan menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satunya adalah bersama-sama dengan eksekutif telah berhasil mengesahkan APBD 2015 tepat waktu. “Ini awal yang cukup bagus sebagai bentuk kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Mudah-mudahan komitmen untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis bisa terus kita laksanakan pada tahun-tahun mendatang,” ujar Heru. ***

BIODATA

NAMA : H HERU WAHYUDI, SH
TEMPAT/TGL LAHIR : Bengkalis, 25 Juli 1971
ALAMAT : Jalan Bengkalis, Gg E Nomet
No.048 Bengkalis
JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : (0766) 22610
ISTRI : Elly Kusumawati,SH
ANAK : Alya Putri Faizah
AYAH : Chairum Nosa (almarhum)
IBU : Hj. Jasmi
RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SDN 5 Bengkalis (1986)
2. SMP 1 Bengkalis (1988)
3. SMA 1 Bengkalis (1990)
4. S1 UII Yogya (1990-995)
5. S2 Hukum di UNRI (sedang kuliah)

RIWAYAT PEKERJAAN

- :
 - ❖ Pernah menjadi konsultan hukum di Jakarta (1997-2000)
 - ❖ Anggota DPRD Bengkails (2009-2014)
 - ❖ Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)

RIWAYAT ORGANISASI

- :
 - ❖ Ketua PSIB Bengkalis
 - ❖ Pengurus Gapeknas Bengkalis
 - ❖ Pengurus Kadin Bengkalis
 - ❖ Pengurus KONI Bengkalis
 - ❖ Pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia Bengkalis
 - ❖ Pengurus Persaudaraan Haji Kabupaten Bengkalis
 - ❖ Pengurus Kontak Tani Andalan Bengkails
 - ❖ Pengurus Himpitan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Bengkalis



H INDRA GUNAWAN
EET, PhD



Banyak yang Belum Saya Lakukan

Tiga priode duduk sebagai wakil rakyat, tak terhitung lagi berapa banyak asam garam yang dikenyaminya. Di rumah rakyat itu, sejumlah posisi juga pernah dijabatnya, mulai dari anggota biasa, wakil ketua hingga ketua.

Berpenampilan jauh dari formal, bahkan sangat sederhana seperti menyatu dengan sikap kesehariannya. Santai duduk di kedai kopi bersama masyarakat, atau berolahraga badminton di salah satu GOR, membuat pria satu anak ini tak sulit ditemui. Karena disanalah hampir saban hari dia menghabiskan waktu senggang di sela-sela kosongnya aktivitas di gedung rakyat atau sepulang dari menemui masyarakat.

Gayanya memang tak banyak berubah, baik saat awal tahun 2004 lalu ketika dirinya baru pertama kali duduk sebagai anggota DPRD, atau ketika dirinya menjabat sebagai ketua DPRD di priode kedua maupun saat ini di jabatannya sebagai wakil ketua di priode ketiga. Tampil seadanya, santun dengan sebaya apalagi pada yang lebih tua. Tak heran, kalau ke mana-mana Ketua DPD II Partai Golkar Bengkalis ini selalu saja banyak yang menyapa.

Penampilan boleh lembut dan penuh canda. Tapi jangan heran, kalau berbicara atas nama masyarakat pelatih nasional Tarung Drajat ini bakal menggebrak meja. "Sebagai tanda kuatnya pembelaan terhadap masyarakat, tiga priode saya duduk di DPRD. Artinya, masih banyak masyarakat yang menginginkan dan percaya menitipkan amanahnya kepada saya. Makanya, sesuai dengan kapasitas dan kewenangan saya, saya harus berbicara dan berbuat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat," ujar Doktor Universitas Selangor Malaysia ini.

Berbicara?.. ya, tugas utama anggota DPRD itu kata suami Rika Sundari SP ini, memang berbicara. Berbicara untuk berjuang dan mempertahankan apa yang menjadi hak dan keinginan rakyat. "Parle itu artinya berbicara, maka kita harus berbicara untuk memperjuangkan dan mempertahankan apa yang menjadi keinginan rakyat. Tak selesai bicara lembut ya harus keras, tak selesai bicara keras masih ada cara lain, jika perlu gebrak meja lalu kembali berbicara," tegas pria yang akrab disapa Eet ini.



Tidak heran, dalam beberapa kali statemennya di media, komentar mantan Ketua KNPI Bengkalis ini selalu apa adanya. Tidak pandai memoles kata menjadi lebih lembut, berbicara apa adanya, apalagi kalau hal-hal yang dikomentari bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak.

Hanya memang, seiring perjalanan waktu dan pengalaman, bicara dan gaya santun lebih dominan ketimbang bicara keras bahkan terkesan memaksakan kehendak. “Seperti saya sampaikan tadi, kalau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, mengebrak mejapun akan saya lakukan. Santun tak mesti mengabaikan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kita,” akunya.

Syahwat Politik Terukur

Tiga priode menjadi wakil rakyat, tidak hanya kenyang dengan asam garam di dunia politik dan pemerintahan, tapi juga kehidupan bermasyarakat. Bagaimana mesti bersikap, berteman, menghadapi lawan politik serta berhadapan dengan masyarakat akar rumput. Soal sikap, memang jauh berbeda saat awal dirinya menjadi wakil rakyat. Eporia menjadi wakil rakyat di priode pertama memang jelas terlihat, garang seperti tanpa perhitungan. Kini, jauh lebih dewasa dan memahami makna tugas dan kewajiban. Menjadi wakil rakyat adalah sebuah amanah, bukan untuk gagah-gagahan apalagi untuk kepentingan kelompok atau pribadi.

Sebagian kalangan memandang apa yang sedang dijalani Eet saat ini adalah sebuah prestasi, selama tiga priode masih saja masyarakat percaya menitipkan amanah kepadanya. Tapi ada pula yang menilai-nya sebagai “jago kandang”, tidak berani bertarung di level atau kasta yang lebih tinggi dan mentereng.

Untuk apresiasi yang diberikan, Ketua Rumpun Dagang Melayu Bengkalis ini mengatakan kasta rendah dan tinggi sama saja, tapi bagaimana kita memfungsikan status kita untuk kepentingan masyarakat banyak. Butuh kerja keras dan sikap cerdas agar kepercayaan masyarakat tidak luntur kemudian memudar lalu berbalik menyerang. Pahami apa yang menjadi keinginan konstituen, lalu menjadikannya sebuah tanggung jawab dan diperjuangkan dengan komitmen. “Tak mudah menjaga kepercayaan masyarakat, alhamdulillah selama tiga priode kepercayaan dan amanah itu masih dititipkan di pundak saya. Menjadi sebuah keniscayaan bagi saya untuk tetap menjaga dan merawat amanah ini,” tuturnya.



Lalu, soal cibiran sebagian kalangan, Eet juga punya jawabannya. Baginya, berpolitik itu tidak boleh grusa-grusu (hantam kromo), hitung-hitungannya harus tepat dan yang paling penting tidak larut dalam syahwat politik yang menggebu-gebu, tapi kemudian layu. Sebagai pemegang tampuk sebuah partai besar, tak sulit baginya tampil di level yang lebih tinggi. Helat Pemilu 2010, dirinya berpeluang dan bisa saja mencalonkan diri sebagai wakil bupati, karena banyak calon yang melamarnya. Tapi hal itu urung dilakukan karena dirinya memiliki pemikiran dan pertimbangan politik matang.

“Jangan latah dengan syahwat politik yang tak terukur, kaji-kajinya harus masak. Kalau kail hanya panjang sejengkal, jangan pulak lautan yang diduga-duga. Salah-salah bisa jatuh tekelepai macam tapai, sudah banyak contoh yang bisa kita lihat. Jadi bukan soal berani atau tidak, tapi soal kematangan dalam Decision making” paparnya.

Lagi pula, kata Eet, berada di barisan grass root, dirinya bersentuhan dengan masyarakat, sehingga lebih memahami dan mengerti apa yang menjadi keinginan masyarakat. Bahkan katanya, banyak temannya yang sudah naik kasta tapi kemudian abai dengan konstituen yang mengantarkan mereka duduk sebagai wakil rakyat. “Saya tidak mau seperti itu.

Pekerjaan Rumah Menggunung

Memasuki masa tugas di priode ketiga, azam dan tekadnya tetap ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Masih terlalu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai persoalan in-



frastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, pelayanan dunia kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia.

Diakui, masih terlalu banyak infrastruktur dasar yang belum terbangun dengan baik. Jalan-jalan poros masih banyak yang rusak dan perlu peningkatan. Sarana air bersih baru dinikmati sebagian masyarakat, jalan-jalan lingkungan belum tuntas, sarana pendidikan belum merata serta fasilitas kesehatan yang harus mendapat perhatian.

“Tiga priode ini belum apa-apa, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Masih butuh kerja keras dan perhatian kita. Belum semua nelayan dilengkapi dengan sarana tangkap memadai, tidak semua petani mampu membeli pupuk atau saprodi, belum semua warga menikmati jaringan listrik, bahkan masih ada sebagian masyarakat terpaksa menggunakan air asin untuk mandi dan mencuci. Inilah sekian banyak PR yang mesti dituntaskan,” ungkapnya.

Untuk itu kata Eet, dirinya sangat tegas dan berkomitmen terus mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana infrastruktur yang belum menyentuh masyarakat. Selain infrastruktur, kebijakan dan program pemerintah juga harus mampu mengangkat dan menstimulus ekonomi masyarakat. Mari wujudkan Bengkalis jaya Bengkalis sejahtera.***

BIODATA

NAMA : H INDRA GUNAWAN EET, Ph.D
 TEMPAT/TGL LAHIR : Bengkalis, 30 April 1974
 ALAMAT : Jalan Parit Bangkok
 JENIS KELAMIN : Laki-laki
 AGAMA : Islam
 NO.TELP/HP : 0812 6815 151
 ISTRI : Rika Sundari, SP
 ANAK : Satu orang
 1.Dinie Mentari Gunawan
 AYAH : H Darli Markawi
 IBU : Siti Chodijah
 RIWAYAT PENDIDIKAN : ● SDN 09 Bengkalis
 ● SMPN 01 Bengkalis

RIWAYAT PEKERJAAN : ● STM Muhammadiyah Pekanbaru
 ● D3 Engineering Interior Design
 ● S1 Unilak Pekanbaru
 ● S2 UIR Pekanbaru
 ● S3 University Selangor
 RIWAYAT ORGANISASI : ● Anggota DPRD Bengkalis (2004-2009)
 ● Anggota DPRD Bengkalis (2009-2014)
 ● Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)
 ● Ketua KNPI Kabupaten Bengkalis
 ● Ketua Rumpun Dagang Melayu Bengkalis
 ● Wakil Ketua HIPMI Kabupaten Bengkalis
 ● Dewan Pelatih Boxer Nasional
 ● Ketua DPD Golkar Kabupaten Bengkalis

ZULHELMI, SHI



Wujudkan Masyarakat Madani Lewat Parlemen

Di usianya yang masih relatif muda, sosok yang tenang dan bersahaja dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, membuat alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Sutan Syarif Kasim (SSK) Pekanbaru ini dipercaya partainya menjadi salah satu unsur pimpinan di DPRD Bengkalis. Duduk sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bengkalis-Bantan, semakin menguatkan tekatnya untuk mengabdikan secara utuh pada kampung halaman.

Pria yang dilahirkan di Bengkalis, 16 April 1982 itu adalah Zulhelmi, Shi, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sekarang memegang jabatan wakil ketua DPRD Bengkalis. Sewaktu kuliah di Pekanbaru, ia berpikir suatu hari nanti setelah tamat akan mengabdikan di tanah kelahirannya Bengkalis. Setamat kuliah ia awalnya mengabdikan sebagai guru di Aliyan Darul Ulum Bantan Tua, Kecamatan Bantan.

Zulhelmi mengutarakan niat hatinya mengabdikan di Bengkalis tidak lain adalah untuk mewujudkan civil society atau masyarakat madani yang sejahtera dan berkeadilan sosial sesuai dengan tujuannya dari awal mengabdikan sebagai guru dan sekarang menjadi anggota DPRD Bengkalis periode 2014-2019.

Kiprahnya di dunia politik sudah dimulai sejak masih di bangku kuliah lewat PKS tahun 2004 di Pekanbaru. Dari sanalah kemudian ia merasa semakin tertarik untuk mendalami dunia politik, bersama salah seorang sahabatnya, Jamal Abdillah, mantan Ketua DPRD Bengkalis periode 2009-2014. Sebagai kader partai yang militan, tidak salah rasanya kalau partai berbasis dakwah itu memberinya kepercayaan untuk memegang jabatan sebagai wakil ketua ketika duduk dalam barisan 45 orang wakil rakyat saat ini.

Kesempatan baik itu akhirnya tiba pada Pemilu Legislatif 2014, ia mampu meraih suara signifikan dan terpilih menjadi wakil rakyat untuk periode 5 tahun ke depan.

"Sejak masih kuliah, saya terinspirasi untuk mengabdikan membangun Bengkalis menuju yang lebih baik lagi. Salah satu jalannya adalah melalui partai politik, dan PKS menjadi pilihan saya karena lebih mengedepankan dakwah serta ukhuwah Islamiyah dalam berpolitik serta proses kaderisasi yang dilakukan PKS sangat menarik perhatian saya," kata Zulhelmi, tentang pilihannya berpolitik ke PKS.

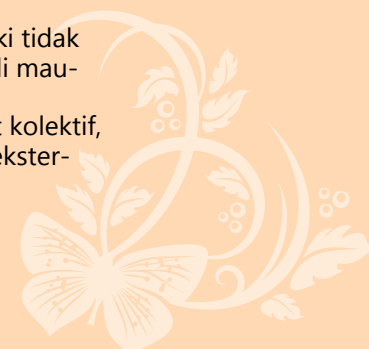
Kemudian, terang ayah dua anak ini, setelah menjadi anggota DPRD Bengkalis ia semakin tertantang





untuk berbuat sesuai dengan tekad awalnya mengabdikan dan membangun Bengkalis tersebut. Meski tidak banyak mengumbar kata, ia melakukan pengabdian dengan berbagai program baik secara pribadi maupun bersama dengan partai yang dinaunginya.

Disinggung tentang sudut pandangnya terhadap DPRD sebagai sebuah lembaga yang bersifat kolektif, ia mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, baik itu di internal maupun ekster-



nal. Di tingkat internal ia menilai seluruh komponen di lembaga dewan harus bekerja lebih maksimal lagi dengan tidak menonjolkan kepentingan politik. Di matanya, DPRD atau parlemen harus solid dan kokoh seiring fungsinya yang melekat sebagai lembaga legislasi, budgetting dan controlling.

Sedangkan persoalan eksternal adalah menyangkut dengan kehidupan masyarakat. Sebab, DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat, tidak bisa melepaskan dirinya begitu saja setelah terpilih dan dilantik menjadi anggota dewan. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek pembangunan harus menjadi skala prioritas dalam perjuangan di lembaga legislatif, tentu saja harus disinergikan dengan program eksekutif.

"Kami anggota dewan periode 2014-2019 baru sekali membahas anggaran (APBD 2015). Hampir setahun berjalan, masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan, mulai dari rendahnya serapan APBD, proses pelelangan proyek yang sering terlambat serta kegiatan lain di SKPD yang bergerak stagnan," jelas Zulhelmi.

Namun kondisi tersebut tidak membuatnya patah semangat atau berpangku tangan. Dorongan untuk mewujudkan clean and good governance harus terus dilakukan supaya masyarakat madani yang diidam-idamkan tercapai. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dan komunikasi yang sejalan dalam membangun Bengkalis, dengan menanggalkan ego masing-masing pihak, terutama para pengambil kebijakan di negeri ini.

Antara legislatif, eksekutif dan masyarakat harus terbangun komunikasi yang searah, sehingga pembangunan berbasis kebutuhan dapat dilaksanakan, bukan lagi pembangunan dari top down tapi dari bottom up. Karena sasaran dari pembangunan itu adalah masyarakat luas, bukan segelintir orang.

Terus Berbenah

Ditanya soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda), Zulhelmi mengaku masih belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Namun berbagai kendala dalam merealisasikan RPJMD itu juga menjadi salah satu faktor penyebab pencapaiannya tidak maksimal, misalnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau serta Bengkalis yang belum tuntas.

Mengusung misi mewujudkan masyarakat madani dari parlemen itulah, ia kembali meminta pihak eksekutif untuk terus berbenah terhadap pencapaian RPJMD. Karena program-program yang termaktub dalam RPJMD objeknya adalah masyarakat dengan meningkatnya taraf perekonomian yang bermuara kepada kesejahteraan serta kemajuan daerah sendiri.

"Sayang, RPJMD yang sudah dituangkan dalam produk hukum tidak berjalan maksimal. Kita juga tidak bisa menyalahkan satu pihak, harus dilihat terlebih dahulu latar belakang yang menjadi penghalangnya, salah satunya adalah RTRW. Untuk itu, kepala daerah ke depannya harus mengevaluasi kinerja perangkat di bawahnya serta membuat program yang lebih realistis sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan masyarakat," papar Zulhelmi.

Pada kesempatan bincang tersebut, Zulhelmi juga sempat menyampaikan rasa gundahnya melihat kondisi perusahaan semi plat merah Bengkalis, BUMD PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ). Ia menyebut pasca kasus mega korupsi Rp300 miliar, kondisi perusahaan sungguh menyedihkan, sudah tak punya modal kerja lagi.

Ia berharap aparat penegak hukum yang menangani kasus itu, segera menuntaskannya. Karena dana Rp300 miliar itu jumlahnya tidak sedikit, bisa dipergunakan untuk menyejahterakan rakyat lewat berbagai program ekonomi kerakyatan yang lebih kongkrit, seandainya tidak dikorupsi. Apalagi tujuan awal pe-



nyertaan modal tersebut untuk mengatasi krisis listrik di Kabupaten Bengkalis dengan membangun PLTGU dan PLTU di Kecamatan Pinggir dan Bukitbatu.

"Cukup menyedihkan dan tragis. Duit yang seharusnya bisa membantu mengatasi krisis listrik di Bengkalis malah dilarikan untuk kepentingan bisnis yang tidak diatur dalam Perda. Harapan kita aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini, karena sudah melenceng dari tujuan awal dan terjadi penyalahgunaan keuangan negara dalam skala besar," sambung Zulhelmi.

Oleh sebab itu, tujuan mewujudkan masyarakat yang madani dalam sistem pemerintahan harus dilakukan oleh orang-orang yang benar dan di tempat yang tepat, sehingga tidak salah sasaran. Juga para pemangku kebijakan, legislatif dan eksekutif harus saling bahu membahu membangun negeri ini sehingga target dari pembangunan menuju masyarakat madani dapat terwujud suatu hari kelak. ***

BIODATA

NAMA : ZULHELMI, SHI
TEMPAT/TGL LAHIR : Bengkalis, 16 April 1982
ALAMAT : Jalan Panglima Minal No101, Bengkalis
JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 0813 6700 1507
ISTRI : SITI UMI SALAMAH
ANAK : Dua orang
1. Muhammad Luthfi Almadani
2. Azkia Hanna Syahida

AYAH : Drs H Hamzah
IBU : Hj Zainun

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SDN 028 Bengkalis (1994)
2. MTs YPPI Bengkalis (1997)
3. MAN Bengkalis (2000)
4. UIN Suska Pekanbaru (2004)

RIWAYAT PEKERJAAN : ● Pemilik Percetakan
● Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)

RIWAYAT ORGANISASI : ● Pengurus Pelajar Islam Indonesia

KADERISMANTO



Terinspirasi Semangat Sang Proklamator

Berjuang untuk keadilan dan kemakmuran, membuat pribadi yang tegas dan lugas itu akhirnya memilih bergabung dengan banteng moncong putih, simbol kebangkitan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang didirikan salah satu anak Proklamator Bung Karno, Megawati Soekarnoputri.

Terinspirasi semangat sang proklamator Bung Karno, pria bernama Kaderismanto ini tetap loyal serta berkomitmen untuk terus berjuang lewat PDIP sebagai sarana politik yang diyakininya. Kekaguman pada sosok Bung Karno, tokoh revolusioner, proklamator dan presiden pertama Indonesia ini diimplementasikan lewat perjuangan di jalur politik praktis.

Meski sempat dua kali gagal di Pemilu Legislatif (2004 dan 2009), tidak membuatnya patah arang. Malah ia berkeyakinan suatu hari nanti, ia akan mampu mencapai kursi di parlemen. Keyakinannya itu akhirnya membuahkan hasil. Pada pencalonan ketiga, Pemilu Legislatif 2014 dari daerah pemilihan Kecamatan Mandau A, ia terpilih sebagai anggota DPRD Bengkalis periode 2014-2019.

Tidak hanya sampai di situ, Kaderismanto juga dipercaya partainya untuk menjadi salah satu nahkoda atau unsur pimpinan di DPRD Bengkalis di posisi wakil ketua. Setelah menapakkan kaki di lembaga legislatif, ia masih memendam cita-citanya yang panjang sejak bergabung dengan PDIP sejak tahun 1999 lalu, yaitu berjuang untuk kepentingan masyarakat yang tertindas dan termarginalkan, selaras dengan ajaran Bung Karno.

Diganjal UU

Semangat perjuangan Bung Karno yang diusungnya, masih menemui jalan buntu di DPRD. Hal itu tidak lain karena aturan main serta perangkat perundang-undangan yang justru memangkas kewenangan para wakil rakyat saat ini. Peran DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan di daerah disayat secara perlahan, yang membuat para wakil rakyat hanya bisa menjadi pengawas dan penonton dari jalannya roda pemerintahan yang sepenuhnya berada di tangan eksekutif.

"Dalam konteks perjuangan Bung Karno, ada ajaran marhaenisme. Yaitu tentang rakyat kecil yang tertindas, harus diperjuangan nasibnya. Alat perjuangan itu melalui kelembagaan resmi di pemerin-

tahan, dimana saya duduk sebagai bagian dari wakil rakyat. Tapi kita sendiri merasa tidak memiliki kewenangan penuh dalam bentuk partisipatif menjalankan amanah tersebut karena diganjal undang-undang dan produk hukum lainnya,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bengkalis ini.

Ayah tiga anak ini mencontohkan, sebelum Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah boleh ditolak atau diterima DPRD. Tapi sejalan dengan hasil revisi UU tersebut, DPRD tidak bisa menolak yang namanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, hanya sekedar memberi catatan saja.

Kemudian sambung Kaderismanto yang berdomisili di Duri ini, dalam hal budgetting, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa dijalankan eksekutif tanpa harus melalui pengesahan DPRD atau disebut dengan istilah APBD Peraturan Kepala Daerah (Perkada) seperti yang pernah terjadi pada Kabupaten Bengkalis tahun 2014.

“Secara kelembagaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPRD, dipangkas pelan-pelan dengan terbitnya berbagai peraturan oleh Pemerintah Pusat. Tapi hal tersebut jangan membuat kita patah semangat, terus berjuang untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah, meski di tengah dinamika politik yang terus bergulir mulai dari pusat sampai ke daerah,” pesan pria kelahiran Batu Panjang, Kecamatan Rupat ini.

Rakyat di Posisi Lemah

Persoalan lain yang menjadi kerisauan pemuja Bung Karno ini adalah proses pembangunan yang bergulir sejak otonomi daerah (Otda) tahun 2001, belum menjadikan rakyat dalam posisi yang kuat secara ekonomi dan kesempatan. Hal itu tidak terlepas dari manajerial pemerintahan yang ada di dalam pengelolaan pembangunan maupun keuangan daerah. Pihak eksekutif selaku eksekutor pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya di Bengkalis, masih lemah dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Disentil Kaderismanto, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bengkalis sudah terbiasa dengan pola kerja santai, tidak mau banyak kerja, malah lebih suka berjalan keluar daerah dengan judul perjalanan dinas atau nongkrong di kedai kopi pada jam kerja. Pihak eksekutif di matanya harus cerdas menggali potensi daerah yang mendatangkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, tentu saja dengan mensinergikan semua potensi ekonomi lokal yang ada.

Ia juga menilai sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM), sektor perkebunan rakyat, peri-





kanan dan pertanian masih belum tergal dengan baik. Lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah membuat pelaku usaha UMKM bergerak stagnan di Kabupaten Bengkalis. Anehnya lagi, setiap bantuan yang disalurkan Pemerintah Daerah hilang tak berbekas akibat tidak adanya pembinaan dan pengawasan atau salah sasaran.

"Kita melihat sejak beberapa tahun belakangan, bantuan yang disalurkan Pemerintah Bengkalis di berbagai sektor, mayoritas tidak ada bekasnya sekarang ini. Bantuan itu selain tidak ada bimbingan dan pengawasan kepada si penerima, juga diduga tidak tepat sasaran. Sektor riil dan usaha kecil harus digenjot sebagai pondasi ekonomi rakyat yang sesungguhnya, karena Bengkalis tidak bisa selamanya bergantung terus kepada dana bagi hasil dari sektor migas, harus ada inovasi dan terobosan," saran Kaderismanto.

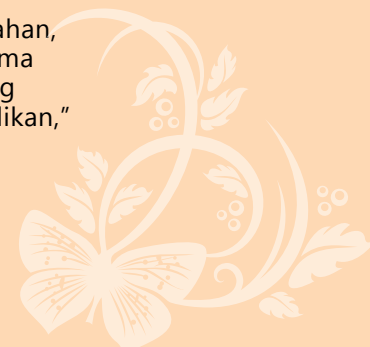
Ancaman Abrasi

Pada kesempatan itu, pria yang biasa disapa Kade ini juga menuturkan kerisauannya pada ancaman abrasi di Pulau Rupat, tanah kelahirannya. Bencana abrasi yang datang sudah merusak lahan warga dan berimbas pada perekonomian. Ia menyarankan, supaya dibuat pola terpadu mencegah abrasi selain turap pemecah gelombang, yaitu dengan budidaya mangrove di sepanjang pantai, karena biayanya yang relatif lebih murah dibanding turap.

Penanganan abrasi di Rupat maupun Kecamatan Bantan, selain menggunakan sharing program dan sharing budget dengan pemerintah di atasnya, juga bisa efektif dengan pola budidaya mangrove secara berkesinambungan. Untuk melaksanakan pola budidaya mangrove tentu harus melibatkan kelompok masyarakat, dengan tidak mengesampingkan peran Pemerintah Daerah karena mereka tetap menjadi leading sector semua program yang digulirkan di Kabupaten Bengkalis.

Kade juga menuturkan tentang kekhawatirannya terhadap hak-hak masyarakat atas penguasaan dan pengelolaan lahan. Masalah itu bermuara kepada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang tak kunjung selesai. Ditemukan sejumlah hak-hak masyarakat atau lahan yang sudah dikelola masyarakat selama ini, ternyata masuk dalam hutan lindung atau hutan produksi terbatas (HPT). Juga lahan-lahan perusahaan pengelola hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit.

"Ada beberapa kasuistik yang saya temukan di lapangan menyangkut masalah kepemilikan lahan, terutama yang digarap dan dihuni masyarakat, merupakan kawasan hutan lindung atau HPT. Sama juga halnya dengan lahan yang digarap perusahaan perkebunan dan HTI, juga kawasan terlarang untuk dieksplorasi. Itu banyak terjadi di Kabupaten Bengkalis, termasuk tumpang tindih kepemilikan," ujar Kade tentang masalah lahan yang sering menuai konflik di tengah masyarakat.



Dicontohkannya, sejumlah desa di Kecamatan Mandau dan Pinggir, dimana di desa tersebut sudah dihuni masyarakat selama tahunan serta adanya areal perkebunan, tapi kawasannya dalam RTRW merupakan kawasan HPT. Ada lagi tanah ulayat masyarakat di Kecamatan Pinggir digarap perusahaan perkebunan dan HTI mencapai ribuan hektar. Sehingga persoalan tersebut harus didudukkan kembali, dan di situlah peran strategis pemerintah dituntut untuk menyelesaikannya secara adil.

“Sejalan negara ini didirikan, semua kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia adalah milik rakyat, dikelola untuk kemakmuran bersama. Kenapa masih ada rakyat yang digusur dari tanah yang di-huninya, ketika di satu sisi para pengambil kebijakan di negeri ini dengan mudahnya memberikan lahan seluas-luasnya kepada pemodal besar atau orang asing dengan dalih investasi. Seharusnya konsep land reform atau tanah untuk rakyat diprioritaskan terlebih dahulu,” tutup Kade seraya menyebut pesan Bung Karno yang tak terlaksana sampai 70 tahun Republik ini Merdeka.***

BIODATA

NAMA	: KADERISMANTO
Tempat/Tgl Lahir	: Batu Panjang, 12 Oktober 1978
Orang Tua	:
Ayah	: Ridwan
Ibu	: Raimah (almarhumah)
Istri	: Mila Fitria
Anak	: Tiga Orang
	1. Siti Khaleda Shifa Natasya
	2. Askhiya Dezaki Abdalla
	3. Labika Fathinniran Kamila
Pendidikan	:
	1. SDN 01 Batu Panjang, Rupert
	2. MTsN Kota Bengkalis
	3. MAN Kota Dumai
	4. Universitas Lancang Kuning (masih kuliah)
Organisasi Politik	: ● Ketua PAC PDIP Rupert
	● Ketua DPC PDIP Kabupaten Bengkalis



H AZMI BIN ROZALI,
SIP, MSI



Dari Aktivis Duduk di Kursi Dewan

Di lingkungan tempat tinggalnya, anggota dewan asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, tutur katanya sopan dan murah senyum. Ia juga dikenal sebagai sosok yang rajin mengikuti pengajian dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Bisa dikatakan, dalam kehidupan sehari-hari, pria berjenggot ini pembawaannya biasa-biasa saja, jauh dari kehidupan serba mewah.

Barangkali karena kesederhaannya ini, mau bergaul dengan masyarakat dari semua kalangan serta rendah hati dalam melayani aspirasi masyarakat, membuat pria pemilik nama lengkap H Azmi bin Rozali SIP, MSI ini kembali dipercaya masyarakat untuk duduk sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Bukit Batu – Siak Kecil. Jumlah suara yang diraupnya pun tidak tanggung-tanggung, 1.389 suara, terbesar ketiga setelah Fakhru Nizam, ST dari PAN dan Johan Wahyudi dari Nasdem.

Dengan terpilihnya pria kelahiran Sungai Pakning, 7 Mei 1971 ini, maka ia satu dari segelintir anggota DPRD Bengkalis yang meraih hat-trick alias tiga periode berturut-turut menjadi anggota DPRD walau pada periode sebelumnya, Azmi sempat dilengserkan. Terpilihnya Azmi untuk kali ketiga sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Bukit Batu – Siak Kecil dengan perolehan suara cukup signifikan, membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk mewakili masyarakat menyampaikan aspirasi mereka.

"Ini semua rencana Allah, kita sebagai manusia hanya bisa berencana, berusaha dan berdoa," ujar Azmi terkait dengan kembali terpilihnya ia sebagai anggota DPRD Bengkalis untuk kali ketiga.

Walau dalam kehidupan bermasyarakat Azmi terkenal lemah lembut, namun bukan berarti dirinya tidak bisa bersikap tegas, terutama dalam menegakkan kebenaran. Kata-kata tegas bagi Azmi sebenarnya sudah mendarah daging di hati sanubarinya. Bahkan sudah menjadi makanan sehari-hari sejak ia duduk di bangku kuliah. Turun ke jalan untuk menyuarakan kebenaran, memuat tulisan-tulisan yang membangkitkan semangat pergerakan mahasiswa, merupakan upaya dirinya dalam memperjuangkan keadilan. Tidak mengherankan, dengan gerakan-gerakannya itu, Azmi dikenal sebagai tokoh pergerakan mahasiswa nomor 1 di Riau.





Kalangan aktivis mahasiswa tahun 1994-1996 mengenal Azmi sebagai sosok pemimpin yang dapat dipercaya. Dia tidak pernah mengkhianati kepercayaan tersebut. Pada suatu ketika dia pernah dipanggil oleh Dekannya. Pak Dekan membawa pesan dari Gubernur Riau waktu itu, Soeripto.

"Sudahlah, jangan unjukrasa lagi, kamu mau minta apa, Pak Gubernur suruh tanya," ujar Dekan di ruangnya. Setelah dipikir dalam-dalam, Azmi berkata, "Maaf Pak, saya tidak dapat mengkhiana-

ti kawan-kawan mahasiswa! Saat unjuk rasa kami sama-sama merasakan teriknya panas matahari. Saya tidak mau mengorbankan gerakan mahasiswa untuk kepentingan pribadi," ujarnya. Waktu itu Azmi dimarahi oleh dekannya dengan sebutan bodoh. Dia diam saja waktu dimarahi.

Keteguhan hati yang ia miliki dalam menegakkan kebenaran terus ia pertahankan, bahkan ketika duduk sebagai wakil rakyat. "Yang berbeda hanya caranya saja, kalau dulu kita turun ke jalan, sekarang cukup di Gedung DPRD melalui sidang paripurna, hearing dan pernyataan-pernyataan di media," ujar Azmi.

Bagi Azmi, sikap kritis tapi konstruktif harus ada bagi siapapun, terlebih anggota DPRD Bengkalis. Sikap tersebut tidak boleh pandang bulu. Masih segar dalam ingatan tatkala Azmi menggulirkan hak interpelasi pada masa kepemimpinan Bupati Bengkalis H Syamsurizal. Sikap kritisnya itu membuat anak dari pasangan H Rozali bin H Atan Wahid dan Hj Fatimah binti Yahya ini harus merelakan kursi DPRD-nya "diberikan" kepada orang lain dari partai PDK. Namun, kenyataan pahit itu tidak membuat Azmi melunak, karena setiap perjuangan memang membutuhkan pengorbanan. Itu sebabnya, tatkala Bengkalis dipimpin Bupati H Herliyan Saleh yang notabene diusung PKS, Azmi tetap bersikap kritis terutama dalam pemberitaan di media massa, seperti pelaksanaan proyek multiyears dan dana penyertaan modal PT BLJ.

Pria yang tak banyak bicara ini mengajak teman-temannya di DPRD, khusus yang pernah menjadi aktivis mahasiswa, untuk tidak larut dalam pragmatisme dalam pengambilan keputusan. Jadi anggota dewan, papar Azmi, harus punya harga diri dan kehormatan. Kalau anggota dewan tidak menjaga marwah dan harga dirinya, secara kelembagaan DPRD tidak ada artinya di hadapan masyarakat. Kalau sudah terjadi seperti itu, masyarakat tidak perlu menambah kata yang terhormat di belakang kata anggota dewan. "Jangan pernah gunakan kata yang terhormat apabila anggota dewan tidak menjaga kehormatan dirinya," ujarnya tegas. ***

BIODATA

NAMA : H AZMI BIN ROZALI, SIP, MSI
 TEMPAT/TGL LAHIR : Sungai Pakning, 7 Mei 1971
 ALAMAT : Jalan Kelapa No 154 Sejangat
 JENIS KELAMIN : Laki-laki
 AGAMA : Islam
 NO.TELP/HP : (0766) 39145 / 0812 6810 808
 ISTRI : Hj. Virginia
 ANAK : 1. Iona Sastra Diva

AYAH : H Rozali Atan Wahid
 IBU : Hj Fatimah YS
 RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SD Negeri 001 Sungai Pakning (1984)
2. SMP Negeri Sungai Pakning (1987)
3. SMA Negeri Sungai pakning (1990)
4. S1 Universitas Riau (1996)
5. S2 Universitas Riau (2011)

RIWAYAT PEKERJAAN :

1. Penulis sastra budaya harian Riau Pos di Pekanbaru, 1991-sekarang.
2. Penulis lepas mingguan Genta, terbit di Pekanbaru, 1991-1996
3. Koresponden Majalah TIRAS di Riau dan Jambi (1996-1997)
4. Penulis Sastra Budaya di Harian Bisnis Indonesia (1995-2000)
5. Wartawan Majalah TIRAS di Jakarta (1997-1998).
6. Wartawan Harian Riau Pos di Jakarta (1998)
7. Wartawan Tabloid KRONIKA, Jakarta (1999)
8. Asisten Redaktur Majalah Berita INTERVIEW, Jakarta (1999-2001)
9. Pendiri dan staf ahli majalah PERNIAGAAN RIAU, Kadin Riau (2002)
10. Direktur Utama CV Bedayo Tuah Amanah, Pekanbaru (2002– sekarang)
11. Direktur Utama PT Alaf Bedayo Pekanbaru (2003 – sekarang)
12. Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)

RIWAYAT ORGANISASI :

1. Pengasuh Surat Kabar Kampus BAHANA MAHASISWA Universitas Riau (1990-1996) dengan posisi sebagai berikut:
 - a. Reporter Magang 1990-1991.
 - b. Penanggung Jawab Sirkulasi 1991-1992
 - c. Sekretaris Redaksi 1992-1995
 - d. Pemimpin Redaksi 1995-1996
2. Pemimpin Kesatuan Aksi Mahasiswa Riau (1994-1996)
3. Fungsionaris Senat Mahasiswa Universitas Riau (1994-1996)
4. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Ikatan Pemuda Melayu Riau (1996-1998)
5. Ketua Forum Komunikasi Alumni Universitas Riau di Jakarta (1998-1999)
6. Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau se-Jabotabek (1999-2001)
7. Pengurus Persatuan Keluarga Besar Masyarakat Riau Jakarta (1998-2001)
8. Ketua Umum Yayasan Kesenian Riau Jakarta (1998-2001).
9. Penasihat Ikatan Pemuda Mahasiswa Bengkalis Jakarta (2000-2002)
10. Direktur Eksekutif Yayasan Kesenian Riau Jakarta (2001-2004)
11. Ketua I Dewan Kesenian Riau (2002-2007)
12. Sekretaris Umum Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Bengkalis (2002–sekarang)



ADIHAN, SH



Sukses Diawali dari Mimpi



Adihan, SH merupakan anggota DPRD Bengkalis kelahiran Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir. Nama anggota dewan yang satu ini barangkali masih asing di sebagian besar telinga masyarakat yang ada di Kota Bengkalis. Namun, tidak bagi masyarakat di Kecamatan Pinggir. Keramahannya dalam bergaul dan tidak memilih-memilih teman, membuat dirinya cukup dikenal, bahkan sebelum duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis periode 2004-2019.

Adihan, seperti juga masyarakat kebanyakan, sebelum duduk sebagai waki rakyat, harus bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan apa saja ia lakoni untuk menyambung hidup tanpa rasa malu, yang penting halal.

Bisa dikatakan pria yang terlahir dari pasangan H Suwiriman dan Hj Netty Fitri ini sosok pekerja keras dan patut ditiru oleh generasi muda. Sederet pekerjaan pernah ia lakoni, sebut saja misalnya tenaga sukarela Kantor Camat Pinggir, honor komite SMP Negeri 10 Pinggir, kemudian wiraswasta, hingga dosen luar biasa Amik Mitragama Duri.

“Saya juga rekanan dari PT CPI dengan jabatan Direktur Potong Rumput Chevron (DPRC),” ujar Adihan mengawali pembicaraan.

Bekerja sebagai potong rumput di salah satu perusahaan raksasa di Kota Duri, tidak membuatnya minder. Pekerjaan potong rumput di PT CPI ini dilakoninya dengan dukungan penuh dari keluarga dan kerabat dekat, dengan lulusan terbaik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan berbekal pengalaman itu, Adihan memiliki banyak relasi dengan berbagai kelompok masyarakat. Membangun relasi menurut pria kelahiran 12 Maret 1982, ia lakukan bukan lantaran ingin menjadi anggota dewan. Waktu itu, dirinya sama sekali tidak berniat untuk terjun di dunia politik apalagi untuk menjadi anggota dewan. Membangun relasi dari berbagai kalangan, ia lakukan karena manusia merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri melainkan harus saling berinteraksi dengan orang lain.



Adihan mengawali lembar kehidupan barunya di dunia politik ketika bergabung ke Partai Gerindra tahun 2010 dengan jabatan wakil ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Pinggir. Memilih Partai Gerindra sebagai nafas politiknya bukan karena ikut-ikutan, melainkan karena kekagumannya terhadap Prabowo, pendiri Partai Gerindra. Di mata Adihan, Prabowo tidak hanya sosok pekerja keras, melainkan memiliki komitmen yang tinggi dalam membela kebenaran serta tegas.

Berawal dari sinilah, kemudian pada tahun 2014 Adihan mencoba ikut meramaikan bursa pemilihan anggota legislatif dari daerah pemilihan Pinggir. Dirinya berpikir, kalau saja ia bisa duduk sebagai anggota dewan, maka akan banyak yang ia dapat lakukan untuk membantu masyarakat. "Saya banyak bergaul dengan masyarakat dari berbagai kalangan, jadi saya tahu persis keluhan-keluhan mereka dan apa yang mereka harapkan dari pemimpin negeri ini," kata Adihan.



Dengan keinginan itu, dirinya termotivasi untuk berusaha memenangkan pertarungan. Adihan mengakui, untuk bisa lolos sebagai anggota DPRD bukan hal mudah. Selain tidak memiliki kemampuan pendanaan yang memadai, saingannya sesama Dapil Pinggir juga tidak bisa diaggap enteng. Terlebih beberapa diantaranya merupakan anggota DPRD incumbent yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat dan tentunya secara finansial melebihi dirinya.

Untuk mewujudkan mimpinya itu, Adihan melakukan pendekatan ke semua kelompok masyarakat yang selama ini hubungan dengan mereka sudah cukup baik. Bagi dirinya tidak ada kata lelah untuk bisa mengejar mimpi. Sebagaimana kunci orang-orang sukses dari berbagai buku yang ia baca, sukses hanya bisa diraih oleh orang yang pantah menyerah.

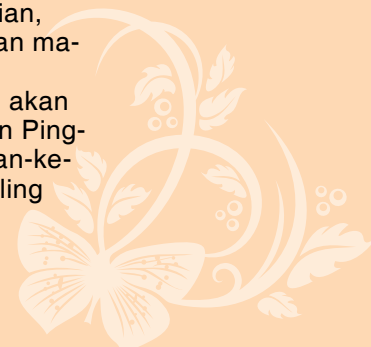
“Seperti Pak Rida K Liamsi, pemilik perusahaan media terkenal di Riau, pernah beberapa kali bertemu di suatu acara. Jika tak salah pada acara yang ditaja Chevron. Kalimat-kalimat yang saya ingat adalah bermimpilah setinggi langit, karena mimpi itu gratis. Berusahalah meraih mimpi itu. Sampai hari ini saya masih ingat kalimat tersebut, karena telah menjadi motivasi saya,” kata Adihan.

Siapa sangka, berkat kerja keras dan dukungan penuh dari keluarga serta kerabat, pada Pemilu Legislatif 2014, Adihan berhasil

meraih suara 2.947, terbesar kedua setelah anggota DPRD incumbent asal Golkar. Perolehan suara yang cukup signifikan itu mengantarkan Adihan sebagai anggota DPRD Bengkalis periode 2014 – 2019 Dapil Pinggir.

Saat ini, Adihan dipercaya untuk menjabat Ketua Komisi I DPRD Bengkalis. Namun demikian, sosok Adihan tetap tidak berubah. Dirinya tetap masih seperti dulu, aktif berkomunikasi dengan masyarakat dan mengakomodir saran serta masukan mereka, kapan dan dimana saja.

Adihan mengaku, setelah duduk di lembaga legislatif ini, dengan tekad bulat dan niat tulus akan berusaha memajukan daerah, terutama kampung halamannya di Balai Pungut dan Kecamatan Pinggir. “Di sana saya bisa berkembang, karena selalu bertatap muka dengan masyarakat. Keluhan-keluhan para guru menjadi kritikan berharga bagi saya, dunia pendidikan itu adalah hal yang paling penting dalam hidup,” ujar Adihan.***





BIODATA

NAMA : ADIHAN,SH
TEMPAT/TGL LAHIR : Balai Pungut, 12 Maret 1982
ALAMAT : Jalan Penghulu Tua RT 02, RW 01 Desa
Balai Pungut Kecatan Pinggir
JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 08527443311
ISTRI : Mey Adihan
ANAK : -
AYAH : H Suwiriman
IBU : Hj Netty Fitri
RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SD Negeri 037 Balai pungut
2. SMP Negeri 1 Mandau
3. SMU Negeri 2 Mandau
4. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

RIWAYAT PEKERJAAN : ● Tenaga Sukarela kantor Camat Pinggir (2004 - 2005)
● Honor Komite SMP Negeri 10 Pinggir (2005 - 2006)
Wiraswasta (2006)
● Dosen Luar Biasa AMIK Mitragama-Duri (2009-2014)
RIWAYAT ORGANISASI : ● Wakil Ketua PAC Partai Gerindra Pinggir
(2010-215)
● Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis
● Wakil Sekretaris Gabungan Pengusaha dan Kontraktor
Mandau (2012 – sekarang)
● Ketua PC Tidar Kabupaten Bengkalis
● Wakil Ketua Bidang UKM KNPI Bengkalis

NUR AZMI HASYIM, ST



Membangun Rupat yang Lebih Bermarwah



Nur Azmi Hasyim, ST, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2014- 2019 ini mengaku ingin terus membenahi Pulau Rupat dari sektor pariwisata bahari, memiliki potensi yang sangat luar biasa karena keelokan pantainya yang membentang di depan Selat Melaka.

Selain itu, mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Rupat itu juga bertekad membenahi Pulau Rupat dari 2 sektor, infrastruktur dan kesehatan yang mana menurutnya semua itu masih sangat kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah.

Hebatnya lagi, politisi muda Partai Demokrat ini memiliki tekad yang bulat untuk membangun Rupat yang lebih bermarwah sesuai selogannya BERBENAH (Bergerak Bersama Nur Azmi Hasyim menuju Pulau Rupat yang lebih bermarwah).

Diakui Nur Azmi, membawa perubahan menuju Pulau Rupat yang lebih terpadang, bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun dengan potensi yang ada di pulau Rupat, pria yang akrab disapa Emi ini yakin, suatu saat nanti Rupat menjadi sebuah daerah yang diperhitungkan.

"Salah satu yang mendorong saya untuk maju menjadi wakil rakyat adalah keinginan untuk memajukan Rupat agar lebih baik. Berbicara soal potensi, potensi yang sangat bagus itu mungkin pariwisata. Jika ini dikembangkan, selain menjadi ikon Kabupaten Bengkalis, juga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat Rupat," kata anggota DPRD Kabupaten Bengkalis peraih 4100 suara pada Pemilu Legislatif 2014.

Wisata Pantai Rupat memang sangat eksotis, pasir putih yang terbentang luas sepanjang pantai, menjadikan daerah ini sebagai tujuan kunjungan wisata bagi masyarakat Negeri Junjungan, meski fasilitas pendukungnya sejauh ini belum maksimal.

Menurut Emi, untuk memajukan dan mendukung pariwisata di Pulau Rupat, yang utama tentunya infrastruktur jalan. Barulah hal yang lainnya seperti penginapan dan sebagainya. "Saya rasa kalau infrastruktur bagus, Rupat bisa menjadi salah satu tempat wisata terbaik di Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau. Pembangunan jalan melalui program multiyears terus digesa Pemerintah Kabupaten



Bengkalis. Mudah-mudahan ke depan potensi yang ada ini bisa dimaksimalkan," harap Nur Azmi.

"Alhamdulillah, kita juga bersyukur Rupat sudah dialiri listrik. Berkat proyek multiyears, jalan penghubung Pulau Rupat sudah membaik dari sebelumnya, itu pastinya akan mendukung potensi yang ada," ujar politisi muda Demokrat ini.

Meski masih muda, tuturnya, bukan berarti dia tidak mampu menyuarakan keinginan rakyat Rupat yang sangat ia rasakan sekali. Rupat tidak boleh terisolasi meski berada sangat jauh dari pusat pemerintah. Anak-anak dan masyarakat Pulau Rupat tentunya memiliki hak yang sama seperti masyarakat Kabupaten Bengkalis lainnya.

Diakui anggota DPRD Kabupaten Bengkalis kelahiran Pangkalan Nyirih, 18 Januari 1985 ini, banyak sudah aspirasi masyarakat Rupat yang ia perjuangkan seperti hal koleganya di DPRD. Usulan masyarakat terkait jalan, pembangunan sekolah, sudah ada beberapa terealisasi meski belum maksimal.

"Walau kita masih muda, saya merasakan langsung bagaimana keadaan Rupat. Syukur, meski belum maksimal, sebagian besar aspirasi dan keinginan masyarakat, pengharapan dan kepercayaan masyarakat diberikan kepada saya, sudah ada yang terealisasi seperti jalan dan pembangunan lainnya," papar Emi.

Sebagai anggota DPRD Bengkalis, maju atas dorongan diri sendiri dan masyarakat, Nur Azmi dengan slogan BER-BENAH terus bertekad mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus mengupayakan bagaimana potensi dan infrastruktur Pulau Rupat bisa menjadi perhatian khusus.

Layak Dibangun RSUD

Kondisi Pulau Rupat yang sangat luas serta jangkauan masyarakat menuju sarana pelayanan kesehatan sangat jauh, maka sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Bengkalis membangun Rumah Sakit Umum Daerah di tengah-tengah Pulau Rupat.

"Alasannya, selama ini masyarakat kesulitan menjangkau sarana kesehatan. Untuk pengobatan yang tidak bisa ditangani Puskesmas, masyarakat Pulau Rupat harus ke Dumai yang jaraknya terbilang jauh," imbuh Nur Azmi Hasyim memberi alasan.

"Sudah saatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan ketersediaan sarana kesehatan maupun tenaga medis



tersedia di Rupert," tambahnya.

Secara pribadi Emi telah berbuat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Dapilnya dengan menyediakan satu unit ambulans untuk keperluan masyarakat Pulau Rupert. Ambulans dari dana pribadinya itu, disediakan lengkap dengan supirnya sekali untuk mengantar keperluan penanganan medis masyarakat bila sewaktu waktu diperlukan.

"Harapan kita selain sektor infrastruktur guna mendukung pariwisata harus diperhatikan, sektor kesehatan juga harus menjadi skala prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk Pulau Rupert," pinta pria asli Desa Pangkalan Nyirih ini. ***

BIODATA

NAMA : NUR AZMI HASYIM, ST
TEMPAT/TGL LAHIR : Pangkalan Nyirih,
18 Januari 1985
ALAMAT : Jalan Pramuka Gang Siaga
JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 0812 7606 734
ISTRI : Hj Wahyu Rahmi
ANAK : -
AYAH : Hasyim AR
IBU : Nurmah
RIWAYAT PENDIDIKAN :
1. SDN 022 Pangkalan nyirih (1997)
2. SLTP Negeri 2 Rupert (2000)
3. SMK Negeri 2 Dumai (2003)
4. Universitas Islam Riau (2008)
5. Pasca Sarjana Universitas Islam
Riau (sedang kuliah)
RIWAYAT PEKERJAAN :
1. Wiraswasta
2. Anggota DPRD Bengkalis
(2014-2019)
RIWAYAT ORGANISASI :
1. Ketua Karang Taruna
Desa Pangkalan Nyirih (2011-2014)
2. Ketua Komite Nasional
Pemuda Indonesia
Kecamatan Rupert (2011-2014)
3. Ketua PAC Partai Demokrat Rupert
(2012-2017)
4. Wakil Bendahara Persatuan Sepak
Takraw Indonesia Kabupaten
Bengkalis



RISMAYENI, SPd, MSc



Berjuang Bersama Buruh



Tidak banyak incumbent yang bisa menjadi “juara bertahan” pada Pemilu Legislatif 2014, tercatat hanya ada 13 orang. Dari 13 orang tersebut, salah satunya adalah Rismayeni, SPd, MSc. Pada Pemilihan Caleg tanggal 9 April 2014 lalu, Rismayeni berada pada nomor urut 2. Dari 11 orang Caleg mewakili Partai Demokrat, dirinya mendapatkan suara terbanyak pertama sekaligus satu-satunya wakil dari Partai Demokrat dari Dapil Mandau A.

“Ini semua tidak terlepas dari usaha dan kerja keras suami saya. Beliau Ketua DPAC Demokrat Kecamatan Mandau. Dengan solidaritas dan kesosialan yang tinggi yang kami miliki berdua, maka tidak begitu susah untuk meyakinkan masyarakat supaya bisa mengamanahkan kembali untuk memilih saya menjadi wakilnya di parlemen,” ujar Rismayeni seraya menambahkan dari 5 anggota DPRD Bengkalis periode 2009–2014 dari Partai Demokrat, hanya ia satu-satunya incumbent yang berhasil meraih kursi DPRD Kabupaten Bengkalis untuk periode kedua.

Keberhasilannya kembali duduk sebagai wakil rakyat merupakan buah dari keseriusannya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selama lima tahun ia menjadi anggota dewan (periode 2009–2014), sudah banyak yang ia lakukan di mitra kerja Komisi IV, khususnya di dunia pendidikan.

“Karena salah satu tujuan saya duduk di legislatif adalah memang untuk memperjuangkan nasib para guru. Sebelum duduk di dewan, saya adalah seorang guru, jadi saya tahu persis bagaimana kondisi guru dan apa persoalan yang mereka hadapi,” ujar Rismayeni.

Sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menjadikan Bengkalis sebagai kota pendidikan, maka salah satu faktor yang perlu dibenahi adalah guru. Dalam pendidikan atau mendidik, guru tidak hanya sebatas mentransfer ilmu. Namun lebih jauh dari itu, dapat mengubah atau membentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun estetika maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karakter anak didik inilah yang akan menentukan karakter bangsa. Karena itu, pada saat menjadi anggota dewan pada periode 2004 – 2019, Rismayeni terus berjuang memperhatikan nasib guru, terutama bagaimana kesejahteraan mereka bisa meningkat.



“Kalau yang honor, kita perjuangkan bagaimana honor mereka tidak terlambat dan ditingkatkan. Sementara bagi para guru yang sudah PNS, kita perjuangkan bagaimana insentif yang bersumber dari APBD bisa ditingkatkan. Kita juga mendorong para guru untuk ikut sertifikasi, karena dengan sertifikasi, guru akan mendapatkan tambahan penghasilan yang bersumber dari APBN,” katanya.

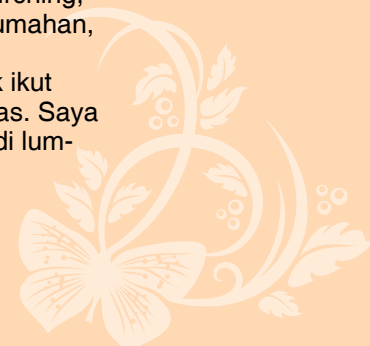
“Bantig Stir”

Pada periode kedua ini (2014 – 2019), Rismayeni “banting stir” tidak lagi duduk di Komisi IV, tapi di Komisi I. Di komisi yang membidangi masalah pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, komunikasi dan hukum dan perundang-undangan, kepegawaian dan aparatur. Kemudian perizinan, sosial politik, organisasi masyarakat, hubungan luar negeri dan pertanahan, catatan sipil, kependudukan dan ketenagakerjaan, perhubungan dan informatika.

Keputusannya untuk bergabung di Komisi I bukan berarti ia tidak lagi peduli terhadap guru. Sebagai wakil rakyat, dirinya tetap akan menampung aspirasi masyarakat, termasuk guru. Namun, Rismayeni tidak bisa mengingkari kata hatinya, bahwa nasib para buruh dan karyawan perusahaan yang bekerja di Kabupaten Bengkalis, terutama di Mandau, sangat memprihatinkan. “Bisa saya katakan, mereka ini menjadi budak di negeri sendiri,” ujarnya.

Di Kabupaten Bengkalis, Rismayeni mengatakan, ada perusahaan besar internasional yang merupakan aset vital di Kabupaten Bengkalis, yaitu PT CPI dengan anak perusahaannya yang tidak sedikit. Namun, kesejahteraan para buruh belum berpihak kepada mereka, bahkan bisa dikatakan, mereka bekerja tanpa ada jaminan yang pasti. Mulai dari kontrak kerja dengan sistem outsourcing, BPJS (jaminan kesehatan), tunjangan perumahan, upah, overtime dan lain-lain.

“Di sini menuntut hati nurani saya untuk ikut berjuang bersama para buruh yang tertindas. Saya tidak mau mereka ibarat anak ayam mati di lum-





bung padi,” katanya.

Rismayeni ingin di jabatan yang kedua ini, ia bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk para buruh dan karyawan di negeri Petro Dollar ini. Bersama dengan kawan-kawan di Komisi I, ia akan ikut mentertibkan perusahaan yang mengambil keuntungan dari tanah Kabupaten Bengkalis. Penertiban akan dilakukan dari semua aspek, baik dari segi pengelolaan limbah, izin-izin, ketenagakerjaan serta kontribusinya terhadap PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Bengkalis.

“Tentu saja Pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja. Harus ada tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan Migas ini. Mudah-mudahan saya bisa mensejahterakan dan membuat produk-produk hukum daerah yang berpihak kepada para buruh,” harap Rismayeni.

Menyinggung tentang rencana jangka panjang, istri dari Suryadi, SH ini mengatakan, ke depan ia akan maju lagi pada Pemilihan Legislatif 2019. Namun, tidak lagi di DPRD Bengkalis, melainkan untuk anggota DPRD Riau, supaya bisa memperjuangkan para guru dan buruh tidak hanya di Kabupaten Bengkalis saja, tapi juga di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. ***



BIODATA

NAMA : Rismayeni, SPd, MSc
 TEMPAT/TGL LAHIR : Batu Sangkar, 28 Desember 1977
 ALAMAT : Jalan Jawa Gg Cempaka No 77 Duri,
 Kecamatan Mandau
 JENIS KELAMIN : Perempuan
 AGAMA : Islam
 NO TELP/HP : 08127666240
 SUAMI : Suryadi, SH
 ANAK : Khanza Suryani (Kelas 6 SD)
 Dewa Surya Kencana (TK)
 AYAH : Nazaruddin Muncang (ayah)
 IBU : Solfina
 RIWAYAT PENDIDIKAN : SDN 1 Batusangkar (1998)
 SMPN 1 Batusangkar (1993)
 SMAN 1 Batusangkar (1996)
 S1-UNP Padang (2000)
 S-2 Universitas Kebangsaan Malaysia

RIWAYAT PEKERJAAN : 1. Guru SMA Cendana Caltex Duri
 (2000 - 2009)
 2. Anggota DPRD Bengkalis
 (2009 – 2014)
 3. Anggota DPRD Bengkalis
 (2014 – 2019)
 RIWAYAT ORGANISASI: : 1. Sekretaris DPAC Mandau
 (2009 - 2011)
 2. Wakil Ketua I DPC Kab. Bengkalis
 (2011 – 2016)
 3. Ketua Perempuan Demokrat RI Kab
 Bengkalis

SOFYAN, SPdI



Butuh Kerja Keras Tuntaskan Persoalan Infrastruktur

Kepiawaian berpolitik dan pola pikir solutif membuat anak jati Teluk Pambang Kecamatan Bantan ini semakin diperhitungkan. Walau sudah dijangka sebagian kalangan tapi tak sedikit pula yang meragukan, Sofyan, SPdI seperti mendobrak mitos saat keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak di Dapil Bengkalis-Bantan pada Pemilu Legislatif 2014.

Mendobrak mitos, bisa saja disebut seperti itu. Tengok saja, kata sebagian pendapat, mereka yang berani bertarung di Dapil Bengkalis-Bantan adalah para petarung sejati, karena di arena itu sudah dihuni para suhu politik tangguh yang sudah mendulang nama dan hebat-hebat pula. Sofyan menyadari kondisi itu, tapi tidak pula membuat dirinya mengatur langkah seribu. Berbekal pengalaman dan pendekatan yang dilakukan bertahun-tahun sebelumnya, suami Faizah M Taslim ini akhirnya keluar dari arena sekaligus menjadi juaranya.

Duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis priode 2014-2019 memang bukan julung-julung kalinya bagi Sofyan. Anak almarhum Pandukung ini sebelumnya sudah pernah duduk menjadi anggota dewan pada priode 2009-2014. Hanya memang bendera yang dikibarkan kala itu berbeda dengan yang dibawanya saat ini. Dulu Sofyan mengibarkan panji PPNUI, sekarang alur politik membawanya ke perahu yang lebih besar bernama PDI Perjuangan.

Bendera memang boleh berbeda, tapi komitmen dan semangat mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Riau ini tak pernah luntur bahkan semakin menggebu. Keinginan memberikan yang terbaik untuk daerahnya berlatar masih banyaknya persoalan yang masih terjadi di tengah masyarakat, terutama penuntasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan dan kesehatan.

Target Infrastruktur

Pengalaman menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada periode pertama (2009-2014), membuat Sofyan semakin termotivasi untuk terus berbuat bagi daerah ini, mengingat Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkalis- Bantan, termasuk daerah yang masih tertinggal terutama daerah desa-desa.

Diakui, masih banyak desa-desa yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Mulai dari ujung timur Desa Teluk Lancar, Kembung Luar, Teluk Pambang, Muntai, terus menuju Desa Bantan Air, Bantan

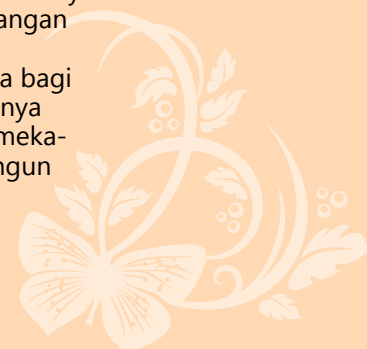


Tengah, Jangkang, Bantan Tua. Begitu juga desa-desa yang ada di Kecamatan Bengkalis, mulai dari Seko-di, Kelemantan, Ketamputih, Pematang Duku, Penebal hingga sampai ujung barat, Desa Meskom.

"Untuk infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik memang sudah terbangun, tapi masih butuh perbaikan," aku Sofyan.

Walaupun pekerjaan ini butuh waktu panjang dan perjuangan berat, namun tidak menyurutkan dirinya untuk terus berbuat. Di periode kedua ini, dengan keyakinan hati untuk terus berbuat, memperjuangkan infrastruktur dasar seperti penuntasan jalan poros lingkaran Bengkalis-Bantan.

Proyek multiyears yang sudah berjalan beberapa tahun lalu kata Sofyan, menjadi kabar gembira bagi penuntasan persoalan infrastruktur jalan poros Bengkalis-Bantan. Sayangnya program tersebut hanya menyentuh beberapa desa di Kecamatan Bengkalis dan hanya sekitar 6 KM di Desa Suka Maju pemekaran Desa Teluk Pambang Bantan. Untuk sebagian besar jalan poros di Pulau Bengkalis, tetap dibangun



dengan sistem reguler.

Sementara penyediaan sarana air bersih, juga tidak bisa diabaikan kata Sofyan. Baru sebagian masyarakat Bengkalis yang menikmati air bening PDAM, sebagian yang lain belum merasakan, bahkan terpaksa menggunakan air asin untuk mandi dan mencuci di saat musim kemarau tiba.

Sedangkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui revitalisasi pertanian dan perkebunan, juga menjadi target dirinya. Karena kata pengagum Bung Karno ini, sektor pertanian dan perkebunan menjadi andalan sebagian besar masyarakat Kecamatan Bantan maupun Bengkalis. Kalau program revitalisasi ini berjalan dengan baik, dirinya yakin tingkat ekonomi masyarakat juga akan semakin baik.

"Yang tidak kalah penting harapan saya adalah peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan. Saya menginginkan pelayanan bidang kesehatan harus benar-benar prima, karena dengan kesehatan masyarakat akan lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari dan menjalankan pekerjaan dengan mudah. Kemudian bidang pendidikan juga menjadi sangat penting, daerah maju akan tergantung kepada sumber daya manusianya. Sebagai anak jati Bengkalis saya memiliki mimpi besar untuk melihat kemajuan daerah ini," tuturnya.

Berbicara persoalan dan kekurangan di bidang pendidikan dan kesehatan, Sofyan memang bukan omdo alias omong doang. Sekitar dua tahun dirinya menjabat Ketua Komisi 4, yang diantara bidang kerjanya adalah pendidikan dan kesehatan, sehingga membuat dirinya begitu lunak bila berargumentasi dua bidang tersebut.

Mengapa PDI Perjuangan

Ketika aturan perundangan mendepak partai tempat dirinya bernaung (PPNUI) dari helat Pemilu Legislatif 2014, Sofyan harus kembali menentukan pilihan, ke partai mana dirinya akan bersandar. Sempat disebut-sebut bakal menambatkan diri ke Partai Golkar, akhirnya dengan tekad dan keyakinan penuh mantan guru MTS dan MDA ini berlabuh di PDI Perjuangan.

"Alhamdulillah berkat dukungan masyarakat saya terpilih kembali menjadi anggota DPRD untuk kedua kalinya, sekaligus meraih suara terbanyak dari seluruh calon legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu-Bantan. Ini menjadi pemicu semangat saya untuk lebih meningkatkan peran di DPRD untuk pengambil kebijakan melalui lobi-lobi dengan eksekutif," sebut Sofyan.

Di PDI Perjuangan kata Sofyan, dirinya merasa lebih tertantang karna di partai besar anggota Komisi II DPRD Bengkulu periode 2014-2019 ini, harus melakukan komunikasi lebih luas dengan semua lini. Mulai dari masyarakat kecil sampai kepada elit-elit politik di tingkat pusat. Banyak hal diambil dari perjalanan awal di PDIP ini, mulai dari sikap mengambil keputusan sampai kepada penguasaan pemahaman tentang politik itu sendiri.

Diakui, dirinya menjadi lebih dewasa dan lebih memiliki wawasan ketika berada di partai besutan Megawati Sukarno Putri ini. "Banyak yang bertanya mengapa harus memilih PDIP, pada hal banyak partai lain yang mengajak saya untuk bergabung. Jawaban saya sederhana, karena saya tertarik dengan semangat PDIP untuk konsisten berjuang membela masyarakat. Dan ini sesuai dengan semboyan partai PDIP membela wong cilik," aku Sofyan.

Disamping itu juga banyak dorongan dari arus bawah untuk bergabung dengan PDIP. Semangat dari arus bawah ini pulalah yang membuat dirinya semakin yakin untuk membesarkan PDIP di daerah Bengkulu ini. Apatah lagi, saat ini dirinya dipercaya memegang posisi startegis di Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bengkulu, yakni menjadi Bendahara.

"Amanah ini akan saya emban dengan sebaik-baiknya untuk mengabdikan diri di tengah masyarakat dan partai PDI Perjuangan," tegas Sofyan..***

BIODATA

NAMA : SOFYAN, SPdI
TEMPAT/TGL LAHIR : Teluk Pambang, 28 September 1977
ALAMAT : Jalan Jambu Raya RT 01 RW 11 Desa Berancah
JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 081266354551
ISTRI : Faizah M Taslim
ANAK : Dua Orang
 1. Nayla Shofia
 2. Muhammad Farhi Asna
AYAH : Pandukung bin Sulaiman (Alm)
IBU : Mariyah Binti Sairi
RIWAYAT PENDIDIKAN :
 1. SD 076 Teluk Pambang (1984-1990)
 2. MDA Tarbiyah Islamiyah Teluk Pambang (1985-1990)
 3. MTS Al- Khairiyah Teluk Pambang (1990-1993)
 4. Pondok Modern Nurul Hidayah Batan Tua (1993-1997)
 5. MA Darul Ulum Bantan (1993-1996)
 6. S1 Pendidikan Agama Islam STAI Bengkalis (2003-2007)
 7. Program Pasca Sarjana UR Ilmu Politik
RIWAYAT PEKERJAAN :
 ● Guru Pondok Modern Nurul Hidayah Bantan (1997-1998)
 ● Guru MTS Al-Khairiyah Teluk Pambang (2000-2002)
 ● Guru MA Al-Hidayah Teluk Pambang (2000-2003)
 ● Kepala MDA Nurul Huda Teluk Pambang (1999-2006)
 ● Guru MDA Tarbiyatussibyan Selatbaru (2004-2005)
 ● Guru Honor di SDN 06 Bantan Tengah (2005-2008)
 ● Anggota DPRD Bengkalis (2009-2014)
 ● Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)
RIWAYAT ORGANISASI :
 - Ketua Pelajar Pondok Modern Nurul Hidayah (1994-1996)
 - Ketua Pemuda Banan Teluk Pambang (1998-2002)
 - Pengurus Sepak bola Banan (1998-2002)
 - Sekretaris PAC PKB Kec. Bantan (1999-2002) - Ketua PAC PKB Kec. Bantan (2002-2005)
 - Ketua Bapilu PKB kabupaten Bengkalis Tahun 2004
 - Sekretaris DPC PKB Kab. Bengkalis (2006-2008)
 - Wakil Ketua GP Ansor Kab. Bengkalis (2009-2012)
 - Sekretaris Ikatan Keluarga Jawa Kec. Bantan (2007-2010)
 - Wakil Sekretaris DPD KNPI Kab. Bengkalis (2008-2010)
 - Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Himmah (2007-2010) - Pengurus ICMI Orda Bengkalis (2008-sekarang)
 - Ketua DPC PPNUI Kabupaten Bengkalis (2009-2012).
 - Wakil Ketua Himpunan Alumni Pondok Pesantren (2008-sekarang)
 - Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kab. Bengkalis (2010-sekarang)
 - Wakil Ketua Wadah Silaturrahmi Alumni Nurul Hidayah (wasilah) 2011-sekarang
 - Pengurus harian KONI Kec. Bantan (2011-2013)
 - Bendahara PDC PDIP Kabupaten Bengkalis
 - Panitia Percepatan Penegerian Perguruan Tinggi - STAI menjadi STAIN - Akademi Komunitas - Politeknik Negeri Bengkalis
 - Pengurus Dewan Pendidikan Bengkalis



dr H FIDEL FUADI



Lebih Fokus Perjuangkan Aspirasi Masyarakat



Terpilih kembali menjadi anggota DPRD Bengkalis untuk periode 2014– 2019 merupakan tantangan tersendiri bagi pemilik nama lengkap dr H Fidel Fuadi. Bagaimana tidak, di tengah kompetisi pemilihan anggota legislatif 2014 yang sangat ketat, khususnya di Daerah Pemilihan Mandau, dirinya kembali dipercaya masyarakat untuk melanjutkan jabatan sebagai wakil rakyat.

Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin maju, pria bergelar Datuk Majo Basa ini yakin dan percaya, bahwa masyarakat tidak asal pilih untuk mengantarkan wakil-wakil mereka menuju rumah rakyat. "Alhamdulillah, masyarakat masih mempercayai saya sebagai wakil mereka di DPRD Bengkalis. Tentu saja, kepercayaan yang telah mereka berikan akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujar pria yang biasa disapa Datuk ini.

Berdasarkan data KPU Bengkalis, pada Pemilihan Legislatif 2014, untuk daerah pemilihan Bengkalis 4 (Kecamatan Mandau A), Partai PKS berhasil mendudukkan dua kader mereka sebagai anggota DPRD. Pertama, Abi Bahrum dengan perolehan suara 1.629 suara dan kedua Fidel Fuadi dengan perolehan suara 1.478 suara.

Pria asli Minangkabau yang sudah cukup lama bermukim di Kota Duri ini, pertama kali duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 melalui hasil rasionalisasi, dimana ada kekosongan tujuh kursi di lembaga wakil rakyat pasca pemberlakuan rasionalisasi. Masa itu, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand) ini bergabung dengan Komisi IV DPRD Bengkalis yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat (Kesra), cocok dengan apa yang diperjuangkannya selama ini, termasuk di dalamnya masalah pendidikan dan kesehatan.

Berbekal pengalamannya itu, Fidel mengaku, dirinya akan lebih fokus lagi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Berbeda dengan periode sebelumnya dimana Ia duduk di Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat. Pada periode ini, Fidel fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berkait dengan ekonomi pembangunan di Komisi II.





"Namun demikian, bukan berarti kita tidak peduli dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Apa saja persoalan, baik itu pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi konsen untuk diselesaikan," kata Fidel.

Ia terjun ke dunia politik didasarkan atas kegalauan melihat kondisi masyarakat bengkalis yang masih jauh diharapkan, dimana selama ini tidak ada sarana untuk menyalurkannya. kemudian ia merasa cocok untuk bergabung dengan PKS sebagai kendaraan politiknya. Walaupun gejolak di dalam hati menguatkan tekadnya maju menjadi calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2009 lalu. Berbekal rasionalisasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis pasca pemulangan anggota DPRD asal Meranti, dirinyapun mendapat jatah satu dari tujuh kursi untuk mengisi kekosongan, dan hal itu jelas bukan suatu kebetulan atau istilahnya mendapat durian runtuh, tapi karena perolehan suaranya sendiri lumayan besar pada Pemilu 2009 itu. Begitu memasuki lembaga legislatif ia mulai menunjukkan aksinya, dengan mencoba berpihak kepada rakyat di bidang pendidikan dan kesehatan.

Menyibak kembali ke belakang tentang evaluasi bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bengkalis, Fidel mengatakan, masih banyak hal yang harus dibenahi. Ketika dirinya berada di Komisi II periode sebelumnya, berbagai masukan telah ia sampaikan terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan. Seperti bidang pendidikan, Komisi IV saat itu begitu antusias mendorong Bupati Bengkalis dalam mewujudkan Bengkalis sebagai Kota Pendidikan. Pihaknya kala itu sempat prihatin, di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan Bengkalis sebagai Kota Pendidikan, malah hasil Ujian Nasional (UN) lulusan SMP dan SMA terjun bebas. Hal itu membuat peringkat Kabupaten Bengkalis berada di papan bawah dari kabupaten/kota yang ada di Riau.

"Saya sempat bertanya-tanya, kok bisa peringkat hasil UN anak didik kita anjlok. Padahal, kita di Komisi IV selalu mensupport Dinas Pendidikan, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan lain," kenang Fidel seraya berharap ke depan Dinas Pendidikan benar-benar fokus dan serius dalam mewujudkan Bengkalis sebagai Kota Pendidikan.

Sementara di bidang kesehatan, Fidel menilai persoalan-persoalan klise di RSUD masih saja terjadi. Bukan saja persoalan kualitas pelayanan yang perlu ditingkatkan, yang lebih miris lagi adalah kekurangan tenaga medis baik RSUD Bengkalis maupun RSUD Mandau. Menurutnya, kalau tenaga SDM tidak ditambah, pelayanan prima di RSUD akan sulit dicapai. Apalagi setelah BPJS Kesehatan diterapkan, maka beban pelayanan yang diemban RSUD kian bertambah.

Kalau kekurangan tenaga medis ini tidak cepat disikapi pihak terkait di jajaran Pemkab Bengkalis, dikhawatirkan mutu pelayanan di RSUD bakal menurun. "Jalan keluarnya harus ada. Kita minta Pemkab melalui BKD untuk segera mencari solusi," katanya.

Percepat Pembangunan Infrastruktur

Menyorot tentang pembangunan infrastruktur, khususnya di Kota Duri, Fidel menilai memperhatikan laju pertumbuhan di Mandau dalam beberapa tahun terakhir, diperkirakan, empat atau lima tahun ke depan populasi penduduk di Kecamatan Mandau akan meningkat begitu pesat. Bakal bertambahnya penduduk di Mandau, ini tentu harus didukung oleh berbagai fasilitas dan keterseediaan infrastruktur. Tanpa diimbangi dukungan itu, berbagai persoalan yang terjadi saat ini menjadi semakin rumit. Apalagi Kota Duri sebagai ibukota kecamatan merupakan jalur lintas Sumatera yang sangat padat.

Salah satu fokus pembangunan yang saat ini terus digesa oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, adalah pembangunan Jalan Lintas Timur dan Lintas Barat Kota Duri. Pembangunan kedua ruas jalan lingkaran yang dibangun melalui kegiatan tahun jamak (multiyears) tersebut, seharusnya sudah selesai

karena tahun 2015 merupakan tahun terakhir proyek tersebut.

Menurut Fidel, selain untuk mempercepat peningkatan keberhasilan pembangunan ekonomi di Mandau, pembangunan kedua ruas jalan itu juga untuk mengurai kemacetan yang selama ini setiap hari terjadi di Kota Duri, terutama di Jalan Hang Tuah.

"Harapan kita proyek tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karena masih banyak lagi infrastruktur di Kecamatan Mandau yang harus benahi dan itu semua membutuhkan anggaran yang tidak sedikit," ujarnya.***

BIODATA

NAMA	:	dr H Fidel Fuadi Datuk Majo Basa
TEMPAT/TGL LAHIR	:	Batu Sangkar, 31 Maret 1963
ALAMAT	:	Duri
JENIS KELAMIN	:	Laki-laki
AGAMA	:	Islam
NO.TELP/HP	:	-
ISTRI	:	Ir. Adriati
ANAK	:	Permata Hanifa
AYAH	:	H Syofyan Dt Majo Dirajo (alm)
IBU	:	Hj Syamsinar
RIWAYAT PENDIDIKAN	:	a. Sekolah Dasar Negeri Batusangkar b. Sekolah Menengah Pertama Negeri di Batusangkar c. Sekolah Menengah Atas Negeri Bantusangkar d. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang
RIWAYAT ORGANISASI	:	1. Penasehat Bulan Sabit Merah (BSMI) Cabang Bengkulu 2. Ketua IKKPS Mandau 3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bengkulu (2011-2013) 4. Ketua Persatuan Tenaga Kesehatan Kabupaten Bengkulu 5. Ketua Fraksi PKS di DPRD Bengkulu Priode 2011-2014



H ZAMZAMI, SH



Mengabdikan untuk Masyarakat

Bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus menjadi perahu untuk bisa duduk di DPRD adalah hal yang saya impikan. Karena sumbangsih partai berlambang matahari itu sangat mendukung dan terus mendorong semangat saya untuk meluruskan niat berbuat untuk masyarakat.

Begitu penggalan pembuka yang disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2014- 2019 daerah pemilihan Bengkalis-Bantan ini mengawali wawancaranya dengan tim penulis. Tekad untuk terus menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terlebih di sektor pembangunan infrastruktur di negeri junjungan ini merupakan tujuan utama yang tidak bisa tawar-tawar lagi.

"Saya duduk di dewan ini berkat dukungan dari rakyat. Jadi, tekad saya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan Bengkalis yang lebih baik," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN), H Zam Zami, SH.

Zam Zami yang duduk di Komisi II yang membidangi masalah pembangunan dan kesejahteraan, melihat dari sisi infrastruktur seperti jalan di Kabupaten Bengkalis, memang belum sepenuhnya maksimal. Dirinya telah bertekad bersama kawan-kawan di eksekutif maupun legislatif membangun Bengkalis ke depan lebih.

Dalam proses pembangunan yang dilakukan pemerintah, sebagai wakil rakyat, Zamzami menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar apapun program pemerintah untuk rakyat bisa berjalan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

"Sebagai legislatif yang memiliki hak pengawasan, tentunya kita meminta pemerintah itu bekerja secara sungguh-sungguh. Membangun seperti apa yang diharapkan masyarakat, terlebih hal yang langsung berkenaan dengan peningkatan perekonomian masyarakat," ujar pria kelahiran 23 September 1954 ini.

Menurut pensiunan pegawai negeri sipil Dirjen Perhubungan ini, di era kepemimpinan Bupati





Herliyan Saleh-Suayatno banyak sekali program pembangunan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. "Misalnya, program Inbup PPIP dan UED SP, kita sangat apresiasi itu. Pembangunan yang diinginkan masyarakat seperti membangun gang-gang dan sebagainya, yang selama ini tidak pernah tersentuh, jadi terwujud," ungkap ayah empat anak ini.

Seperti halnya dengan koleganya sesama anggota DPRD lain yang duduk berkat dukungan masyarakat di kursi terhormat DPRD, aspirasi dari masyarakat sebagian besar sudah ia perjuangkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan. Aspirasi itu diperjuangkan sebagaimana yang ia dapatkan disaat melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihan memanfaatkan reses.

"Berhasil memperjuangkan yang diinginkan masyarakat, merupakan kemenangan moral bagi diri saya. Bagaimana dalam rentang waktu yang pendek ini, saya harus mampu memberikan nilai tambah tersendiri bagi diri saya dan orang banyak," ujar pria yang pernah beberapa kali menjabat sebagai kepala Syahbandar di beberapa daerah.

Dorongan Diri

Selama 30 tahun menjadi abdi negara sebagai pegawai negeri di Dirjen Perhubungan, tidak membuat ayah empat anak ini berhenti untuk memberikan sisa tenaganya mengabdikan untuk negeri ini. Berkat keyakinan dan niat serta didukung penuh pihak keluarga, Zam Zami membeberanikan diri untuk ikut maju pada Pemilihan Legislatif 2014 dari Dapil Kecamatan Bengkalis dan Bantan.

Berawal dari niat baik, untuk berjuang dengan masyarakat melalui wadah yang pas, pria kelahiran 1954 itu akhirnya diberikan amanah oleh masyarakat untuk duduk di kursi terhormat sebagai wakil rakyat. "Alhamdulillah, niat baik untuk mengabdikan kepada masyarakat berujung baik. Saya dipercaya masyarakat untuk duduk sebagai wakilnya di DPRD Kabupaten Bengkalis," tuturnya.

Menurutnya, bergabung bersama Partai Amanat Nasional (PAN) didorong pada niat dan semangatnya untuk berbuat kepada masyarakat. Di PAN, Zam Zami dipercaya menjadi bendahara, ini tentu tidak terlepas dari melihat kiprahnya yang mampu memberikan nilai tambah bagi partai.

"Saya lahir bukan dari basis orang politik, berpolitik masih sangat baru bagi saya. Tetapi itu bukanlah menjadi alat ukur, partai yang mendukung saya punya niat besar membangun tanah kelahiran saya, sama dengan niat besar saya mengabdikan untuk negeri dan masyarakat," tegasnya. ***

BIODATA

Nama : H Zamzami, SH
 Tempat/Tgl Lahir : Bengkalis, 23 September 1954
 Alamat : Jalan Al Muslihun, Bengkalis
 Jenis Kelamin : Laki laki
 Agama : Islam
 Istri : Meninggal dunia
 Anak : Empat orang
 1. Muhammad Fikri
 2. Rudi Harmi
 3. Herlina Harmi
 4. Sri Rahmadani
 Ayah : H Usman, HM
 Ibu : Hj Rogayah
 Riwayat Pendidikan : 1 SDN di Bengkalis
 2 SMPN di Bengkalis
 3 SMA di Pekanbaru
 4 Sarjana di Pekanbaru
 Riwayat Pekerjaan : 1. Kepala Syahbandar Bengkalis
 2. Kepala Syahbandar Selat Panjang
 3. Kepala Syahbandar Tanjung Batu Kundur
 4 . Kepala Syahbandar Pekanbaru
 Riwayat Organisasi: 1. Sekretaris DPA INSA Pekanbaru
 2. Ketua DPA INSA Pekanbaru
 3. Bendahara DPA Partai Amanat Nasional
 Bengkalis.
 4. Pengurus Majelis Ulama Bengkalis



MISRAN HAMID



Masyarakat Butuh Jalan Pasarkan Komoditas Pertanian



Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini dalam struktur keanggotaan di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2014-2019, dipercayai menjadi Ketua Fraksi PDIP Restorasi DPRD Kabupaten Bengkalis.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di priode sebelumnya, Misran Hamid mengaku telah berupaya memperjuangkan sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat, terutama aspirasi yang menyangkut langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. "Alhamdulillah, sudah banyak diantara aspirasi yang kita perjuangkan itu ditindaklanjuti sebagai-mana mestinya," kata Misran.

Sama dengan sebagian besar kabupaten di Provinsi Riau, menurut Misran, jenis aspirasi yang sering ia terima, termasuk yang didapat ketika kunjungan kerja ke daerah pemilihannya adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, masalah pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Misran menunjukkan salah satu contoh, yaitu jalan gang yang sering diaspirasikan masyarakat kepadanya. Dikatakan Misran, perlunya jalan gang atau jalan lingkungan dibangun, selain memudahkan masyarakat melakukan interaksi sosial dengan masyarakat kawasan terdekat, keberadaan jalan gang juga dirasa sangat membantu masyarakat untuk memasarkan barang atau komoditas pertanian yang dihasilkan.

"Kan kasihan masyarakat. Sudah susah-susah mengelola jenis usaha tertentu, tapi begitu dipasarkan tidak mendapatkan harga jual yang layak karena mesti diperhitungkan dengan upah angkut yang tinggi," sebutnya.

Satu-satunya solusi untuk keluar dari persoalan seperti itu adalah membangun jalan yang dibutuhkan, yang memungkinkan masyarakat gampang mencapai pusat pemasaran terdekat. Secara garis besar, Misran menilai proses pembangunan di Kabupaten Bengkalis selama ini sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan sebagian hasilnya sudah bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yang terasa masih menjadi ganjalan bagi Misran yaitu belum terjadinya pemerataan pembangunan, sehingga belum semua kawasan dan elemen masyarakat bisa menikmatinya.



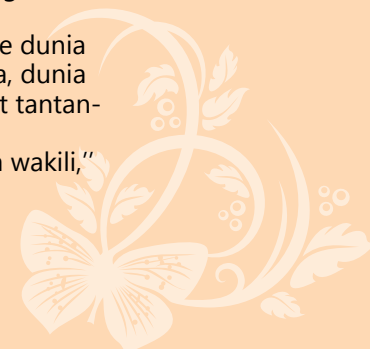
“Hal-hal seperti itulah yang dengan konsisten dan didukung komitmen tinggi akan kita perjuangkan ke depan,” sambung anggota DPRD Bengkalis dua priode ini.

Dalam konsep berpikir seorang Misran, semua kawasan dan seluruh elemen masyarakat di Kabupten Bengkalis harus ikut menikmati berkah pembangunan secara proporsioal. Ketimbang dana alokasi pembangunan, katanya, hanya akan menyulut munculnya disharmonisasi di antara kawasan dan masyarakatnya.

Dikatan bapak tiga anak ini, dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat untuk priode kedua ini, ia bersama para koleganya di DPRD jelas memiliki kompetensi untuk mengontrol perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemkab Bengkalis bersama jajarannya. Kapasitas dan kompetensi itulah yang akan dimanfaatkan Misran secara maksimal sehingga semua kawasan dan seluruh elemen masyarakat di daerah ini ikut menikmati hasil dari program dan proses pembangunan di Kabupaten Bengkalis, terutama terhadap program-program yang akan dilakukan ke depan.

Misran juga berkisah soal latar belakang ia terjun di dunia politik. Dikatakan Misran, ia terjun ke dunia politik praktis bukan karena ikut-ikutan, tapi lantaran menyenangi dunia ini. Dalam pandangannya, dunia politik mempunyai keasyikan tersendiri untuk digeluti. Selain itu, dunia politik juga memiliki bobot tantangan yang lebih besar dibandingkan bidang-bidang lainnya.

“Apalagi setelah terpilih menjadi anggota dewan, sekian banyak anggota masyarakat yang kita wakili,”





uar suami dari Siti Hawa yang telah memberinya tiga orang anak ini.

Kenapa memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai kendaraan politik? Menurut Misran, ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena kekagumannya pada sosok pendiri partai ini, Megawati Soekarno Puteri. "Saya melihat Bu Mega itu titisan mendiang bapaknya, Bung Karno," ujarnya. Termasuk prinsip perjuangan Megawati, juga meneruskan apa-apa yang telah dirintis oleh sang ayahandanya.

Bersaing Ketat

Misran berhasil duduk di DPRD Kabupaten Bengkalis dua priode di bawah panji-panji PDIP setelah bersaing ketat dengan sejumlah calon anggota legislatif lainnya yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Siak Kecil dan Bukit Batu.

Mungkin tidak banyak yang menyangka kalau Misran bisa mendapatkan suara yang cukup signifikan di kedua kecamatan itu, yang memungkinkan dirinya melengang untuk menduduki satu kursi di DPRD Kabupaten Bengkalis untuk kedua kalinya. Masalahnya, karena sejak dilahirkan, besar dan beraktivitas, suami Siti Hawa ini lebih banyak di Kota Bengkalis. Bahkan tempat tinggalnya pun di kota itu, tempatnya di Jalan Pramuka, Desa Senggoro.

Tapi nasib manusia sepenuhnya menjadi hak prerogratif sang pencipta. Di tengah pasimisme banyak pihak, Misran mampu membuktikan kepiawaiannya dalam berpolitik. Ia duduk di lembaga legislatif mampu mengungguli sejumlah Caleg lain yang berasal dari kedua kecamatan itu.

Setidaknya ada tiga faktor yang memungkinkan ia terpilih kembali menjadi anggota DPRD Bengkalis.

Pertama usaha, kedua doa dan ketiga tawakal. "Mungkin ada yang menilai bahwa saya menggalang dukungan massa hanya menjelang Pemilu saja. Padahal tidak demikian, jauh sebelum itu saya sudah melakukan sosialisasi dan mengembangkan jaringan," ujarnya.

"Saya berprinsip, tidak ada hasil yang memuaskan kalau kita tidak berusaha maksimal," kata Misran yang pernah mencatatkan dirinya sebagai pegawai negeri sipil.

"Hasil yang saya raih itu merupakan buah dari sebuah kerja maksimal yang dengan susah payah saya lakukan. Semua menuntut pengorbanan waktu dan pikiran," tambah pria yang juga pernah menjadi pengusaha jasa konstruksi ini.

Tidak jarang, menurut Misran, untuk mengembangkan jaringan ia terpaksa sehari-hari meninggalkan rumah, berpisah dengan istri dan anak-anak yang sangat dicintai. Pola seperti itu memang terpaksa dilakukannya karena ia dan keluarganya tidak bermukim di Siak Kecil dan Bukit Batu. Ia tahu secara lebih detail apa yang diinginkan oleh masyarakat di Dapilnya.

Selain berusaha maksimal, Misran juga menempatkan doa sebagai faktor terpenting sehingga ia mendapatkan satu tiket untuk duduk di DPRD Kabupaten Bengkalis. Ia yakin ada kekuatan ilahiyah yang selalu mengiringi perjalanan hidup manusia, kapan dan dimana saja.

"Usaha yang maksimal, kadang-kadang belum membuahkan hasil seperti yang kita harapkan karena ada kekuatan Ilahiyah yang mengatur," ujarnya.***

BIODATA

Nama	: MISRAN HAMID
Tempat/Tgl Lahir	: Bengkalis, 11 April 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jalan Pramuka RT 03/05 Desa Senggoro, Bengkalis
Istri	: Siti Hawa
Anak	: Tiga Orang Ade saputra Ridho Randika Putra Mohd Rangga Putra
Riwayat Pendidikan	: SDN Bengkalis (1972) SMPN 8 Pekanbaru (1981) SMA Seri Rama Pekanbaru (1984) Pernah Kuliah di Universitas Lancang Kuning (1985)
Riwayat Pekerjaan	: ● Pegawai Negeri Sipil ● Pengusaha Jasa Konstruksi ● Anggota DPRD Bengkalis (2009-2014) ● Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)
Riwayat Organisasi	: 1. Wakil Seketaris Komite Melayu Bengkalis Bersatu 2. Wakil ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Bengkalis (1999) 3. Sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Bengkalis (2000) 4. Waki Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bengkalis (2005) 5. Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupten Bengkalis (2010-2015)



MUHAMMAD
TARMIZI, SSy



Peduli Nasib Petani dan Nelayan



Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dua priode yang berasal dari daerah pemilihan Bengkalis-Bantan ini menaruh perhatian besar terhadap nasib para nelayan dan mereka yang bergerak sektor pertanian. Hal ini tak lain karena hampir di setiap desa di Bengkalis ini ada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani.

Karena belum tersentuh kemajuan di bidang teknologi, menurut Muhammad Tarmizi SSy, kondisi perekonomian masyarakat nelayan pada umumnya masih jauh di bawah standar layak. Tidak sedikit diantara mereka mengaku susah memenuhi kebutuhan hariannya, kalau dibiarkan terus mereka akan tetap hidup miskin, sementara mereka merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Bengkalis sehingga berhak mendapatkan kehidupan yang layak.

Kondisi itulah yang mendorong Tarmizi dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis berupaya mengangkat derajat perekonomian para nelayan di Bengkalis. Langkah yang ditempuh adalah mengupayakan dana di APBD Kabupaten Bengkalis untuk pengadaan alat-alat tangkap modern buat para nelayan, yang memungkinkan mereka mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak.

Tapi, Tarmizi tak menginginkan bantuan alat tangkap modern yang yang diberikan secara cuma-cuma kepada nelayan itu tidak tepat sasaran. "Jangan sampai terjadi, yang membutuhkan A, sedangkan yang menerima B. Sama artinya arang abis, besi binasa. Kita menginginkan yang mendapat bantuan tersebut benar-benar mereka yang sangat membutuhkan," ujar Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan ini.

Makanya, dalam penyaluran alat tangkap modern kepada para nelayan, menurut Tarmizi harus melibatkan jajaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis. Karena mereka yang punya data tentang nelayan miskin dan alat tangkap jenis apa yang cocok diberikan kepada nelayan. Termasuk melakukan pendataan terhadap rumah tangga nelayan yang masuk kategori miskin.

Pada gilirannya, menurut Sekretaris PPP Kabupaten Bengkalis itu, bantuan alat tangkap modern itu terasa sangat membantu untuk mendongkrak perekonomian masyarakat nelayan. Tarmizi mengaku beberapa kali didatangi masyarakat nelayan yang terang-terangan menyatakan ke Tarmizi bahawa mereka



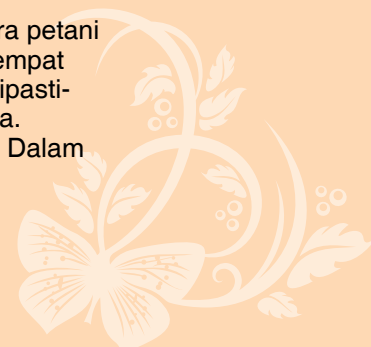


merasa sangat diuntungkan oleh bantuan yang diterima.

Sementara perhatian untuk masyarakat petani ditunjukkan Tarmizi dengan memberikan bantuan bibit karet kepada petani yang membutuhkan. Menurutnya, sebagian masyarakat mempunyai kemauan kuat untuk berusaha tani, tapi sering terkendala ketiadaan modal usaha. Bantuan bibit diharapkan akan sedikit meringankan beban mereka dalam mengelola usaha mereka.

Sama dengan bantuan alat tangkap modern untuk nelayan, untuk bantuan bibit karet buat para petani dilakukan melalui jaringan seleksi yang ketat. Tujuannya jelas, agar tidak salah sasaran. Kalau sempat salah sasaran, bisa saja bantuan bibit tersebut dijual. "Makanya, sebelum bantuan diserahkan, dipastikan dulu apakah masyarakat calon penerima memang layak mendapatkannya atau tidak," ujarnya.

Dalam konteks persoalan ini, ia juga menjalin kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam



soal lahan, misalnya, selain yang akan ditanami bibit karet itu didukung oleh surat-surat yang diperlukan, juga dipastikan lahan dimaksud tidak berada dalam kawasan hutan lindung. “Makanya kita harus menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan,” sebutnya.

Untuk keteria masyarakat tani yang berhak mendapatkan bantuan bibit ini, termasuk dalam soal teknis dari pemeliharaan sampai bibit dipindahkan ke lahan untuk ditanam, menurut Tarmizi, pihaknya menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. “Terutama soal petani yang berhak mendapatkan bantuan, diharapkan dari kalangan mereka yang benar-benar membutuhkan,” papar anggota DPRD Bengkalis dua priode ini.

Tarmizi berharap dengan upaya itu, paling tidak bisa sedikit meringankan kendala masyarakat dalam berusaha tani, terutama modal untuk pengadaan bibit akan teratasi. Sasaran lain yang diharapkan, tentu saja agar petani yang selama ini tidak memiliki sumber ekonomi yang pasti, punya lahan perkebunan sebagai sumber nafkah keluarganya. “Mereka juga akan punya basis kalau hendak mengembangkan usaha taninya,” ujar Tarmizi.

Sasaran lain yang tidak kalah penting, menurut Tarmizi, agar lahan-lahan yang ada mampu member nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat Bengkalis. Jangan sampai begitu gampang menjual lahan dengan mengabaikan aspek ekonominya. “Kalau itu yang terjadi, siaplah jadi buruh seumur hidup,” pesannya.

12 Jam Mengapung di Laut

Menceburkan diri ke dunia politik praktis sejak 1998, Tarmizi langsung menjatuhkan pilihannya kepada PPP. Saat itu, ketika rezim orde baru masih berkuasa, hanya tiga pilihan partai politik. Selain PPP, dua lainnya adalah Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.

Apa yang mendorong Tarmizi memilih PPP sebagai kendaraan politiknya? “Karena saat itu melihat PPP adalah sebagai partai oposisi. Terlebih saat itu PPP identik dengan Islam,” ujarnya.

Setelah sekian lama bergiat di PPP, di pundak Tarmizi dipercayakan sejumlah jabatan, diantaranya Ketua Angkatan Muda Kakbah, Ketua PAC PPP Kecamatan Bengkalis dan Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Bengkalis.

Boleh jadi karena Ketua DPC PPP Kabupaten Bengkalis saat itu, Alm Syahril, menilai Tarmizi sudah banyak berbuat untuk kepentingan partai, maka ditawarkan untuk menempati nomor urut satu daftar calon tetap dari Daerah Pemilihan Bengkalis I. Tapi saat itu Tarmizi menolak tawaran tersebut.

Alasannya, karena kebijakan di internal partai telah memutuskan bahwa yang akan berhak duduk di lembaga legislatif adalah caleg yang mendapatkan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut. Makanya ia kemudian memutuskan untuk memilih berada pada nomor urut tiga saja. “Saya berprinsip, di nomor urut berapa pun saya berada, kalau masyarakat menginginkan, maka saya akan duduk,” katanya.

Dugaan Tarmizi benar. Merujuk hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPUD Kabupaten Bengkalis, kendati hanya berada di nomor urut 3 dalam DCT, Tarmizi diyatakan berhak mendapatkan satu tiket duduk di DPRD Kabupaten Bengkalis untuk masa bakti 2009-2014. Di priode kedua 2014-2019, ia kembali duduk dengan nomor urut 1 dalam DCT dari Dapil yang sama (Bengkalis-Bantan).

Dua priode duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, tidak membuat Tarmizi tinggi hati dan melupakan konstituen yang telah memilihnya. Sikap yang sejak lama dipegang teguh olehnya, berbuat yang terbaik tanpa mengharap pamrih tetap selalu dijadikan pijakan.

“Saya tidak mau seperti kacang yang lupa dengan kulit,” tegas suami dari Sri Gusriani ini.

Tarmizi lahir dari sebuah keluarga yang sederhana. Bapaknya berprofesi sebagai Pegawai Negeri

Sipil golongan rendah. Kondisi inilah yang antara lain mendorong Tarmizi untuk membiasakan hidup mandiri. Maka tidak heran, sejak usia muda Tarmizi sudah mencempungi berbagai macam pekerjaan, termasuk membawa kayu balak ke Malaysia sebelumnya akhirnya memutuskan berhenti untuk kemudian berganti profesi menjadi pengusaha jasa konstruksi.

Saat menjadi toke balak, Tarmizi mengalami sepenggal cerita kehidupan yang sangat sulit dilupakan sepanjang hayat masih di kandung badan. Dikisahkan, pada pertengahan 1995, kapal yang ia nakhodai bersama seorang temanya dihantam badai, lalu tengelam di perairan Selat Malaka. Ia dan kawannya tenggelam pukul 23.00, baru diselamatkan nelayan Malaysia pukul 10.00 atau 12 jam mengapung di laut.***

BIODATA

- Nama : Muhammad Tarmizi, SSy
Tempat /Tgl Lahir : Bengkalis /
10 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Istri : Sri Gusrini
Anak : Afidah Bahirah Faqkah
Riwayat Pendidikan :
 - SD 10 Bengkalis
 - SMP 01 Bengkalis
 - STM Awang Mahmuda Bengkalis■ Riwayat Pekerjaan :
 - Pengusaha jasa konstruksi
 - Anggota DPRD Bengkalis (2009-2014)
 - Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)■ Riwayat Organisasi :
 - Ketua Angkatan Muda Kakbah (AMK)
 - Pengurus Laskar Melayu
 - Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Bengkalis
 - Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bengkalis



FRANSISCA



Terjun ke Politik untuk Memperjuangkan Aspirasi Rakyat

Awalnya hanya ingin menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, tidak lebih dari itu. Itulah yang terucap dari bibir Fransisca, mengawali perjalanan hidupnya hingga sampai duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis periode 2014-2019

Apa yang diinginkan Fransisca adalah impian dan keinginan kebanyakan perempuan negeri ini. Menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk suami dan anak-anaknya. "Cita-cita saya hanya ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik. Hanya itu saja ketika itu," kata Fransisca.

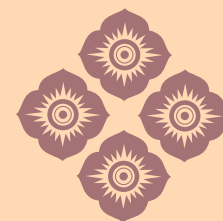
Tapi, melihat kondisi masyarakat dan masih banyak aspirasi masyarakat yang belum diakomodir pemerintah, membuat Fransisca tersentak dan ingin berbuat sesuatu untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Ia kemudian berpikir. Untuk memperbaiki dan merealisasikan aspirasi masyarakat dia harus berada dalam sistem, tidak bisa di luar. Kalau dari luar sistem tentunya kurang dengar. Untuk itulah akhirnya Fransisca memutuskan masuk ke dalam sistem, yakni melalui jalur partai politik. Supaya suaranya tak dianggap angin lalu.

Demi cita-cita keduanya ini, ia kemudian masuk ke kancah politik. Partai pertama yang dimasukinya adalah Partai Damai Sejahtera. Di PDS, anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Jl Sinambela-K Sitorus ini bertarung pada Pemilu 2004 memperebutkan kursi DPRD Bengkalis. Namun, Tuhan belum merestui. Di partai bernuasa agamis ini ia gagal menjadi wakil rakyat, karena sistem nomor urut.

Gagal di PDS, istri dari Ketua Forki Kabupaten Bengkalis, Sabarman Damanik yang juga Ketua Harian Ikatan Keluarga Batak Riau Daerah Bengkalis ini pindah ke Partai Patriot. Di partai yang dilahirkan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila ini, Fransisca mencoba lagi mewujudkan keinginannya menjadi wakil rakyat. Namun, lagi-lagi belum kesampaian.

Dua kali mencoba, dua kali gagal tak membuatnya patah arang. Tetapi justru sebaliknya membuat Fransisca semakin penasaran. Semangatnya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat semakin kuat dan menggelora. Angin segar akhirnya mampir juga kepada wanita penggemar karate ini. Melalui Partai



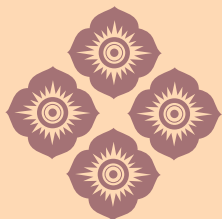
Nasional Demokrasi (Nasdem), Fransisca mencoba mewujudkan keinginannya dengan ikut bertarung di Pemilu 2014, dan berhasil.

Keberhasilannya mendapat kursi di DPRD Bengkalis membuat keinginan ibu sembilan anak dan satu cucu ini punya kekuatan memperjuangkan nasib dan aspirasi rakyat ke Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Saat ini, Fransisca dan teman-teman sejawatnya di dewan bahu membahu menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya Daerah Pemilihan Mandau.

"Saya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat dari dalam. Kalau dari luar tak didengar oleh pemerintah. Kalau dari dalam mudah-mudahan lebih didengar," ujarnya. Fransisca berprinsip, semua fasilitas yang didapatnya sebagai wakil rakyat harus untuk memperjuangkan nasib rakyat, bukan malah sebaliknya. Untuk itu, dia tak sedikitpun menjaga jarak dengan rakyat. "Saya ini wakil rakyat, tentu harus memperjuangkan rakyat," pungkasnya.***

BIODATA

NAMA	: FRANSISCA
TEMPAT/TGL LAHIR	: Tebing Tinggi, 25 Juni 1965
ALAMAT	: Komplek Krakatau Chevron) Nomor 235-Duri
JENIS KELAMIN	: Perempuan
AGAMA	: Kristen Protestan
NO TELP/HP	: 0812 61 3333 55
SUAMI	: Sabarman Damanik
ANAK	: Sembilan orang
	1. Sasha Devi Prativi
	2. Shena Patrisia
	3. Dearn Happy
	4. Rindang Saraswati
	5. Bryan Mei
	6. Simon Paskah
	7. Sem Nuari
	8. Sekinah Hanna
	9. Sadrach Abel
AYAH	: J.L.Sinambela
IBU	: K.H.Sitorus
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1. SD Santo Yosep Duri (1977)
	2. SMP Santo Yosep (1981)
	3. SMA Negeri 428 (1985)
RIWAYAT PEKERJAAN	: Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)
RIWAYAT ORGANISASI	: ● Wakil Bendahara PDS
	● Pengurus Partai Patriot
	● Pengurus Partai Nasdem
	● Bidang Organisasi Forki Bengkalis
	● Ketua Pengcab Tako Bengkalis (2014-2018)



ANDRIYAN PRAMA
PUTRA



Legislatif dan Eksekutif Harus Kompak

Muda dan ganteng. Dua kata yang melekat di diri Andriyan Prama Putra. Legislator dari Daerah Pemilihan Mandau ini merupakan yang termuda dari seluruh anggota DPRD Bengkalis periode 2014-2019.

Kehadirannya di DPRD Bengkalis sedikit banyak dapat mewarnai kinerja DPRD Bengkalis. Sebab, semangat kebersamaan untuk kemajuan Kabupaten Bengkalis yang dianut anak pertama pasangan H Herliyan Saleh-Rhomaini ini, salah satu modal untuk merealisasikan keinginan masyarakat agar hari depan mereka lebih baik dari hari ini oleh sentuhan pembangunan.

Untuk mewujudkan itu, pria kelahiran Pekanbaru 12 Desember 1988 ini berharap ke depan tak ada lagi kubu-kubuan di DPRD. Sebaliknya, harus memupuk dan mengedepankan rasa kebersamaan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bengkalis.

"Bengkalis harus dibangun dengan kebersamaan. Jangan lagi ada kubu-kubuan," ujarnya.

Menurut lajang yang insyaallah tahun ini akan menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Riau ini, kerjasama yang harmonis antara legislatif dengan eksekutif harus dibangun. Dengan demikian, semua program yang dibuat dan diajukan eksekutif untuk kemudian budgetnya dibahas di DPRD dapat dilaksanakan.

"Dewan dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus kompak. Ini untuk kemajuan Bengkalis ke depan," kata politisi muda Partai Amanah Nasional ini.

Di samping itu, selaku wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Mandau, Andriyan sudah barang tentu menyuarakan aspirasi konstituentnya. Namun demikian, Andriyan punya prinsip, lebih mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan perorangan dan golongan.

Sebagaimana kebanyakan anak pamong yang orangtuanya sering pindah tugas, ini juga dialami Andriyan. Belum selesai pendidikan dasarnya di SD Negeri 078 Bengkalis, Andriyan kecil harus pindah ke Pekanbaru karena sang ayah, H Herliyan Saleh dipindahtugaskan ke Pekanbaru.



Di Pekanbaru Andriyan masuk ke SD Babussalam. Setamat dari SD Babussalam, Andriyan melanjutkan ke SMP Asofah dan tamat tahun 2004. Selesai SMP, Andriyan kemudian melanjutkan pendidikan menengah atasnya di SMAN 8 Pekanbaru. Dengan ekonomi orangtua yang mumpuni, usai menyelesaikan pendidikannya di SMAN 8 Andriyan melanjutkan pendidikan ke UKM Malaysia.

Tak puas hanya menimba ilmu di negeri jiran, ia kemudian melanjutkan ke Universitas Riau. Saat ini anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Ir H Herliyan Saleh, MSc-Hj Romaini asal Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil ini tengah berupaya menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

"Insyaallah tahun ini wisuda," ujarnya.***

BIODATA

NAMA	: ANDRIYAN PRAMA PUTRA
TEMPAT/TGL LAHIR	: Pekanbaru, 10 Desember 1988
ALAMAT	: Jalan Gatot Subroto, Gg Budiman No 02 RT/RW 004/004
JENIS KELAMIN	: Laki laki
AGAMA	: Islam
NO.TELP/HP	:
ISTRI	: Noor Fania Eka Putri
ANAK	: -
AYAH	: Ir H Herliyan Saleh, MSc
IBU	: Hj Romaini
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1. SD Babussalam (2001) 2. SMP Assofa (2004) 3. SMAN 8 Pekanbaru 4. Universitas Riau (sedang kuliah)



HENDRI, SAg, MSi



SDM Berkualitas dan Kompetitif Harus Dipersiapkan

Bicara pengalaman sebagai politisi, sosok yang satu ini tidak perlu diragukan lagi. Betapa tidak, sejak tahun 2004 sudah duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis. Saat ini merupakan priode ketiga ia duduk di lembaga yang terhormat tersebut.

"Mungkin ini sudah garisan hidup saya, dimana sebagian dari usaha yang diberikan Tuhan diantaranya diabdikan sebagai wakil rakyat," ujar Hendri, SAg, MSi.

Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, kenapa bisa bertahan duduk di lembaga legislatif sampai saat ini. Menurut Hendri, dimanapun bekerja dan apapun profesi yang digeluti dan dijalannya, pada dasarnya adalah pengabdian menuntut keiklasan, totalitas, loyal dan lainnya.

"Setiap pengabdian yang baik, saya yakin juga akan memberi umpan balik yang memadai," begitu falsafah hidup pria kelahiran Duri, 12 Oktober 1968 ini.

Dua priode (2004-2009 dan 2009-2014) telah dilewati dan masuk priode ketiga menjadi anggota DPRD Bengkalis, Hendri mengaku telah berupaya keras melakukan hal itu. Tentu saja sesuai dengan wewenang dan batas kemampuan serta kompetensi yang ia miliki. "Saya merasa telah memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Kabupten Bengkalis di periode pertama dan kedua saya menjadi wakil rakyat. Demikian juga di priode ketiga ini, saya akan berusaha lebih maksimal lagi dan akan menyelesaikan pemekaran kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir yang belum selesai di periode ke dua kemarin," ujarnya.

Bekerja sama dengan eksekutif sebagai mitra sejajar, Hendri bersama koleganya di DPRD Kabupten Bengkalis telah berupaya melakukan banyak hal untuk kemajuan Kabupaten Bengkalis guna mengejar keteringgalan-keteringgalan serta menyejahterakan masyarakat.

"Kalau masih ada agenda di periode pertama dan kedua belum tercapai. Tolong dicatat itu sebagai kelemahan dan kekurangan kami. Insya Allah di priode ketiga ini kita akan perbaiki," ujar suami Desy Susanty, SH ini.

Dipaparkan Hendri, terbatasnya anggaran yang tersedia di APBD Kabupten Bengkalis, salah satu penyebab tidak memungkinkan untuk menampung semua aspirasi. Tapi ke depan ia akan coba membenahinya



agar lebih baik lagi.

Selama berkiprah menjadi anggota dewan, Hendri berusaha meluahkan perhatian untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupten Bengkalis. Upaya ke arah itu didasari pada pepatah bijak, bahwa kalau ingin menguasai dunia, maka terlebih dahulu kuasailah ilmu pengetahuan.

“Untuk menuju Kabupten Bengkalis yang lebih baik, mesti dipersiapkan dengan meletakkan kerangka landasan yang kokoh dan kuat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Salah satu sarana untuk membentuk SDM yang berkualitas itu adalah dengan memajukan dunia pendidikan,” tegas Hendri.

Namun perlu disadari, jangan berharap dunia pendidikan akan menghasilkan umpan balik dalam waktu yang cepat atau instan. Pembentukan SDM berkualitas melalui dunia pendidikan merupakan investasi jangka panjang, dimana hasilnya mungkin baru bisa dilihat dalam rentang waktu puluhan tahun ke depan. Ia mencontohkan sejumlah negara maju seperti Jepang dan negara lainnya, yang telah menikmati buah dari SDM berkualitas itu. Visi dan misi menjadikan Bengkalis sebagai kota pendidikan tentu harus mendapat dukungan penuh dari segala kalangan, terlepas siapapun nanti Bupati Bengkalis yang akan terpilih.

Terlepas dari kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kabupten Bengkalis, sebagai warga daerah ini, Hendri memiliki obsesi yang besar bagaimana Kabupaten Bengkalis diisi oleh manusia-manusia dengan





kemampuan SDM yang tinggi dan berkualitas sehingga diharapkan akan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin lama diyakini akan kian berat.

Bila kelak Kabupaten Bengkalis diisi oleh mereka yang memiliki kemampuan SDM yang tinggi dan teruji, maka berbagai keterbatasan yang ada selama ini diyakini akan bisa dicarikan solusinya. Taroklah satu misal bila kelak di kemudian hari terjadi keterbatasan di bidang sumber daya alam yang ada, dengan SDM yang mumpuni tentu ada solusi pemecahannya.

Begitu pun sejumlah peluang kerja yang selama ini diisi oleh tenaga dari luar karena ketidakmampuan tenaga lokal untuk mengisi formasi yang ada, menurut Hendri akan diisi oleh putra putri terbaik daerah terbaik.

“Dari mereka tentu bisa diharapkan nilai tambah yang lain. Karena merupakan putera daerah, tentu mereka memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk berbuat yang terbaik untuk kepentingan daerahnya,” sebut Hendri.

Jadi Guru dan TNI

Diakui ayah 4 anak ini, menjadi anggota DPRD bukanlah cita-citanya sejak kecil. Ia malah punya cita-cita yang tidak terlalu muluk-muluk, menjadi guru dan mengabdikan kepada negara sebagai anggota TNI.

Hendri tentu punya pertimbangan yang logis kenapa memilih kedua profesi itu sebagai jalur hidupnya. “Tentu tidak terlepas dari kondisi ekonomi orang tua kala itu,” kenangnya.

Di tengah kondisi perekonomian orang tuanya yang tidak terlalu kuat, sementara di bagian lain beban yang ditanggung tidak ringan, karena ia memiliki 10 orang saudara kandung. Di tengah 10 orang bersaudara itu, anak dari pasangan H Nuarin dan Hj Khalimah ini menempati posisi sebagai anak sulung. Praktis, banyak harapan yang ditimpakan di pundaknya, terutama mampu meringankan beban ekonomi orang tua dalam menunjang biaya pendidikan adik-adiknya.

Tentang cita-cita masa kecilnya menjadi tentara Hendri mengenang, waktu itu, penyandang profesi tersebut yang disegani dan terpendang. “Waktu zaman saya keecil dulu, melihat orang berpakaian tentara masyarakat segan,” katanya. Makanya Hendri kecil kala itu menancapkan niat untuk menjadi tentara. Tapi pada akhirnya, baik menjadi tentara ataupun guru tidak kesampaian.

Hendri akhirnya memilih berlabuh di dunia politik setelah sebelumnya tercatat berkerja di PT Tripatra. Untuk menuju ke gelanggang politik praktis, Hendri menjatuhkan pilihan pada Partai Buruh sebagai kendaraan politiknya di priode pertama dan kedua ia duduk menjadi anggota legislatif. Namun di priode ketiga, ia hijrah ke Golkar karena Partai Buruh tidak bisa ikut Pemilu 2014.***



BIODATA

NAMA : HENDRI, SAg, MSi
TEMPAT/TGL LAHIR : Duri, 12 Oktober 1968
ALAMAT : Jalan Sukajadi II No E 68 Duri
JENIS KELAMIN : Laki- laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 0811 7501 58
ISTRI : Desy Susanty, SH
ANAK : Empat Orang
1. Hery Agung Saifullah.
2. Laila Syafira.
3. Nabila Fawza Rizky
4. Ratu Balqis Ramadhani
AYAH : H Nuarin Hasibuan
IBU : Hj Khalimah

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. Madrasah Ibtidaiyah
Hubbul wathan Duri
2. Madrasah Tsanawiyah
HubbulWathan Duri
3. Madrasah Aliyah Hubbul
Wathan Duri
4. S-1 STAI HubbulWathan Duri
5. S-2 Universitas Riau
RIWAYAT PEKERJAAN : ● Guru MTS Hubbul Wathan Duri
● PT RMI Duri
● PT Tri Patra Duri
● Anggota DPRD Bengkalis (2004-2009)
● Anggota DPRD Bengkalis (2009-2014)
● Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)

SAFRANA FIZAR, ST



Angkat Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang Terintegrasi



Lasak, hidup haruslah bermanfaat bagi orang lain walaupun itu dipandang kecil. Begitulah sosok seorang Safrana Fizar, ST. Berbagai cara dilakukannya dalam mengabdikan dan meningkatkan sumber daya manusia serta meningkatkan perekonomian masyarakat di lingkungannya. Bertolak dari niat itu, anak kedua dari lima bersaudara ini, tak mau hanya berpangku tangan. Ada saja yang dia perbuat untuk kemajuan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Anak pasangan H. Ruslan Khalifah Muhammad Khatib-Salmah (alm) ini prihatin melihat kondisi kampung halamannya yang disebutnya banyak uang, namun peputaran uangnya kurang baik. "Riau banyak uang, tetapi perputaran uangnya kurang baik," ujar lelaki bersahaja ini.

Keinginan untuk memperbaiki yang dinilainya kurang baik tadi, terus saja muncul. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Politeknik USU Medan tahun 1995, Safrana kemudian bekerja di PT Komatsu Indonesia Jakarta.

Kendati sebagai koordinator training center PT Komatsu Indonesia, Jakarta, sangat menjanjikan, namun tak membuat anak jati Riau ini tenang. Safrana tetap saja gelisah karena ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat walau itu dipandang kecil.

Sampai akhirnya ia memutuskan berhenti dari PT Komatsu Indonesia pada tahun 2003 dan mencoba mandiri. Bersama istri tercinta, Nurlaila, AMKeb yang dinikahinya pada 12 September 1999, Safrana mendirikan praktik kebidanan di Duri tahun 2004.

Melalui praktik kebidanan ini, Safrana dan istri dapat melayani masyarakat di sektor kesehatan. Ternyata tak cukup sampai di situ, ayah dari tiga anak ini ingin meningkatkan sumber daya manusia. Melalui Yayasan Raudhatush Sholihin Duri yang didirikan pada tahun 2007, Safrana mendirikan PAUD, Taman kanak-kanak Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Quran, DTA dan Rumah Suluk.

Bertahun-tahun Safrana dengan tekun berkecimpung di dua sektor tersebut, yakni kesehatan dan pendidikan. Keuletannya bersama istri membuahkan hasil, kegiatan klinik dan yayasannya terus bertambah.



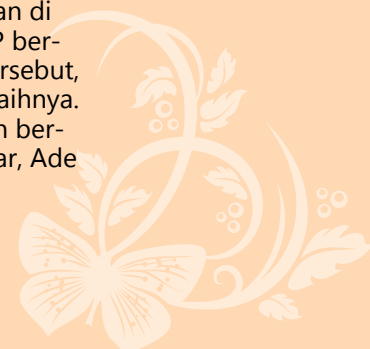
Terjun ke Politik

Melihat sumbangsih Safrana untuk peningkatan SDM di Mandau menjadi perhatian pengurus Partai Persatuan Pembangunan. Pengurus partai berlambang Ka'bah itu kemudian memintanya bergabung pada 2010. Setahun kemudian dia dipercaya menjadi Plt Ketua Pengurus Anak Cabang PPP Kecamatan Mandau, karena Ketuanya meninggal dunia.

Dengan jabatan baru sebagai Plt Ketua PAC PPP Mandau, Safrana harus pandai-pandai membagi waktu. Dengan pelayanan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan yang terus ditingkatkan. Inilah yang membuat sosok Safrana makin dikenal luas masyarakat.

Kendati demikian, ia tak begitu berambisi untuk total terjun ke dunia politik. Baginya pengabdian di bidang kesehatan dan pendidikan lebih menarik dan mengasikkan. Sebaliknya, para pengurus PPP berpendapat lain. Potensi yang dimiliki Safrana tentu akan menguntungkan partai. Melihat potensi tersebut, Safrana kemudian diplot untuk maju pada Pemilihan Legislatif 2014. Ternyata benar, satu kursi diraihnya.

Setelah duduk di DPRD Bengkalis, baginya kursi dewan bukan kursi empuk untuk bersantai dan berpangku tangan melihat kondisi masyarakat. Ayah dari Sholahuddin Al Bisyr, Nasywa Syarifah Elfizar, Ade



Fatimah Nadra Elfizar ini punya keinginan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kali ini sektor yang dibidik Safrana adalah pertanian, peternakan dan perikanan.

Ia pun sudah punya konsep untuk itu, yaitu mengintegrasikan pertanian dengan perikanan melalui sistem Aquaponik, bukan dengan cara tradisional yang dilakukan masyarakat selama ini.

Aquaponik yang diperkenalkan anggota Komisi II DPRD Bengkalis ini berbiaya murah tapi modern. Dimana pertanian dipadukan dengan perikanan yang terintegrasi.

Ternyata apa yang dilakukan Safrana membuahkan hasil. Saat ini, bisa dikatakan pertanian dan perikanan berintegrasi itu menjadi pilot project. Dimana masyarakat bebas belajar dan bertanya kepadanya dan ia akan menjelaskan segamblang mungkin kepada yang bertanya.

"Silahkan saja datang, ini terbuka buat siapa saja. Saya akan terangkan semuanya, termasuk biayanya," kata Safrana sembari memperlihatkan foto sang istri yang tengah bekerja di Aquaponik miliknya.

Setelah sukses dengan pertanian terintegrasi perikanan, sayuran dan perternakan, ia juga punya mimpi membangun perkebunan terintegrasi dengan perternakan. Pola ini dinilainya bisa mengangkat perekonomian para petani di Negeri Junjungan.

"Integrasi sawit dengan sapi. Sudah diterapkan di daerah lain . Ini yang akan saya coba terapkan di Bengkalis," ujarnya.

"Kalau sumbangan uang dari saya tak ada, karena saya adalah Caleg "Dhuafa". Tapi, saya menulari ilmu. Saya akan tetap berbuat sesuatu untuk masyarakat, walau itu dimulai dari kecil," pungkasnya. ***





BIODATA

NAMA : SAFRANA FIZAR, ST
TEMPAT/TGL LAHIR : Rantau Bais, 15 Oktober 1974
ALAMAT : Jalan Sakobatik KM 16 RT/RW 02/02
Desa Boncah Mahang, Mandau
Email : syafrana.fizar@gmail.com
JENIS KELAMIN : Laki laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 0813 7828 2020
ISTRI : Nurlaila, AMKeb
ANAK : Tiga Orang
1. Sholahuddin Al Bisyri
2. Nasywa Syarifah Elfizar
3. Ade Fatimah Nadra Elfizar
AYAH : H Ruslan Khalifah Muhammad Khatib
IBU : Salmah (Alm)

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SD N 04 Rantau Bais (1986)
2. SMP N 3 Pekanbaru (1989)
3. SMA N 02 Pekanbaru (1992)
4. D-3 Politeknik Mesin USU (1995)
5. S-1 ITBU Jakarta (2002)
6. Semester 3 Pasca Sarjana UR

RIWAYAT PEKERJAAN :
- PT Tripatra Duri (1996- 1997)
- PT Komatsu Indonesia Tbk (1997 – 2003)
- Wiraswasta (2003-sekarang)
- Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)

RIWAYAT ORGANISASI :
1. Pengurus OSIS SMAN 2 Pekanbaru
2. Pengurus KNPI Kecamatan Mandau
3. Pendiri Yayasan Raudhatush Sholihin Duri 2007
4. Plt Ketua PAC PPP Kecamatan Mandau 2011

ABDUL KADIR, SAg



Kalau Tidak Bisa Berbuat, untuk Apa Jadi Wakil Rakyat

Ketekatan dan komitmen pria asal Desa Pangkalan Nyirih, Kecamatan Rupert ini sudah terlihat saat dirinya memutuskan mundur dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah 8 tahun dilakukannya. Satu tekadnya kala itu, ingin menjadi anggota DPRD Bengkalis dan berbuat lebih untuk kampung halamannya.

Ternyata, jalan yang dilewati tidaklah semulus yang dibayangkan. Tahun 2004 bergabung dengan Partai Golkar, menjajal ikut bertarung di Pemilu Legislatif. Sayang, saat itu nama Kadir dicoret KPU, karena SK pengunduran dirinya dari PNS belum dikantongi.

Gagal menjadi anggota DPRD, alumni IAIN Imam Bonjol Padang ini tidak lantas patah arang. Menurutnya, masih banyak cara untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, termasuk ketika dia harus terjun ke dunia kontraktor.

Tidak sia-sia, sejumlah tender proyek-proyek besar berhasil dimenangkannya, hanya saja keinginannya untuk menjadi anggota DPRD masih begitu kuat. Kesempatan tersebut digunakan untuk terus bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, merangkul seluruh elemen, memberikan pemahaman dan keyakinan, bahwa anak Pangkalan Nyirih mampu bersaing dengan anak daerah lain.

Akhirnya, pada Pemilu Legislatif 2009 mengantarkan ayah Shasi Kirani Aurora ini sebagai anggota DPRD Bengkalis. Tapi bukan lagi dengan perahu Golkar, Kadir loncat pagar dan memilih Partai Barisan Nasional (Barnas). Tidak sampai lima tahun menjadi anggota DPRD, Kadir sudah tunak dengan berbagai persoalan yang terjadi di rumah rakyat. Lobi-lobi politik harus terus dilakukan, agar aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui dirinya bisa diakomodir.

Pengalaman dirinya 8 tahun menjadi kepala sekolah SMA, 8 tahun menjadi PNS dan 5 tahun menjadi kontraktor, menjadi bekal saat dirinya harus beradaptasi dengan teman, mitra dan berbagai kepentingan lainnya. Satu-satunya wakil rakyat dari Barnas, tidak membuat Kadir kecil hati apalagi minder ketika itu. Kadir tetap bersuara, memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama memperjuangkan alokasi anggaran infrastruktur untuk Pulau Rupert.

Lihatlah, Rupert kini menjadi tumpuan banyak orang, terutama bagi yang ingin menikmati keindahan pan-



tainya. Semua itu karena membaiknya infrastruktur di pulau tersebut. Jalan, listrik, air bersih dan sekolah-sekolah terbangun dengan baik. "Bersama kawan-kawan, kami terus memperjuangkan alokasi anggaran untuk Rupert. Alhamdulillah, sudah nampak perkembangannya," sebut pria keturunan Tionghoa ini.

Memilih Partai Amanat Nasional

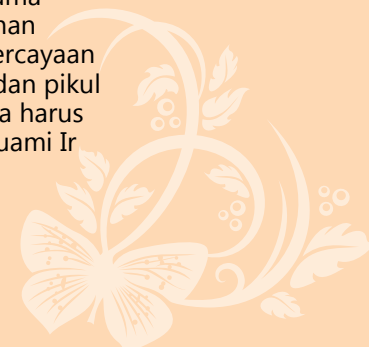
Sadar masih banyak hal yang harus diperjuangkan, Kadir kembali ancap-ancang untuk kembali terlibat dalam Pemilu Legislatif 2014. Tapi dirinya terpaksa memilih perahu berbeda, karena perahu sebelumnya Barnas, tidak lagi bisa tampil di Pemilu 2014.

Pikiran becalaru juga bercabang karena pilihan dan ajakan cukup banyak. Sempat disebut-sebut bergabung dengan Partai Golkar, namun akhirnya memutuskan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Sepaham dan seide itu jelas, tapi menurutnya, besar bagaimanapun partai yang ditumpangnya, jika berdiam diri alias tidak berbuat, maka tidak akan ada artinya.

Pemilu 2014 kembali mengantarkan dirinya sebagai anggota DPRD Bengkalis. Kenyataan itu sekaligus membuktikan bahwa sosok alumni YPPI Bengkalis itu masih cukup dipercaya oleh masyarakat. Dan yang membanggakan, perolehan suara yang dikantonginya terbanyak dari semua caleg dari Dapil Rupert.

Ada cerita menarik sebetulnya kala dirinya kembali bertarung di Pemilu Legislatif 2014. Banyak pendapat mengatakan, suara yang bakal diraih pria berkulit putih dan bermata sipit ini tidak akan signifikan, karena pada saat bersamaan, selain harus bersaing dengan puluhan calon yang lain, Kadir juga harus bertarung dengan Nur Azmi Hasyim ST dari Demokrat, yang tak lain adalah anak abang kandungannya sendiri dan berada satu daerah pemilihan.

Tapi fakta membalikkan semua prediksi, Kadir dan Emi (panggilan akrab Nur Azmi) sama-sama lolos menjadi anggota DPRD dengan perolehan suara cukup signifikan. "Ini amanah dan kepercayaan masyarakat kepada saya, harus saya emban dan pikul dengan penuh tanggungjawab. Pastinya, saya harus berbuat lebih dari tahun sebelumnya," ujar suami Ir Tien Suharti Romas ini.



Ditanya soal target, pria yang pernah bercita-cita menjadi seorang dokter dan kini sedang menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Riau ini berujar, tak ada target apapun yang dipasang. Baginya, amanah yang dibebankan di pundaknya sudah cukup memacu dan mengawasinya untuk berbuat maksimal dengan kemajuan Kabupaten Bengkalis terutama daerah pmilihannya.

"Priode pertama sebagai anggota DPRD, saya sudah ditempa oleh berbagai kondisi. Saya sudah banyak belajar dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Intinya, jika saya tidak bisa berbuat untuk rakyat, untuk apa saya menjadi wakil mereka. Yang penting berkomitmen dengan apa yang menjadi tujuan awal," tegas Kadir.

Lalu apa yang menjadi prioritas untuk diperjuangkannya di priode kedua ini, kata Kadir, infrastruktur dasar harus tetap menjadi prioritas. Saat ini jalan poros Pulau Rupert mulai dari Tanjung Kapal hingga ke Pangkalan Nyirih sudah terbangun dengan baik, kendati baru base. Perlu peningkatan kondisi jalan tersebut sampai dicor atau rigid.

Kemudian, akses ke pantai indah Teluk Rhu harus dipermudah, begitu juga sarana dan prasarana pantai. "Komitmen kami bagaimana suatu saat nanti, Pulau Rupert menjadi destinasi para wisatawan dalam dan luar negeri. Keindahan alam sudah kita miliki, tinggal kita hias dan persolek agar lebih menarik," tegasnya.***

BIODATA

NAMA	: ABDUL KADIR, S.Ag
TEMPAT/TGL LAHIR	: Bengkalis, 18 Agustus 1969
ALAMAT	: Jalan Pancur Jaya Pangkalan Nyirih, Rupert
JENIS KELAMIN	: Laki laki
AGAMA	: Islam
NO.TELP/HP	: 081268344411
ISTRI	: Ir Tien Suharti
ANAK	: Satu orang
	1. Shasi Kirani Aurora
AYAH	: Abdul Rahman
IBU	: Maimunati
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1. SDN 021 Teluk Latak (1983) 2. Madrasah Tsanawiyah YPPI Bengkalis (1986) 3. Madrasah Aliyah YPPI Bengkalis (1989) 4. IAIN Imam Bonjol Padang (1992)
RIWAYAT PEKERJAAN	: 1. Kepala SMU Kurnia Jaya (1993-1995) 2. Pegawai Negeri Sipil (1994 –2004) 3. Wiraswasta/kontraktor (2005 – 2009) 4. Anggota DPRD Bengkalis (2009-2014) 5. Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)



Dr H SULAIMAN
ZAKARIA, Dipl PS, MSI



Birokrat Menjadi Politisi

Ingin terus mengabdikan diri untuk masyarakat, inilah yang mendorong Dr H Sulaiman Zakaria, Dipl Ps MSI terjun ke dunia politik. Selama 33 tahun mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pernah menduduki jabatan tertinggi di birokrasi, sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu, dirasanya masih kurang.

Sebelum duduk di DPRD Bengkulu, sebenarnya ia sempat bertarung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bengkulu Tahun 2010 berpasangan dengan H Arwan Mahidin Rani. Namun waktu itu, Tuhan berkehendak lain, ia harus puas meraih suara terbanyak kedua dari pasangan Herliyan Saleh-Su-ayatno.

Gagal menjadi orang nomor satu di Negeri Junjungan, tidak lantas membuat Ayah Leman, begitu ia akrab disapa orang-orang, patah arang. Malah kegagalan ini semakin mencambuknya ingin terus berjuang mengabdikan diri untuk rakyat melalui jalur politik, dengan memimpin Partai Demokrat di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2012. Waktu itu ia terpilih secara aklamasi.

Untuk mewujudkan visinya menjadikan masyarakat yang sejahtera, memiliki daya saing dengan didukung tata kelola pemerintah yang baik, Ayah Leman merasa tidak cukup hanya duduk sebagai pengurus partai. Maka, pada Pemilu Legislatif 2014, ia ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Bengkulu periode 2014-2019 dari Daerah Pemilihan Bengkulu 1 (Kecamatan Bengkulu dan Kecamatan Bantan).

"Alhamdulillah saya terpilih. Ini membuktikan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengabdikan membangun negeri ini," ujar pria kelahiran Bengkulu, 8 September 1950 ini.

Sebagai birokrat yang kenyang makan asam garam di pemerintahan, ia berkeyakinan bersama-sama anggota DPRD Bengkulu, visi menuju masyarakat sejahtera yang memiliki daya saing dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik akan tercapai.

"Menuju kesejahteraan masyarakat yang memiliki daya saing adalah terwujudnya sejahtera yang adil dan merata dengan lingkungan ekonomi yang tumbuh serta berkembang, peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Terciptanya iklim yang kondusif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membangkitkan semangat masyarakat dalam membangun agar memiliki sikap kompetitif atau berdaya saing dengan

mengarah kepada kemandirian, terutama dalam persaingan global yang berlangsung saat ini, adalah masyarakat yang memegang nilai-nilai adat dan budaya serta norma dalam menghadapi era globalisasi,” ujar pria yang 33 tahun mengabdikan sebagai pegawai negeri sipil ini.

Masyarakat Sejahtera

Sedangkan tata kelola pemerintah yang baik, ujar suami dari Wagjarsih ini adalah pemerintah yang bersih, baik, adil, transparan, partisipatif dan amanah. Mempunyai kemampuan untuk bertindak melayani masyarakat secara berkualitas. Peran pemerintah bersama legislatif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong masyarakat dan dunia usaha melalui penciptaan regulasi, fasilitasi dan pelayanan agar dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya dapat mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Guna mewujudkan visi tersebut, diperlukan adanya misi yang harus diemban sebagai agenda pembangunan. Misi merupakan kerangka dasar bagi perumusan tujuan dan sarana pembangunan serta membangun kebijakan dan strategi pembangunan.

Agenda pembangunan dapat dimaknai sebagai bentuk pernyataan yang berisi kebijakan dan program secara terarah dan dipastikan sebagai sumber utama bagi perencanaan pembangunan. Misi-misi yang diagendakan tersebut sejalan dengan kehendak yang tertuang dalam agenda prioritas RPJMD Kabupaten Bengkalis,” ujarnya.

Intinya, menurut Ketua Demokrat Kabupaten Bengkalis ini, bagaimana meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan, peningkatan investasi, pembangunan wilayah perbatasan dan terpencil serta pemerataan pembangunan antar wilayah.

Kemudian, membangun pusat-pusat perekonomian yang berdaya saing melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, penguatan ekonomi, desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan kualitas SDM melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesejahteraan perluasan lapangan pekerjaan dan link and match antara dunia pendidikan dan kesempatan kerja serta penerapan teknologi maju.

Ia juga menilai perlunya reformasi birokrasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan dalam menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional serta berorientasi pada pelayanan publik. Dan yang tak kalah penting adalah peningkatan dan penguatan nilai-nilai adat Melayu dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, yang bersandar pada moralitas agama.

“Mewujudkan tata pemerintah yang baik (good governance) adalah dengan meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat.

Untuk itu diperlukannya penguatan institusi masyarakat dalam lingkup ekonomi, sosial dan budaya guna mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing,” ujarnya. ***





BIODATA

NAMA	: Dr H SULAIMAN ZAKARIA, Dipl Ps, MSi
TEMPAT/TGL LAHIR	: Bengkalis, 8 September 1950
ALAMAT	: Jalan Almuslihun Bengkalis
JENIS KELAMIN	: Laki -laki
AGAMA	: Islam
NO.TELP/HP	: 081289660662
ISTRI	: Wagiarsih
ANAK	: 1. Inggriani Ningrum
AYAH	: Sulung Zakaria (Alm)
IBU	: Umi Kalsum (Alm)
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1. Sekolah Rakyat (1963) 2. SMP (1966) 3. SMa (1969) 4. D3 di Pekanbaru (1970) 5. S1 di Pekanbaru (1970) 6. S2 di Pekanbaru (1975) 7. S3 di Pekanbaru 2011
RIWAYAT PEKERJAAN	: 1. Pegawai Departemen Sosial Provinsi Riau (1977) 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis (2003-2010) 4. Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)
RIWAYAT ORGANISASI	: 1. Ketua Ikatan Pemuda Belajar Bengkalis Pekanbaru (1978) 2. Sekretaris Golkar (1980) 3. Ketua Yayasan Bangun Insani (2003) 4. Ketua IPHI (2008) 5. Ketua LAMR Kabupaten Bengkalis (2009) 6. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis (2012)



Hj AISYAH



Antara Harapan dan Impian

Menjadi kepala desa, sebetulnya sudah cukup ruang bagi Hj Aisyah untuk berbuat dan membaktikan diri kepada masyarakat. Kepala desa juga punya kuasa untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di kampung yang dipimpinnya. Ya, skalanya memang agak kecil jika dibanding dengan seorang camat apalagi anggota dewan.

Karena kewenangan dan cakupan yang kecil dan terbatas itu pula, lambat laun muncul keinginan untuk melakukan lebih dari itu. Ingin berbuat untuk masyarakat lebih luas, tidak hanya sebatas masyarakat se-kampung. Untuk terjun di kasta politik yang lebih tinggi, dirinya sudah memiliki modal dasar. Bukan hanya soal finansial, tapi juga pengalamannya sebagai kepala desa.

Soal nama, sosok satu ini sudah cukup dikenal. Tak hanya di kampungnya Tenggayun, tapi juga Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil. Lalu apakah demi materi? Jangan salah, isteri Zubari SS ini, selain seorang kepala desa dia juga pengusaha sukses. Jadi materi bukanlah tujuan utamanya.

"Saya ingin berbuat lebih lagi untuk masyarakat, bukan hanya untuk masyarakat di kampung saya, tapi jauh lebih luas dari itu," sebut ibu tiga anak ini.

Untuk mengakomodir semangat itu, Aisyah beranggapan menjadi anggota dewan sepertinya menjadi salah satu cara untuk berbuat lebih banyak dalam kaitan menampung aspirasi dan memperjuangkannya untuk masuk dalam anggaran. Karena walau dirinya kepala desa, tidak mungkin naik tingkat menjadi camat, sebab alumni SMA 2 Bengkalis ini bukan PNS.

Tekadnya pun sudah semakin mantap. Tekad untuk terjun ke kancah politik tingkat kabupaten dengan beradu nasib sebagai anggota DPRD, juga tekad untuk meninggalkan singgasana kepala desa yang sudah digenggamnya selama bertahun-tahun.

Nasib mujur menyebelahi kader perempuan Golkar ini. Aisyah memperoleh suara signifikan dan mendapuknya sebagai salah seorang perempuan yang duduk di parlemen dari daerah pemilihan Bukit Batu-Siak Kecil.

Tahun Pertama Gagal

Terpilih sebagai anggota DPRD tidak membuat perempuan kelahiran Tenggayun, Kecamatan Bukit Batu tahun 1974 silam ini larut dalam eforia. Aisyah memacu diri untuk belajar dan banyak bertanya tentang



aturan dan apa-apa yang menjadi tugas dan wewenang anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

Kerja semakin berat, persaingan juga bertambah ketat. Jika dulu hanya satu desa yang dinakhodainya, kini 30 desa di dua kecamatan (Bukit Batu dan Siak Kecil) harus mendapatkan perhatian sama.

Untuk mengakomodir apa yang menjadi kepentingan dan keinginan masyarakat, Aisyah rajin menyambangi setiap ceruk kampung, mendengar dan berusaha merealisasikan apa yang menjadi aspirasi mereka. Aktif dan selalu hadir di setiap Musrenbang Desa dan Kecamatan.

"Tapi terus terang, apa yang saya rasakan sesungguhnya tidak sesuai harapan dan mimpi-mimpi saya. Bagaimana tidak, dari sekian puluh usulan dari masing-masing desa, yang diakomodir pemerintah berkisar 4 sampai 5 saja," kesal Aisyah.

Jargon pembangunan atau usulan kegiatan berasal dari bawah melalui Musrenbang ternyata tidak sesuai kenyataan. Sebagian besar kegiatan muncul di tengah jalan, hanya sedikit sekali usulan masyarakat yang ditampung oleh pemerintah.

"Terus terang saya malu menemui masyarakat saat reses, saya malu ketika mereka menagih apa yang pernah mereka sampaikan ke saya dan ternyata tidak terealisasi. Jangan banyak-banyak, dua usulan saja dari masing-masing desa terelisasi itu sudah sangat bagus. Ini tidak, dari puluhan usulan (30 desa) hanya 4 yang diakomodir," ujarnya.

Dirinya tidak ingin ada masyarakat yang berpikir kalau para wakil rakyat terutama dirinya tidak serius memperjuangkan aspirasi mereka. Padahal dirinya sudah berusaha maksimal agar aspirasi masyarakat teruta-



ma yang memang prioritas bisa terealisasi. "Jadi saya simpulkan, tahun pertama saya sebagai anggota DPRD adalah tahun kegagalan. Saya tentunya berharap tahun-tahun berikutnya tidak lagi seperti ini," harapnya.

Lalu upaya atau kiat seperti apa yang akan atau sudah dilakukan oleh anak almarhum H Badar dan Hj Normah ini agar kegagalan di tahun pertama tidak terulang. Kata Aisyah, antara legislatif dan eksekutif harus bersinergi. Eksekutif tidak bisa main pangkas saja setiap usulan yang disampaikan, karena pada dasarnya usulan tersebut sudah melalui koridor resmi, yakni Musrenbang.

"Saya pernah sampaikan kepada Sekda selaku pimpinan TAPD, untuk turun langsung mengecek apakah usulan yang disampaikan itu benar atau tidak, prioritas untuk dikerjakan tahun sekarang atau belum. Harus ditata ulang, agar tidak ada masyarakat yang merasa terabaikan. Kami mengemban aspirasi, bukan kepentingan pribadi," sebutnya.

Agak aneh kata Aisyah, ketika dirinya masih sebagai kepala desa bisa mengusulkan bantuan untuk pembangunan masjid di kampungnya kepada anggota DPRD. Tapi ketika dirinya menjadi anggota DPRD, malah sulit merealisasikan itu. Kondisi yang ada benar-benar di luar harapan, dirinya bahkan berfikir lebih enak menjadi kepala desa, punya kewenangan untuk menentukan program pembangunan bersama masyarakat. Ketimbang menjadi dewan, tapi usulan terabaikan.

Sinergitas antara pemerintah dengan dewan memang tidak bisa diabaikan. Pertemuan antara dua lembaga ini sejatinya rutin dilakukan, tidak sebatas atau hanya saat hearing atau sedang membahas anggaran. Bisa jadi, dari rutinitas pertemuan itu bisa muncul berbagai pemikiran solutif terhadap berbagai persoalan yang

terjadi di tengah masyarakat. Mulai dari persoalan infrastruktur, peningkatan ekonomi, mengatasi anjloknya sejumlah harga-harga komoditi pertanian masyarakat dan lainnya.

Sudah sekian tahun harga karet anjlok, ribuan petani karet menjerit. Dan sekarang giliran petani sawit pula yang kewalahan, karena harga TBS juga terjun bebas. Sayangnya, tidak terlihat upaya pemerintah untuk ikut mengatasi persoalan ini.

Dana talangan yang pernah digembar-gemborkan, ternyata hanya pemanis wacana, karena sampai detik ini tidak pernah terealisasi. "Kalau sebatas wacana mengapa dihebohkan, seolah-olah pasti akan dilakukan untuk membantu masyarakat. Hal-hal seperti ini seharusnya dibicarakan, itulah mengapa saya katakan penting dilakukan pertemuan-pertemuan antara eksekutif dan legislatif, tidak hanya ketika hearing atau paripurna," sebut Aisyah.

Kendati di tahun pertama dirinya lebih banyak mengurut dada, tidak lantas politisi Golkar ini pasrah begitu saja. Target di tahun kedua, harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Kalaupun belum mampu memenuhi semua keinginan para pemberi amanah, sebagian saja juga tidak mengapa. Sesuai dengan visinya, pembangunan harus merata, baik itu infrastruktur jalan, listrik, air dan lainnya, juga pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan agama. Semoga....***

BIODATA

NAMA	: Hj. AISYAH
TEMPAT/TGL LAHIR	: Tenggayun, 17 Juli 1974
ALAMAT	: Rt.11 / Rw.06 Tenggayun
JENIS KELAMIN	: Perempuan
AGAMA	: Islam
NO.TELP/HP	: 0813 6537 2032
SUAMI	: ZUBARI, SS
Perkawinan tanggal/tahun/tempat	
ANAK	: Tiga orang 1. Rizka Oktariani 2. Rahmat Rizki 3. Muhammad Firman
AYAH	: H Badar (ALM)
IBU	: Hj Normah
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1. SDN Tenggayun 2. SMPN Api-api 3. SMAN 2 Bengkalis
RIWAYAT PEKERJAAN	: ● Kepala Desa Tenggayun ● Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)
RIWAYAT ORGANISASI	: ● Pengurus Koperasi ● Kader Perempuan Golkar



INDRAWAN
SUKMANA, ST



Menguji Kemampuan Profesional di Panggung Politik Melalui Politik Praktis

Sejak bergulirnya era reformasi 14 tahun silam banyak kaum profesional yang akhirnya tertarik dengan dunia politik. Meski boleh jadi, panggung itu nyaris tak pernah disentuh sebelumnya. Tapi nyatanya, tak sedikit pula dari mereka yang akhirnya mendedikasikan dirinya di panggung politik praktis.

Indrawan Sukmana, ST, satu dari salah satu di antaranya. Pasalnya, bagi Kandi demikian sapaan akrabnya, politik itu sebagai suatu wadah untuk bisa berbuat sesuatu memperjuangkan kehidupan orang lain, bangsa dan negara. Lantas ia pun menjatuhkan pilihannya ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Keterlibatannya di dunia politik praktis bermula pada tahun 2009 lalu dengan bergabung di Partai Golkar, ia pun ditunjuk sebagai wakil Sekretaris dan ditugasi sebagai Sekretaris kordinator Bidang Pendidikan dan Latihan. Dalam perhelatan Pemilu 2009, Indrawan pun maju sebagai calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Bengkalis dari dapil Bengkalis I (Kec. Bengkalis, Bantan, Rupert, Rupert Utara). Namun sayang, ia gagal melenggang ke kursi panas DPRD Kabupaten Bengkalis. "Tentu saja ini ada rencana Allah SWT yang sangat indah pada kegagalan saya di partai itu," ujar lulusan Fakultas Teknik Universitas Bung Hatta Padang ini.

Tapi memang ada hal yang menarik dan begitu membekas bagi putra ke lima dari enam bersaudara seorang pensiunan PNS, ketika ia maju dalam Pileg 2009 sejatinya ia tercatat sebagai Caleg dengan usia termuda dari 12 calon Golkar di Dapil Bengkalis satu dan orang baru dalam dunia politik dan mampu meraup suara dan berada pada urutan kelima perolehan suara terbanyak. Indrawan menganggap kegagalan menjadi anggota legislatif hanya berlangsung sementara dan memiliki keyakinan bahwa ada keberhasilan lain akan mudah bangkit dari kegagalan. Pileg 2009, ia mulai menata kembali kehidupannya dan mencoba bekerja lebih keras untuk meraih keberhasilan. Beliau memiliki kemampuan bangkit lebih cepat akan menerima kegagalan kemudian mencari penyebab kegagalan yang terjadi secara objektif dan melupakan kegagalannya tersebut menjadikannya pelajaran untuk meraih keberhasilan dikemudian hari. Akhirnya,



Lulus dari Fakultas Teknik Universitas Bung Hatta Padang 2002, di tahun 2011 mendapat beasiswa dari program BPPS Kementerian Pendidikan untuk menempuh pendidikan Magister di Universitas Andalas Padang. dengan tekad bulat beliau mengundurkan diri dari partai golkar dan bergabung ke Partai Gerindra. Lalu sejak awal 2011 ayah tiga anak ini diminta Prabowo untuk duduk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kab. Bengkalis ia mendapat tugas untuk mengembangkan Partai Gerindra di tanah kelahirannya. Memang, sejak kelahiran Partai Gerindra pada tahun 2008 lalu mengikuti Pemilu 2009 legislatif (pileg), Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis belum menjadi kekuatan apa apa dalam politik

Bengkalis karna pada Pileg 2009 Partai Gerindra belum mampu mendudukkan kadernya di DPRD Bengkalis. Tentu saja ini bukanlah persoalan yang mudah, namun dengan semangat juang dan pengalamannya serta kapasitasnya sebagai putra daerah Bengkalis, Indrawan menjadikan itu sesuatu kekuatan besar politik dalam menghadapi Pemilu 2014 mendatang. Akhirnya dengan kebulatan tekad untuk membesarkan Gerindra di Bengkalis pada bulan Agustus 2013 suami dari Dian Ista Tutih, SE ini mundur dari Politeknik Negeri Bengkalis sebagai Dosen dan maju kembali sebagai calon legislator pada Pileg 2014 di daerah pemilihan Bengkalis satu. Tak tanggung tanggung ia pasang target satu fraksi utuh dengan keterwakilan satu kursi di setiap dapil. Tentu saja, target ini terus ia sosialisasikan kepada kader Gerindra. Pasalnya kalau belum bisa menjadi kekuatan politik yang signifikan, maka sulit untuk melakukan perubahan, tapi kalau menjadi fraksi utuh, maka Gerindra akan lebih efektif untuk melakukan pengawaasan, legislasi dan budgeting. Di situlah apa yang menjadi manivesto Partai Gerindra bisa diperjuangkan dengan maksimal. Dengan semangat dan kerja keras mimpi Gerindra Bengkalis menjadi kenyataan walau perjuangan itu belum mendapatkan hasil maksimal dengan enam kursi tetapi Gerindra mampu menjadi satu Fraksi utuh dengan empat kader terbaik Gerindra duduk di DPRD Kab. Bengkalis.

Apa sebenarnya keinginan dari ayah Humairah, Syifa dan Maulana ini putar haluan ke dunia politik dari jalur akademisi? Yaitu adanya suatu keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, dengan mengikuti pencalonan antara lain adanya kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi, disertai penggunaan semua bakat, mencakup pemenuhan semua kualitas dan kapasitas seseorang. Penghargaan dibagi menjadi dua macam, yaitu penghargaan dari diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Dari mana ia memulai mencari aktualitas diri tersebut. Ia memulai dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Bengkalis melalui program-program pembangunan SDM berkualitas yang akan dituangkan dalam penyusunan APBD setiap tahunnya.

Mengapa harus pembangunan SDM yang diprioritaskan? Indrawan menjelaskan, pertama karena dia besar di lingkungan akademisi. Kedua, maju mundurnya sebuah negeri bergantung kepada SDM negeri tersebut. Pembangunan SDM tidak terlepas dari pendidikan, Semakin baik pendidikan seseorang maka akan semakin baik kehidupannya. "Dengan kata lain, yang dapat memutuskan mata rantai kemiskinan hanyalah pendidikan," ujar sekretaris Komisi III DPRD Bengkalis ini.

Ada satu hal yang menarik dari sosok Indrawan Sukmana ini, pengembangan diri sebagai seorang dosen selama ini beliau lebih banyak melakukan pengabdian pada masyarakat dengan kepeduliannya yang tinggi terhadap para pelaku usaha kecil menengah (UKM). Percaya atau tidak, sampai saat ini sudah ada sekitar 119 kelompok UKM yang ia bina. Mereka sebagian besar tersebar di Kecamatan Bengkalis dengan berbagai bidang usaha. Di matanya, UKM adalah entitas ekonomi yang berpotensi memberi keuntungan ekonomi dan pekerjaan bagi para pelakunya. Dari sisi potensinya, sektor usaha kecil memiliki prospek yang sangat baik. Hal ini merupakan sesuatu yang nyata, karena tidak sedikit perusahaan yang menjadi besar justru berawal dari usaha kecil. Beliau berharap pelaku-pelaku UKM ini, mendapatkan pendidikan nonformal bidang pengembangan usaha agar menjadi pelaku ekonomi yang memiliki SDM berkualitas dan cita cita pemerintah menjadikan masyarakat kita mandiri secara ekonomi akan terwujud. Inilah salah satu alasan beliau untuk duduk di Komisi III, dimana lebih banyak berhubungan dengan ekonomi dan seluruh beluk penganggaran. Dirinya sengaja memilih Komisi III karena di komisi inilah dirinya memperdalam persoalan-persoalan keuangan dan penganggaran di APBD. "Saya melihat masih banyak sumber-sumber pendapatan APBD Kabupaten Bengkalis belum tersentuh dan sumber pendapatan inilah yang akan kita jadikan modal dasar dalam pembangunan SDM ke depan," ujarnya.

Kedepan pembangunan SDM akan menitik beratkan Melalui pendidikan formal dan non formal. Pendidikan non formal bisa di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itulah pemerintah harus memenuhi hak setiap warga dalam memperoleh layanan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam

Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, ketahanan sektor ini juga sangat kuat. Hal ini juga sudah terbukti ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan 1997, sektor UKM dan tidak saja dapat bertahan diantara banyaknya usaha-usaha besar yang berguguran, tetapi justru menjadi penyelamat perekonomian nasional hingga tidak jatuh pada keadaan yang lebih parah.

Indrawan mencontohkan, saat ini banyak UKM-UKM di Kabupaten Bengkalis yang sudah lama ada dan sampai sekarang tetap eksis di tengah perekonomian negara yang gonjang ganjing. Hanya saja, perkembangannya belum sesuai harapan dimana produksi yang dihasilkan bersifat stagnan. Kalaupun meningkat, masih jauh dari harapan, apalagi untuk pangsa pasar luar negeri.

UKM-UKM itu menurut jebolan S-1 Universitas Bung Hatta Padang itu, sebenarnya bisa dikembangkan asalkan dibina secara berkelanjutan. Memang, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri melalui APBD sudah menganggarkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan SDM, maupun hasil produksi serta akses modal. Namun dirinya melihat apa yang diprogramkan Pemkab Bengkalis tidak bersifat kontinuitas dan lebih berorientasi pada penyerapan anggaran.

"Jadi tingkat keberhasilan program bukan pada hasil pembinaan, melainkan seberapa besar realisasi anggaran. Program itu pun kadang-kadang terputus dan UKM yang dibina hanya itu ke itu saja. Akibatnya, ya kita lihat UKM di Kabupaten Bengkalis seperti jalan di tempat," papar Indrawan.

Di atas kertas sebenarnya program Pemerintah sudah bagus. Misalnya diperkenalkannya program OVOP (One Village One Product). Namun realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. Pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas untuk merealisasikan program tersebut. Berdasarkan pertimbangan itulah, akhirnya dia bersama rekan-rekan yang seide, kemudian merangkul para UKM. Para UKM ini nantinya didorong untuk membentuk badan usaha resmi sehingga secara yuridis lebih mudah untuk mendapatkan akses bantuan serta lebih profesional.

UKM-UKM yang dibina itu menurut Indrawan bersifat selektif, hanya mereka yang serius saja yang dirangkul. "Saya katakan kepada mereka, kalau mau usahanya maju ayo dan makin besar gabung. Tapi kalau niatnya hanya ingin mendapatkan bantuan dana hibah, maaf mereka salah alamat," kata Indrawan.

Kepada para pemilik UKM, Indrawan selalu memberi motivasi kalau usaha mereka bisa lebih maju asalkan memiliki niat untuk itu. Dengan semakin majunya usaha, maka secara perlahan-lahan ekonomi akan meningkat. Kalau ekonomi meningkat, maka anak-anak bisa mendapatkan akses pendidikan yang jauh lebih baik. "Ujung-ujungnya tetap kita tekankan kepada pentingnya pendidikan," ujarnya.

Untuk mendorong para pelaku UKM agar lebih serius untuk meningkatkan produksinya, Indrawan mengatakan, ia bersama dengan rekan-rekan satu tim terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah. Sebagian besar persoalan yang dihadapi oleh para pelaku UKM adalah minimnya sentuhan teknologi serta akses pasar yang minim.

Sentuhan teknologi yang minim membuat produk yang dihasilkan terbatas dan lebih banyak energi yang terkuras. Terhadap persoalan ini, dirinya memperkenalkan teknologi-teknologi tepat guna yang secara finansial tidak terlalu mahal bila dibandingkan dengan produk yang dihasilkan. "Kalau soal akses pasar kita tekankan, mereka tidak perlu ragu. Kalau produk sudah dihasilkan nanti kita langsung yang akan menampung. Untuk keperluan ini, kita akan membuka galeri," kata Indrawan.

Satu hal yang terpenting, Indrawan mengatakan, setiap pelaku UKM harus konsentrasi pada satu produk yang dihasilkan, tidak perlu terpengaruh dengan produk-produk lain. Bahkan, sangat diharapkan, kegiatan yang dilakukan itu ditularkan ke kelompok-kelompok di sekitarnya secara bertahap. "Nanti jadinya seperti pusaran air, semakin keluar akan semakin banyak pelaku UKM yang melakukan kegiatan serupa. Saya yakin ini bisa berhasil, yang penting ada keseriusan dari mereka. Sementara saya, karena sudah duk di DPRD, juga akan membantu dari aspek pembiayaan nantinya melalui APBD, baik itu untuk bantuan teknologi tepat guna maupun pelatihan-pelatihan," ujarnya.***



BIODATA

NAMA : INDRAWAN SUKMANA, ST
TEMPAT/TGL LAHIR : Bengkalis, 27 April 1978
ALAMAT : Jalan Hangtuah No 007 Bengkalis
JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 0813 6539 7885

PERKAWINAN :
ISTRI : DIAN ISTATUTIH, SE
ANAK : Tiga orang
1. AZKA HUMAIRA ANAN DIKA
2. NADINDA RASYIFAH
3. MAULANA GHATAF MUBARAK
AYAH : H RIDWAN YAMUN
IBU : Hj KALSUM

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SDN 033 Pekanbaru (1986-1991)
2. SMPN 04 Pekanbaru (1991-1994)
3. SMAN 02 Pekanbaru (1994-1997)
4. S-1 Univ Bung Hatta Padang (1997-2002)

RIWAYAT PEKERJAAN : Dosen Politeknik Negeri Bengkalis (2004–2013)

RIWAYAT ORGANISASI : 1. Ketua HIMA Jurusan Teknik Mesin–UBH (2000)
2. Wakil Sekretaris DPD II Golkar Bengkalis (2009-2011)
3. Ketua DPC Gerindra Bengkalis (2011- sekarang)



Ir H SYAMSU
DALIMUNTHE



Membangun Harus Dilandasi Kebersamaan

Gayanya yang tenang, walau sesekali meledak merupakan ciri khas dari pria yang selalu mengenakan peci haji ini, baik ketika berada di tengah masyarakat maupun di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat. Meski bukan terlahir di Kabupaten Bengkalis, tetapi begitu menginjakkan kaki di Negeri Junjungan, rasa kepeduliannya ternyata sangat tinggi terhadap persoalan di sekitarnya, terutama masalah sosial kemasyarakatan.

Ikut mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif 2014, pria bernama lengkap Ir H Syamsu Dalimunthe ini mampu mendulang suara signifikan dari Daerah Pemilihan Mandau B, membawanya menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Di awal menjadi anggota DPRD Bengkalis, pria yang akrab dengan sapaan Syamda ini awalnya bergabung di Komisi III yang membidangi keuangan daerah. Namun kemudian hijrah ke Komisi I yang membidangi masalah pemerintahan dan hukum, termasuk diantaranya soal tenaga kerja. Belum setahun menjadi anggota dewan, Syamda sudah berada di dua komisi, tapi hal itu baginya bukanlah persoalan.

Perjalanan hidup seorang Syamda yang penuh liku-liku serta segudang pengalaman bekerja di berbagai perusahaan, membuatnya matang. Ditambah bekal pengalaman berorganisasi sejak memasuki bangku SMP hingga SMA. Dilahirkan di Labuhan Batu Sumatera Utara, Syamda akhirnya berlabuh di Kecamatan Mandau, tepatnya di Jalan Tegal Sari RT 02/RW 02 Desa Pematang Obo.

Menghabiskan masa pendidikan di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan dan Marbau, begitu pindah ke Kabupaten Bengkalis ia mampu beradaptasi dengan masyarakat di sekitarnya. Kepedulian terhadap masyarakat terutama persoalan sosial yang terjadi, menjadi cambuk bagi dirinya untuk berbuat agar masyarakat yang masih terpinggirkan bisa terangkat harkat dan martabatnya sebagai bahagian dari satu kesatuan masyarakat yang majemuk dalam kebhinekaan.

Di matanya, peran selaku anggota DPRD yang notabene merupakan representasi dari masyarakat yang diwakili, harus mampu menerjemahkan segala persoalan. Apa yang menjadi aspirasi rakyat tentu harus disalurkan, karena masyarakat adalah pemegang kedaulatan sepenuhnya dari proses politik dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.





"Pembangunan tidak akan berarti apa-apa, ketika masyarakat yang menjadi objek dari pembangunan itu sendiri tidak merasakan kontribusinya sama sekali. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat menjadi tanggungjawab dari pemangku kebijakan untuk menyalurkan melalui kebijakan program dan anggaran," ungkap pria yang pernah bekerja di PT Sinar Mas ini.

Dalam melaksanakan kewajibannya di tengah masyarakat, ayah empat anak ini lebih mengedepankan kebersamaan serta solidaritas dengan turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, maupun ke daerah lain sesuai kapasitasnya di lembaga wakil rakyat. Dengan kebersamaan, silaturahmi pasti terjalin sehingga peran selaku anggota DPRD bisa lebih maksimal.

Suami dari dr Safridawaty ini berpendapat, persoalan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan Mandau, masih jauh dari apa yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri. Desa-desa yang jauh dari jangkauan ibukota kecamatan, kondisinya masih memprihatinkan, infrastruktur belum memadai hampir disemua sektor, termasuk keadilan ekonomi yang belum dirasakan sepenuhnya.

Masyarakat di Mandau yang heterogen menurut Syamda, adalah potensi besar dalam membangun Bengkalis, karena di balik keberagaman itu tersimpan sumber daya ekonomi yang harus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah tanpa dukungan rakyat tidak ada artinya, demikian juga sebaliknya, rakyat tanpa pemerintahan ibarat sebuah kolonial.

Dalam kenyataan sehari-hari, kehidupan masyarakat di Kecamatan Mandau yang berada jauh dari Kota Duri tidak sepenuhnya sejahtera, sebagaimana digambarkan kalau Mandau adalah kecamatan kaya sebagai daerah penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia. Ketimpangan sosial antara desa dan kota masih terpampang di depan mata. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi Mandau adalah luasnya geografis dengan populasi penduduk melebihi 300 ribu jiwa.





"Mandau itu sudah sangat tidak layak hanya dipimpin seorang Camat, seorang Kapolsek dan seorang Danramil. Harus dilakukan pemekaran kecamatan, kelurahan dan desa-desa, karena ada desa atau kelurahan di Mandau ini yang penduduknya di atas 20 ribu jiwa. Itu mustahil bisa efektif dalam menjalankan pemerintahan di tingkat bawah," sebut pria berusia 49 tahun itu.

Barometer perekonomian di Kecamatan Mandau tidak hanya terpusat di Kota Duri saja, banyak kawasan pertumbuhan ekonomi yang lahir dari partisipatif masyarakat, bukan oleh pemerintah. Hal-hal seperti ini seharusnya menjadi catatan, bagaimana Pemerintah Daerah turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Mandau dengan menyiapkan infrastruktur memadai, mulai dari jalan poros antar desa dan ke ibukota kecamatan serta pasar-pasar yang representatif. Sarana pendidikan dan kesehatan yang layak untuk warga serta keberpihakan dalam hal administrasi kependudukan, patut menjadi catatan.

Persoalan Buruh

Menurut mantan Sekretaris Partai Nasdem Kecamatan Mandau ini, masyarakat Mandau bisa digolongkan pada klaster masyarakat pekerja. Mereka tidak hanya bekerja di industri hulu dan hilir perminyakan atau industri lainnya, tetapi juga di perkebunan-perkebunan serta pedagang. Namun nasib buruh di Mandau dan Kecamatan Pinggir belum diperhatikan dengan baik, padahal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sudah berkantor di Duri, sejak beberapa tahun lalu.

"Persoalan hak-hak buruh masih terabaikan. Seharusnya pemerintah berperan lebih aktif dalam mengatasi masalah buruh-buruh dan pekerja legal di Mandau. Hari ini masalah buruh dan tenaga kerja di Mandau masih seperti benang kusut yang sukar untuk diurai," ulas Syamda terkait masalah buruh yang masih terjadi di Mandau.

Dengan luas Kecamatan Mandau, 937, 47 kilometer persegi, terdiri dari 9 kelurahan dan 15 desa, masih perlu dimekarkan lagi setidaknya menjadi 20 desa dan 12- 15 kelurahan. Menurut klasifikasi desa seluruhnya

BIODATA

NAMA	: Ir H SYAMSU DALIMUNTHE
TEMPAT/TGL LAHIR	: Labuhan Batu, 29 Juni 1966
ALAMAT	: Jalan Tegal Sari RT 02 RW 02 Balai Makam Duri
JENIS KELAMIN	: Laki laki
AGAMA	: Islam
NO.TELP/HP	: 0765 560860 / 085265863301
ISTRI	: dr Safridawaty
ANAK	: Empat Orang 1. Filza rifqi Aufa Aslam 2. Dira Hamimi 3. Doli Difa Daifulah 4. Fadilul Fikri
AYAH	: H Nurdin Dalimunthe
IBU	: Hj Nurintah Ritonga
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1. SDN (1980) 2. SMPN (1983) 3. SPMAN (1990)
RIWAYAT PEKERJAAN	: - Asisten Agronomi Sosa (1990 -1993) - Asisten Agronomi Sinar Mas (1993- 1996) - Asisten Kepala Sinar Mas (1996-1999) - Estate Manager Sinar Mas (2000-2011)
RIWAYAT ORGANISASI	: ● Ketua OSIS SMPN Marbau (1981-1983) ● Ketua OSIS SPMAN Medan (1984-1986) ● Sekjen Ampi Marbau (1994-1996) ● Pembina FKM3 (2011-2013) ● Sekjen Nasdem Mandau (2012-2013)

merupakan desa swadaya. Contohnya desa atau kelurahan yang memiliki jumlah Rukun Tetangga (RT) yang terbanyak adalah Kelurahan Air Jamban sebanyak 115 RT dan Kelurahan Talang Mandi sebanyak 68 RT.

Dengan keberadaannya di Komisi I, ia bertekat mendorong pertumbuhan daerah-daerah di Mandau melalui proses pemekaran desa dan kelurahan. Karena sangat tidak masuk akal seorang kepala desa dan lurah membawahi lebih 50 RT, sehingga proses birokrasi maupun administrasi kependudukan menjadi rumit. Desa-desa yang berada jauh dari kota Duri, seperti Desa Kesumbo Ampai, Pematang Obo, Air Kulim, Buluh Manis, Bathin Betuah, Boncah Mahang, Pamesi dan Bathin Sebonga infrastrukturnya perlu dibenahi, mulai dari jalan-jalan desa, sekolah-sekolah, listrik, air bersih dan puskesmas pembantu.

Industri-industri yang beroperasi di Mandau memegang peranan penting dalam perekonomian kemasyarakatan. Menurut Syamda, angka yang tercatat menyebutkan, ada dua industri besar dan lima industri sedang beroperasi di wilayah Kecamatan Mandau. Sedangkan untuk industri kecil 96 unit dan industri mikro tumbuh sampai 200-an unit, selama kurun waktu beberapa tahun terakhir tahun.

"Selain itu, Mandau sebagai wilayah perlintasan antar provinsi dan antar kabupaten, harus memiliki sarana perdagangan dan akomodasi yang terbilang dalam jumlah yang relatif banyak dan kompetitif. Sebagai kecamatan besar yang beralokasi di daratan, Kecamatan Mandau memiliki infrastruktur jalan yang masih belum memadai. Panjang jalan yang ada mencapai 730 kilometer, dimana dalam kondisi baik 48 persen, sisanya sebanyak 26 persen kondisi sedang, 15 persen kondisi rusak, dan 8 persen dalam kondisi rusak berat," tambah alumni SPMAN ini.

Gambaran kondisi di atas menurut Syamda, merupakan suatu perjuangan panjang yang tak boleh kenal lelah dalam mewujudkannya. Selagi masih ada komitmen, kepercayaan dan kebersamaan, mustahil kemajuan daerah tidak bisa dicapai, tentu dengan tidak mengedepankan ego masing-masing.***

JOHAN WAHYUDI



Porsi Pembangunan Desa Kurang Adil

Ketimpangan antara desa dan kota masih melebar, dimana porsi pembangunan yang didapat desa-desa yang berada jauh dari keramaian kota, masih kurang adil selama ini. Situasi seperti itulah membuat pria yang dilahirkan di Bangku Jaya, Kabupaten Rokan Hilir ini termotivasi menerima saran dan usulan dari masyarakat tempat ia bermukim untuk turut maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2014.

Namanya di tengah masyarakat Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukitbatu, Kabupaten Bengkalis sangat dikenal luas. Karena sejak bertempat tinggal di sana ia membaktikan diri sebagai seorang guru honor atau guru bantu pada sebuah sekolah. Desa Bukit Kerikil sendiri berada cukup jauh dari pusat Kota Bengkalis maupun ibukota Kecamatan Bukitbatu, Sungai Pakning.

Johan Wahyudi begitu nama lengkapnya. Ia adalah satu dari tiga anggota DPRD Bengkalis yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), berhasil menduduki kursi parlemen periode 2014-2019. Meski tinggal di desa yang jauh dari jangkauan pusat pemerintahan, ia berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat Desa Bukit Kerikil maupun Kecamatan Bukitbatu-Siak Kecil menjadi penyambung aspirasi mereka.

Pria yang pernah menimba ilmu di Institut Teknologi Medan (ITM) ini mengungkapkan, setelah terpilih menjadi anggota DPRD Bengkalis, ia akan mensinergikan apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan porsi anggaran untuk pembangunan. Karena desa-desa yang jauh dari jangkauan pusat pemerintahan, harus ditumbuhkembangkan sebagai kawasan pertumbuhan baru sejalan dengan potensi yang dimiliki.

Infrastruktur Dasar

"Ketimpangan desa-desa pelosok dengan pusat-pusat kota kecamatan di Bengkalis ini masih lebar. Porsi pembangunan untuk desa di pelosok sejauh ini masih terasa kurang adil, karena orientasi pembangunan Bengkalis tertumpu di kota-kota kecamatan atau ibukota kabupaten," ungkap Johan Wahyudi memberikan pandangan tentang proses pembangunan yang berjalan di Bengkalis selama ini.

Diakuinya, pola pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Bengkalis sejak otonomi daerah





cukup mengecewakan, sehingga menimbulkan kesan ada kawasan yang dimarjinalkan dalam pembagian kue pembangunan. Salah satunya adalah Desa Bukit Kerikil, tempat ia tinggal selama ini masih dianggap terbelakang karena minimnya infrastruktur, padahal memiliki potensi ekonomi yang luar biasa.

Di Bukit Kerikil ujar ayah satu anak ini, akses jalan sangat tidak memadai. Tidak ada jalan poros dari Bukit Kerikil menuju ibukota Kecamatan Bukit Batu, Sungai Pakning. Untuk ke Sungai Pakning atau ke Pulau Bengkalis masyarakat di sana harus terlebih dahulu berputar melewati Kota Dumai dengan jarak tempuh yang sangat jauh serta beban biaya transportasi yang cukup besar. Ia berharap, sekiranya proyek jalan poros Duri-Sungai Pakning dengan sistem multiyears dikerjakan, kelak bisa dibangun jalan poros dari Bukit Kerikil yang tembus ke jalan Duri-Pakning.

Masalah lain menurut Johan yang masih menyelimuti Bukit Kerikil adalah persoalan listrik yang belum merata ke rumah-rumah masyarakat, jalan-jalan desa yang masih tanah, sarana sekolah yang tidak maksimal dan kurangnya tenaga pengajar serta ketersediaan tenaga medis.

Potensi Perkebunan

Di sisi lain, Bukit Kerikil memiliki potensi di sektor perkebunan. Terhampar belasan ribu hektar kebun kelapa sawit yang menghasilkan 8 sampai 10 ribu ton tandan buah segar (TBS) setiap bulannya. Ia berharap potensi ekonomi yang cukup bagus tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pembenahan infrastruktur di desa ini. Karena kesejahteraan masyarakat berkaitan erat antara ketersediaan infrastruktur dengan potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya.

"Ke depan kita sangat berharap Pemkab Bengkalis mampu mensinergikan pembangunan antara desa dengan kota. Tentu saja dengan memberikan porsi pembangunan kepada desa-desa pelosok sesuai dengan kebutuhan dasar, supaya hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat di Kabupaten Bengkalis ini," sebut pria yang sudah bermukim di Bukit Kerikil sejak tahun 1999.

Johan merupakan Wakil Ketua Komisi III yang membidangi masalah keuangan daerah, perekonomian dan badan usaha milik daerah (BUMD). Berbicara soal kapasitas dan sudut pandangnya sebagai anggota Komisi III, ia menilai masih sangat banyak potensi yang bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang belum digarap, selain hanya mengandalkan sektor dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat.





Ditekankannya, harus ada strategi dan design khusus dari pengambil kebijakan, apakah itu eksekutif dan legislatif untuk menggarap sektor-sektor yang berpotensi mendatangkan PAD. Di matanya, Bengkalis tidak bisa bertumpu selamanya dari dana bagi hasil (DBH) khususnya minyak dan gas bumi (Migas). Sebab, suatu waktu pasti akan habis. Untuk menggali sektor-sektor yang berpotensi mendatangkan PAD tentu saja harus dibuat payung hukumnya terlebih dahulu berupa Peraturan Daerah (Perda).

"Sejak otonomi daerah ini, daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam dari sektor pertambangan lebih mengandalkan DBH. Pejabat di daerah terkesan malas menggali sektor PAD yang sebenarnya sangat banyak. Padahal DBH itu dipastikan tidak akan bertahan lama, karena yang dikeruk adalah sumber daya alam yang suatu hari nanti pasti akan habis dan anak cucu kita tak punya apa-apa lagi nantinya," papar Johan mengingatkan.

Hal lain yang menjadi sorotannya adalah keberadaan koperasi-koperasi di seluruh Kabupaten Bengkalis yang mayoritasnya tidak eksis. Koperasi dalam pandangannya adalah soko guru dalam pembangunan dan merupakan lembaga penopang ekonomi kerakyatan dengan basis masyarakat sendiri sebagai pelakunya. Malahan sampai sekarang berapa jumlah koperasi di seluruh Bengkalis tidak diketahui secara pasti, karena tidak ada pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan dari pihak terkait.

Demikian juga halnya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Padahal setiap tahun dikururkan dana ratusan miliar dari APBD Bengkalis untuk program yang bernama Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai modal usaha. Akan tapi di desa-desa nyaris tidak ada muncul pelaku UMKM yang eksis sebagai output dari program UED-SP tersebut.

Terkait keberadaan dua BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan PT Bumi Laksamana Jaya

(BLJ), ia menilai kedua BUMD itu masih belum mandiri, selalu menyusu ke APBD dan melahirkan masalah. Seharusnya kedua BUMD itu sudah berkontribusi kepada daerah, bukan terus menyusu. Malahan disebutkan PT BLJ itu dari dahulu tidak pernah sehat-sehat.

"Pemerintah Daerah selaku pemegang saham jangan lagi menjadikan BUMD tersebut sebagai sapi perahan atau tempat membagi-bagi dana APBD. PDAM dituntut meningkatkan pelayanan, minimal setiap tahun ada ribuan pelanggan baru. Tiap tahun disubsidi, tapi tak ada perkembangan. PT BLJ itu harus di-restrukturisasi, kalau tak bisa juga diamputasi saja daripada menjadi benalu terus," kata Johan sembari mengkritik kelemahan dan persoalan yang terjadi di kedua BUMD itu justru berawal dari pengambil kebijakan.

Harapannya, seluruh stakeholder yang ada di parlemen mampu saling bekerjasama dalam menyikapi persoalan yang ada, tanpa lagi berpikir kepentingan politik tertentu. Harus ada grand design ke depan, porsi pembangunan lebih merata, sehingga Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari desa sampai tingkat kabupaten, bukan sebatas agenda seremonial tahunan semata, yang tidak memberikan apa-apa kepada proses pembangunan itu sendiri maupun masyarakat selaku objek pembangunan.

"Sebagai lembaga yang memiliki hak pengawasan, legislasi dan budgetting, DPRD harus berupaya mensinergikan semua kebutuhan itu. Tak ada lagi kepentingan individual atau kelompok, semua kebijakan harus bermuara untuk kepentingan masyarakat luas," tambah pria yang tergabung dalam Fraksi PDI Perjuangan Restorasi ini. ***

BIODATA

NAMA	: JOHAN WAHYUDI
TEMPAT/TGL LAHIR	: Bangko Jaya, 15 September 1979
ALAMAT	: Jalan Banjaran RT/RW 01/05 Desa Muara Basung
JENIS KELAMIN	: Laki-laki
AGAMA	: Islam
NO Telp/HP	:
ISTERI	: Susi Indrawani
ANAK	: Satu Orang
	1. Habib Harun Alrasyid
AYAH	: Ruslan
IBU	: Basiyem
RIWAYAT PENDIDIKAN	: ● SDN 28 Bangku Jaya, Rohil ● SMP Budi Jaya, Rohil ● SMK Bina Bersaudara Medan ● Institut Teknologi Medan (tidak selesai)
RIWAYAT PEKERJAAN	: 1. Guru Bantu 2. Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)
RIWAYAT ORGANISASI	: Partai Nasional Demokrat (Nasdem)



DAUD GULTOM, MTh



Jadi Politisi untuk Melayani Umat

Anggota DPRD Kabupten Bengkalis periode 2009-2014 dan 2014-2019 ini mengaku memberi perhatian khusus terhadap tiga sektor pembangunan di kawasan yang masuk di daerah pemilihannya, Kecamatan Pinggir. Ketiga sektor dimaksud adalah pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Pada pembangunan sektor kesehatan, menurut pria kelahiran Samosir, Sumatera Utara ini, bentuk perhatian yang diberikan adalah dengan mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendirikan unit pelayanan kesehatan minimal Puskesmas Pembantu di setiap desa.

"Bagi desa-desa yang telah memiliki puskesmas, kita dorong agar setatusnya ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap," ujar pria kelahiran 9 November 1967 ini.

Menurut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, dirinya sering tidak sampai hati melihat begitu susahny sebagian masyarakat untuk mendapatkan jasa pelayan kesehatan yang dibutuhkan. Bukan hanya dihadang keterbatasan biaya, kondisi ini makin diparahkan rentang kendali yang sangat jauh antara pemukiman penduduk dengan unit pelayanan kesehatan terdekat.

"Yang repot tentu saja bila ada anggota masyarakat yang dihadapkan dengan penyakit berat yang membutuhkan penanganan medis segera," ujar suami dari Rospita SPAK ini.

Ia mencontohkan warga yang bermukim di Desa Melibur, Kecamatan Pinggir, mereka harus menempuh perjalanan darat sekitar 75 km untuk menuju unit pelayanan kesehatan terdekat di Sebang dengan kondisi jalan yang cukup parah. Berkaca dengan kondisi itu, bapak lima anak ini menilai di Desa Melibur sangat untuk mendesak dibangun sebuah unit pelayanan kesehatan masyarakat.

Di sektor pendidikan, ia bersama rekan sedapil akan memperjuangkan pembangunan sekolah-sekolah baru, terutama untuk jenjang pendidikan tingkat SLTP dan SLTA. "Kita berharap, anak-anak yang menyelesaikan pendidikanya di tingkat SLTP dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, tidak perlu ke luar dari Kecamatan Pinggir lagi," ujar Daud.

Wujud perhatian dan perjuangan lainnya di sektor pendidikan adalah memperhatikan tingkat kesejah-





teraan para guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun tenaga honorer. "Kita ingin mereka mendapat insentif yang layak sehingga pikiran mereka tidak menjadi terbagi antara tugas mengajar dengan upaya mencari penghasilan tambahan lantaran gaji yang diterimanya tidak memadai," kata Daud.

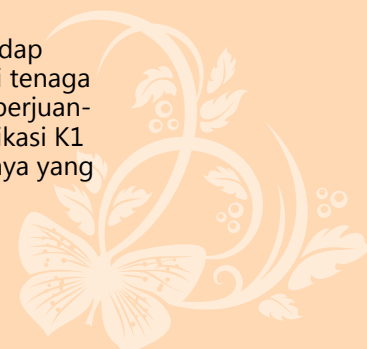
Dalam pandangan Daud, upaya membantu para guru melalui insentif yang dianggarkan di APBD Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya, sudah mampu mendorong tingkat kesejahteraan para tenaga pendidik di daerah ini. "Saya menilai, penerimaan guru setiap bulannya yang berasal berbagi sumber sudah bisa mengantarkan perekonomian mereka ke tingkat sejahtera," sebut Daud.

Hanya saja yang masih mengganjal, sambung Daud, dana insentif yang masih diterima para guru tiga bulan sekali bahkan lebih. "Kita sudah mendesak Pemkab Bengkalis agar dana insentif itu diberikan kepada para guru secara teratur tiap bulannya. Tujuannya, agar para guru bisa memenej dengan baik keuangan keluarganya," ujarnya.

Daud bersama para koleganya di DPRD Kabupaten Bengkalis juga mengaku melakukan langkah-langkah maksimal untuk memperjuangkan sertifikasi guru bagi yang dinilai telah memenuhi syarat untuk itu. Dikatakan, sertifikasi bukan saja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tapi lebih penting lagi diharapkan guru-guru yang mengajar sudah memenuhi kualifikasi yang disyaratkan.

"Ini erat kaitannya dengan tujuan pendidikan untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas ke depan. Hanya di bawah bimbingan guru yang memenuhi kualifikasilah bisa diciptakan SDM Kabupaten Bengkalis yang andal," bebernya pria yang pernah mengabdikan dirinya sebagai pendeta sejak tahun 1991-2008.

Perhatian tidak hanya diberikan Daud dan para koleganya di DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap para guru yang menyandang status sebagai PNS. Kepada para guru yang masih berstatus sebagai tenaga honorer, juga diberikan perhatian. "Di priode pertama, Kami sudah beberapa kali ke Jakarta memperjuangkan tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS. Terutama untuk tenaga honorer dengan klasifikasi K1 dan K2, sebagian besar mereka sudah pantas diangkat menjadi PNS bila ditilik masa pengabdian yang





sudah terbilang cukup lama. Bahkan ada tenaga honorer yang mengabdikan lebih dari 10 tahun. Dan ini akan kita perjuangkan terus,” ujar Daud.

Banyak Kesamaan

Memang kita tidak bisa memperkirakan atau memprediksi jalan hidup dan nasib seseorang. Tidak juga seorang Daud Gultom. Lahir di tengah keluarga yang agamis di Samosir, Sumatera Utara, tidak pernah terpikir olehnya terjun ke dunia politik, untuk kemudian duduk sebagai anggota dewan.

Apalagi dengan bekal sarjana teologi yang dipersiapkan oleh keluarganya untuk mengikuti jejak kedua orangtuanya menjadi pelayan umat nasrani alias menjadi pendeta. Bahkan pekerjaan itu sudah dilakoni sebelum terjun ke politik, yang kemudian mengantarkannya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

“Karena ayah saya pendeta, cita-cita saya dulu hanya ingin meneruskan pekerjaan beliau,” katanya. Apa yang mendorongnya terjun ke dunia politik? Menurut Daud, ia ingin berperan mengubah Kabupaten Bengkalis ke arah yang lebih baik melalui dunia politik atau menjadi anggota dewan. Karena dengan cara itulah niat tersebut bisa diwujudkan untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak. Diakui Daud, kendati sejak kecil ia tidak pernah bercita-cita menjadi politisi, tapi realitas yang saban hari ia temui di masyarakat, membuat hati nuraninya kemudian terdorong untuk terjun ke dunia ini. Sebab, dengan terjun ke dunia politiklah bisa terlibat secara langsung dalam proses-proses pengambilan keputusan penting dan strategis untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Bagaimana dengan pandangan miring sebagian kalangan terhadap dunia politik praktis. Daud menjelaskan bahwa semua itu sangat tergantung masing-masing individu yang duduk di lembaga perwakilan rakyat itu. “Tidak baik menggeneralisir masalah. Perilaku yang tidak baik diperbuat sejumlah oknum legislator bukan gambaran umum dari legislator keseluruhan,” ujar suami dari Rospita SPAK ini.

Ia menilai antara lembaga legislatif dengan dunia kependetaan yang pernah ia geluti, memiliki banyak kesamaan. Antara lain, sama-sama bertugas melayani umat, kendati melalui jalan yang berbeda. “Menjadi pendeta melayani umat dengan mengajarkan nilai-nilai agama, sementara di lembaga legislatif memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Meski tidak lagi menyandang status pendeta sejak terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2009, Daud tetap ingin terus melayani umat melalui jalur politik yang telah menjadi pilihan hidupnya. “Hanya jalannya saja yang berbeda, tapi niat saya tetap ingin melayani umat,” ujarnya. ***

BIODATA

Nama Lengkap	: DAUD GULTOM, MTh
Tempat/Tgl Lahir	: Samosir, 9 November 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen
Istri	: Rospita SPAK
Anak-anak	: Lima Orang 1. Debora 2. Eunike 3. Yonatan 4. Yenima 5. Kevin
Riwayat Pendidikan	: ● SDN Tanah Jawa (1980) ● SMP Tanah Jawa (1980) ● STM Pematang Siantar (1986) ● Perguruan Tinggi Surakarta (1993)
Riwayat Pekerjaan	: - Pendeta (1991-2008) - Anggota DPRD Bengkalis (2009-2014) - Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)



PIPIT LESTARY, SPd



Rela Mengundurkan Diri dari CPNS

Menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan dambaan bagi hampir setiap orang. Paling tidak, dengan status PNS, seseorang tidak perlu lagi memikirkan bagaimana harus mendapatkan uang. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Pipit Lestary, SPd. Ketika orang sangat mengharapkan bisa menjadi PNS, justru perempuan murah senyum ini mengundurkan diri sebagai CPNS. Ia lebih memilih untuk keluar dari zona nyaman dan "mempertaruhkan" hidupnya di dunia politik, dunia yang sama sekali baru dan penuh lika liku.

"Status saya waktu itu, sebagai guru honor di SMPN 5 Kecamatan Pinggir. Pada saat ada pengangkatan guru honor sebagai PNS, nama saya masuk dalam database untuk katagori K-2. Namun, pada saat bersamaan, saya juga ikut dalam Pemilu legislatif. Karena CPNS tidak boleh berpolitik, maka saya memilih untuk mengundurkan diri sebagai CPNS," kenang Pipit.

Diceritakan, ia lebih memilih untuk mengundurkan diri sebagai CPNS bukan karena status CPNS tidak bisa menjamin kesejahteraan dalam hidup. Justru dengan kondisi sekarang setelah diberlakukannya otonomi daerah, kehidupan PNS jauh lebih baik.

"Kalau dibilang berat (mengundurkan diri dari CPNS) ya berat juga. Namun, keputusan ini harus saya lakukan karena ada persoalan besar di tengah-tengah masyarakat dan tak mungkin bisa saya perjuangkan hanya dengan status PNS," ujarnya.

Pipit mencontohkan, di daerah tempat ia tinggal, akses jalan masih sulit. Satu-satunya jalan yang dijadikan akses utama masyarakat untuk aktifitas sehari-hari mulai dari pendidikan hingga ekonomi adalah jalan perusahaan dengan kondisi berlumpur saat hujan dan berdebu saat kemarau. Sialang Rimbun, nama jalan tersebut hampir tidak bisa dilalui mobil-mobil yang ingin memasarkan hasil panen sawit. Sementara sebagian besar masyarakat di sana, berprofesi sebagai petani sawit.

Dirinya terkenal sekitar tahun 2012 dimana para petani sawit tidak bisa memasarkan hasil perkebunan sawitnya karena jalan Sialang Rimbun sepanjang 15 KM rusak parah. Saat itu, dirinya berpikir keras untuk mencari solusi mengatasi persoalan tersebut.

"Dalam pikiran saya, sulit rasanya untuk bisa berharap kepada Pemerintah Daerah, ke perusahaan apa lagi. Dari sini lah kemudian timbul ide dari saya bagaimana kalau para petani sawit yang ada menyumbang untuk perbaikan jalan. Ternyata ide saya itu diterima dan waktu itu terkumpul sekitar Rp245 juta. Dana itulah yang dipergunakan untuk



memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak parah,” papar Pipit.

Desakan Masyarakat

Entah mengapa, sejak saat itu, banyak masyarakat yang menginginkan dirinya agar mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Ia sendiri tetap tak tertarik karena ia sama sekali buta dengan politik. Terlebih waktu itu ia sudah menjadi guru honor dan berusaha mengabdikan diri kepada dunia pendidikan, sesuai disiplin ilmu yang didapatnya di bangku kuliah.

Namun, desakan yang kuat dari masyarakat dengan berbagai argumen yang masuk akal membuat hatinya luluh. Masyarakat menggantungkan harapan yang besar kepada dirinya, bahwa kalau ia duduk sebagai anggota dewan, maka akan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan maupun sarana dan prasarana lainnya.

“Jujur, adanya harapan masyarakat tersebut merupakan salah satu motivasi saya untuk berjuang melalui jalur politik sebagai anggota dewan. Ditambah pula dengan dukungan suami, tidak ada alasan lagi bagi saya saat itu, untuk menjajal dunia politik,” kata Pipit.

Setelah melalui pergolakan batin yang cukup lama, dengan nawaitu semata-mata untuk masyarakat, akhirnya Ia menerima tawaran dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk ikut pada bursa calon legislatif (caleg) tahun 2013, guna persiapan pemilu legislatif tahun 2014. “Dengan dukungan dari suami, saya menerima tawaran dari Partai Nasdem agar mencalonkan diri dari partai tersebut untuk Pemilu Legislatif tahun 2014,” ujarnya.

Bulan April 2014 merupakan hari bersejarah sebagai tonggak awal dirinya berjuang di dunia politik. Pada bulan tersebut, berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Partai Nasdem mendapat jatah satu kursi dari daerah pemilihan Pinggir dan yang berhak duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis dari Partai Nasdem itu adalah dirinya, yang memperoleh suara terbanyak dari seluruh caleg Partai Nasdem untuk wilayah Pinggir.

“Tuhan memberikan saya jalan terbaik yaitu menjadi wakil rakyat di Kabupaten Bengkalis. Padahal sejak kecil saya tak pernah bercita-cita menjadi anggota dewan atau seorang politisi,” cerita Pipit tentang perjalanannya menjadi anggota dewan.

Dalam kacamata tamatan Universitas Negeri Medan (UNM) ini, setelah terpilih sebagai wakil rakyat, ia bertekad harus mengabdikan dan berbuat untuk kemaslahatan orang banyak. Keinginannya untuk memajukan dunia pendidikan, memperbaiki nasib guru serta pembenahan sarana belajar mengajar menjadi prioritas perjuangan di parlemen. Apalagi Pipit, berada di komisi IV yang membidangi soal kesejahteraan rakyat, termasuk urusan dunia pendidikan.

Dipaparkan ibu tiga anak ini, masih banyak persoalan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis menyangkut dunia pendidikan. Mulai dari persoalan sekolah-sekolah yang kurang layak dijadikan tempat belajar mengajar, honor guru non PNS yang masih rendah, serta infrastruktur pendukung seperti jalan menuju sekolah-sekolah di pelosok seperti di kecamatan Pinggir yang belum tersentuh derap pembangunan.

Oleh sebab itu Pipit berharap ada kebijakan atau political will dari stakeholder di Bengkalis untuk lebih meningkatkan honor guru non PNS, khususnya mereka yang mengajar di pelosok-pelosok. Seperti diketahui di Kecamatan Pinggir mayoritas desa-desa di sana berada jauh dari pusat kota kecamatan yang sulit dijangkau serta minimnya sarana transportasi ke pedesaan di kecamatan tersebut.

Selain itu, sambung perempuan berkerudung yang dilahirkan di Sumatera Utara ini, masih maraknya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap orang tua murid patut menjadi catatan. Padahal 20 persen dari APBD Bengkalis setiap tahun dialokasikan untuk sektor pendidikan, dengan rata-rata pertahun dana APBD yang diserap untuk pendidikan di Bengkalis mendekati angka Rp1 triliun, tidak boleh lagi ada pungutan atau apapun namanya yang membebani orang tua murid.

“Dunia pendidikan di Bengkalis masih perlu banyak pembenahan. Memajukan dunia pendidikan bukan sebatas hitungan besaran alokasi APBD untuk sektor tersebut, tetapi adalah bagaimana memanfaatkan besaran anggaran tersebut untuk kemajuan dunia pendidikan. Jangan hanya orientasi anggaran itu kepada proyek-proyek semata,” sentil Pipit.

Kerisauannya terhadap dunia pendidikan sangat wajar, karena basicnya adalah seorang sarjana kejuruan yang kemudian mengabdikan diri menjadi guru honor di Kecamatan Pinggir. Sejumlah persoalan yang masih menghadang para guru juga disebutkan, seperti keberadaan guru komite yang telah lama mengabdikan perlu diberi perhatian khusus. Juga guru-guru PNS sekarang ini lebih banyak menumpuk di perkotaan, sehingga penyebaran tenaga pengajar itu tidak merata di kabupaten Bengkalis. Hal itu disebabkan ada ruang untuk berkolusi dalam menentukan dimana hendak



mengajar.

Selain dunia pendidikan, Pipit juga menyoroti sektor kesehatan di Kecamatan Pinggir. Di Pinggir ada 19 desa yang tersebar di wilayah seluas 2.500 kilometer persegi itu, lebih setengah dari desa-desa di Pinggir sulit dijangkau karena lokasinya yang jauh dari ibukota kecamatan. Di beberapa desa diakuinya memang sudah ada Puskesmas pembantu, selain Puskesmas induk di desa Pinggir dan Muara Basung. Akan tetapi masih sangat banyak lagi desa-desa di pelosok yang belum memiliki Puskesmas pembantu sehingga masyarakat kesulitan pergi berobat.

Kondisi geografis yang luas itu ditambah lagi dengan keberadaan tenaga medis yang tidak merata, misalnya bidan desa yang tidak tinggal di desa tempat mereka bertugas. Bidan desa terutama bidan PTT dituntut bekerja sepenuh hati, mengabdikan diri mereka untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Saya melihat, kurangnya kesadaran dari bidan desa PTT atau tenaga medis yang dipekerjakan di Puskesmas Pembantu dalam melayani masyarakat di sejumlah desa di kecamatan Pinggir ini. Mereka hanya sebatas melaksanakan tugas pada saat jam kerja, padahal mereka seharusnya tinggal di tempat mereka bertugas, sehingga pelayanan kepada warga dapat maksimal," saran Pipit.

Selain itu, soal program BPJS yang digulirkan Pemerintah Pusat, ia juga mengaku heran karena tidak berjalan maksimal dan dirinya banyak mendapat keluhan dari warga. Minimnya sosialisasi ke masyarakat membuat masyarakat tidak tahu harus bagaimana untuk mengurus BPJS tersebut. Sementara aparat yang ditugasi untuk melayani masyarakat untuk program BPJS minim turun ke masyarakat, sehingga tidak semua masyarakat yang tersentuh program tersebut.

Masih soal kesehatan, satu hal lagi yang tak kalah pentingnya adalah soal sanitasi. Di daerah tempat tinggalnya, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari masih sangat sulit karena PDAM belum ada. Sebagian besar warga memanfaatkan air tadah hujan untuk mandi, masak dan mencuci. "Air tanah pun tak bisa dimanfaatkan, kalau kita bor airnya bercampur dengan gas," kata Pipit.

Untuk itu, dengan statusnya sebagai anggota dewan, maka dirinya akan memperjuangkan agar air bersih di Kecamatan Pinggir umumnya dan di Muara Basung khususnya, bisa tersedia dengan mudah.

Disinggung tentang motivasinya sebagai wakil rakyat, Pipit mengaku menjadi anggota dewan merupakan tantangan baru dalam hidupnya. Tapi ia optimis dapat melakoni peran selaku wakil rakyat tersebut dengan menjaga amanah dan kepercayaan dari publik yang telah mempercayai dirinya untuk duduk mewakili mereka. Karena dimantanya menjadi anggota dewan bukan jabatan seumur hidup, tapi adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri bagi kepentingan daerah dan masyarakat.

Bahkan perempuan 36 tahun itu berpendapat, menjadi anggota dewan bukan harus gagah-gagahan. Yang terpenting bagaimana mengimplementasikan maksud dan tujuan sejalan dengan kebijakan partai serta mekanisme perundang-undangan yang berlaku dalam menyerap aspirasi rakyat. Yang penting seorang anggota dewan harus taat kepada aturan, tidak semena-mena dan mampu menjabarkan segala persoalan yang terjadi dengan kepala dingin,

mengedepankan musyawarah.

"Dalam menjalankan tugas di DPRD saya disupport sepenuhnya oleh suami dan keluarga. Suami memberi saya kepercayaan untuk menjalankan amanah dan tugas sebagai anggota dewan. Sehingga dalam melaksanakan tugas di DPRD Bengkalis saya tidak pernah merasa terbebani atau tertekan secara pribadi, tapi saya risau ketika ada persoalan yang menyangkut masyarakat tidak kunjung tuntas diselesaikan atau ditemukan solusinya," ujar Pipit.

Sebagai orang baru di DPRD Bengkalis, ia juga mengaku tidak kaku menghadapi situasi dan dinamika yang terjadi di kantor wakil rakyat tersebut. Dirinya sudah terbiasa menghadapi orang banyak, mulai dari murid-muridnya hingga orang tua murid serta berbaaur dengan masyarakat disekitar tempat tinggalnya di desa Muara Basung. ***

BIODATA

NAMA	: PIPIT LESTARY, S,Pd
TEMPAT/TGL LAHIR	: Sibunga-bunga, 02 Juni 1979
ALAMAT	: Jalan Banjaran RT/RW 01/05 Desa Muara Basung
JENIS KELAMIN	: Perempuan
AGAMA	: Islam
NO TELP/HP	: 0812 6434 548
SUAMI	: Mahmudin Purba
ANAK	: Tiga orang 1. Cantika Sayyidina Mupid Br Purba 2. Chintya Saharani Mupid Br Purba 3. Cahaya Azizah Mupid Br Purba
AYAH	: Karsyo
IBU	: Nursarah
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1. SDN 094147 Permonangan (1991) 2. SMPN 1 Tiga Balata (1994) 3. SMAN 1 Siantar (1997) 4. Universitas Negeri Medan (2003)
RIWAYAT PEKERJAAN	: 1. Guru Honor SMP Negeri 5 Pinggir 2. Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)
RIWAYAT ORGANISASI	: 1. Himpunan Mahasiswa Islam



RIANTO



Buang Ego, Bangun Sinergisitas

Berhenti dari kepala desa kendati masih menyisakan masa jabatan 1,8 bulan, rasa-rasanya bukan sebuah keputusan mudah. Apalagi berhenti tanpa meninggalkan jejak luka di tengah masyarakat. Bukan hanya sebuah keputusan yang tidak mudah, tapi juga berani dan nekat. Pasalnya, jalur yang dipilih untuk karier selanjutnya adalah menjadi anggota DPRD. Sebuah spekulasi nekat, karena harus bertarung dengan puluhan bahkan ratusan calon lain untuk memperebutkan jabatan itu. Artinya, sama sekali tidak ada jaminan bisa terpilih.

Ya, hidup memang penuh spekulasi, tapi harus tetap dengan perhitungan matang. Begitu kata Ketua Harian Ikatan Keluarga Jawa Riau (IKJR) Kecamatan Mandau, Riantoyang kini duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis periode 2014-2019. Jika dipikir-pikir, sayang meninggalkan jabatan kepala desa di era sekarang ini. Bukan hanya soal besarnya wewenang dan adanya wilayah kekuasaan, anggaran yang diplot untuk desa juga tidak sedikit. Ada dana ADD, UED/SP, Inbup-PPIP dan lainnya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terutama di desa yang dipimpin.

Cara pandang ayah Tasya Anjasmara dan Harry Murtinotonegoro ini ternyata jauh melampaui itu. Tidak hanya berpikir untuk kemajuan masyarakat Desa Petani, Kecamatan Mandau yang dipimpinnya kala itu, tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas lagi. "Saya ingin pengabdian yang saya berikan tidak sebatas untuk masyarakat Desa Petani, tapi jauh lebih luas dari itu. Saya ingin berkontribusi lebih besar untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis," sebut poitisi PAN ini.

Keinginan terjun di kancah politik yang levelnya lebih tinggi memang muncul dari pribadinya. Keinginan itu kemudian mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat Desa Petani, terlebih selama ini belum ada satu orangpun warga Desa Petani yang duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis.

Kendati begitu, dirinya tetap harus meyakinkan keluarga, istri dan kedua orang tuanya. Diakui, dari pihak keluarga terutama istri dan kedua orang tuanya, sempat ragu atas keputusannya tersebut. Namun kemudian mereka bisa mendukung setelah menerima alasan-alasan yang disampaikan suami Rismawaty ini.





"Wajar kalau pihak keluarga ada yang kurang sependapat, selain jabatan Kades masih lama, pilihan saya ini juga tidak lantas saya peroleh, harus berjuang terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah, keluarga akhirnya sepakat dan mendukung saya," sebut pria kelahiran Purwosari 1977 silam.

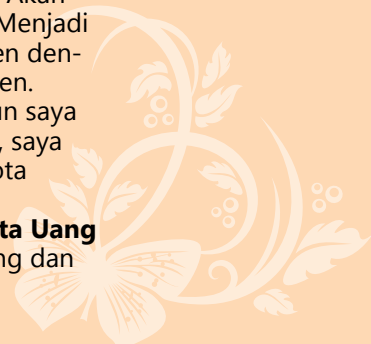
Rianto menjatuhkan pilihan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menerajut impiannya. Baginya, partai besutan Prof Amin Rais itu cocok dengan semangat dan idealisme dirinya. Hasilnya, pada Pemilu Legislatif 2014 mengantarkan dirinya bersama kader PAN yan lain, Andriyan Prama Putra dan Saiful Ardi dari Dapil Mandau.

Beda di awal dirinya duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis, ternyata jauh berbeda dengan jabatan yang pernah dipegangnya saat menjadi kepala desa. Menjadi kepala desa adalah top manajer. Akan berhasil apabila mampu memenej Pemerintahan Desa, merangkul semua komponen masyarakat. Menjadi anggota DPRD ternyata memang tidak semudah apa yang dibayangkan, seringkali beradu argumen dengan pemerintah bahkan rekan sejawat untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi konstituen.

"Kalau dibilang agak kaget, ya kaget jugalah. Tapi saya sudah punya modal dasar ketika 4 tahun saya menjadi kepala desa. Untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi saya sebagai anggota DPRD, saya harus banyak belajar, bertanya dan membaca. Alhamdulillah di tahun pertama saya sebagai anggota DPRD, saya tidak begitu kewalahan bahkan saya dipercaya sebagai Ketua Komisi III," papar Rianto.

Dua Sisi Mata Uang

Rianto memandang eksekutif dan legislatif bagaikan dua sisi mata uang, keduanya sama penting dan



sama dibutuhkan. Jika salah satu sisi merasa paling hebat dengan ego keangkuhannya, maka perjalanan atau roda pembangunan akan timpang. Legislatif dengan tiga fungsi yang melekat (legislasi, penganggaran dan pengawasan), harus berjalan sesuai jalurnya. Selama anggota dewan berjalan sesuai koridor dalam menjalankan fungsinya, maka tidak alasan bagi eksekutif untuk menafikan atau mengabaikannya.

Karena fungsi itu pula, kata ketua komisi III ini, dia tak segan melemparkan komentar-komentar menggigit ketika melihat ada ketimpangan atau hal-hal yang menurutnya perlu mendapat respon segera. Hanya memang, komentar-komentar atau teguran melalui media massa maupun saat paripurna disampaikan dalam retorika mengajak, mengingatkan, mendesak bukan karena ego pribadi apalagi untuk menjatuhkan.

"Misalnya, ketika terjadi keterlambatan proses tender atau serapan anggaran yang minim, padahal kita sudah masuk triwulan ketiga. Atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, maka saya merasa harus berbicara, mengingatkan, karena barangkali ada pihak yang abai tentang hal itu," kata Rianto.

Apa yang disampaikan itu bagian dari menjalankan fungsi dewan, yakni fungsi pengawasan tidak lebih dari itu. Itulah mengapa ketika banyak pihak bertanya, apakah dirinya tidak takut menyampaikan kritik dan saran, karena yang dikritik Pemerintah Daerah, dimana Bupati adalah pimpinan partai tempat dirinya bernaung.

"Saya hanya menjalankan salah satu fungsi saya sebagai wakil rakyat, yakni pengawasan. Ketika kita lihat ada kelalaian yang harus kita ingatkan, ya kita sampaikan, baik itu melalui media maupun lewat hearing atau paripurna. Jika kita semua memahami fungsi kita masing-masing, saya yakin akan terbangun sinergi yang kuat," sebutnya.

Sikap kritis dan tegas memang sudah mengakar dalam diri anak pasangan Adi Suroso dan Katini ini, hal itupun dilakukannya ketika dirinya masih menjabat kepala desa. Sifat dan sikap itu terbawa saat dirinya menjadi wakil rakyat, tak heran komentar-komentar keras tapi santun sering muncul di sejumlah media lokal bahkan nasional.

Bagi Rianto, menyampaikan pendapat dan berkomentar melalui media, baik koran maupun televisi bukan hal yang aneh atau asing. Saat dirinya masih menjabat kepala desa sudah sering diwawancarai wartawan televisi dan koran dari Pekanbaru, baik melalui hubungan telepon atau wawancara langsung.

"Bukan bermaksud apa, tapi sejak saya masih menjadi kepala desa, saya memang sudah akrab dengan dunia wartawan. Komentar saya sudah sering muncul di koran dan media televisi, karena dulu ada beberapa peristiwa yang terjadi di Desa Petani. Karena saya pimpinan di sana, maka saya sering diwawancarai. Belajar dari itu, salah satu upaya saya menjalankan fungsi pengawasan, ya melalui media ini," ujar Rianto.

Terlepas dari semua itu kata Rianto, dirinya ingin terbangun sinergi yang kuat antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah. Kedua lembaga ini harus saling mengisi tidak mengedepankan ego masing-masing, merasa yang paling besar dan benar.

Jika boleh memisalkan, dalam roda pemerintahan ada dua bangunan, yakni bangunan politik dan bangunan ekonomi. Membangun dua bangunan ini harus seirama, politik harus dibangun dengan baik dan santun, begitu juga bangunan ekonomi, harus sama-sama diperjuangkan. Jika kedua bangunan ini berjalan masing-masing, niscaya akan terjadi ketimpangan dan tujuan yang ingin dicapai tidak akan maksimal.

Terlebih katanya, di tahun kedua nanti, masih banyak hutang politik yang harus dibayar. Banyak aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan, tidak hanya untuk masyarakat desa Petani, tapi juga untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis, atau paling tidak untuk masyarakat daerah pilihannya.

"Sebagai kader PAN, saya tetap istiqomah menjalankan aturan partai, yakni berpolitik tanpa gaduh. Mudah-mudahan ke depan, apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita bersama membawa daerah ini ke puncak kejayaan akan tercapai. Amin," harap Rianto.***



BIODATA

NAMA : RIANTO
TEMPAT/TGL LAHIR : Purwosari , 21 Mei 1977
ALAMAT : Jalan Simpang Lima Desa Petani
JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 0821 722 60888
ISTRI : Rismawaty
ANAK : Dua Orang
1. Tasya Anjasmara
2. Harry Murtinotonegoro

AYAH : Adi Suroso
IBU : Katini

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SDN
2. SMP
3. SMEA

RIWAYAT PEKERJAAN : Kepala Desa Petani Tahun (2009- 2013)
Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)

RIWAYAT ORGANISASI : 1. Ketua Harian Ikatan Keluarga Jawa
Riau (IKJR) Kecamatan Mandau
2. Ketua Puja Kesuma Kabupaten
Bengkalis.



ZAMZAMI HARUN, ST



Jangan Hanya Bertumpu pada APBD

Pindah perahu dari Partai Amanat Nasional (PAN) ke Partai Gerindra Indonesia Raya (Gerindra) mengantarkannya menjadi bahagian dari anggota DPRD Bengkalis periode 2014-2019. Pemikiran yang kritis serta jiwa bertualang dalam menghadapi tantangan maupun dinamika politik, membuat pribadi berusia 44 tahun ini matang dalam berpikir dan bersikap sebagai wakil rakyat.

Ia adalah Zamzami Harun, ST, anggota DPRD Bengkalis dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Rupat (Kecamatan Rupat dan Rupat Utara). Menyandang gelar sarjana teknik, tentu sangatlah tepat baginya duduk di Komisi II DPRD Bengkalis yang membidangi pembangunan daerah dengan mitra kerja SKPD yang berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan infrastruktur.

Putra Rupat Kelahiran Pergam, 12 Maret 1971 ini, dalam sebuah kesempatan bercerita banyak tentang obsesinya untuk Kabupaten Bengkalis, khususnya Pulau Rupat. Ia memandang pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat belum memberikan muara yang nyata dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat seperti cita-cita awal bangsa ini dimerdekakan.

Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari daratan dan kepulauan masih terpecah dalam konsep pembangunan yang riil, karena luasnya wilayah serta ketidakmampuan dalam mencari solusi bagi penyelesaian persoalan pembangunan itu sendiri. Salah satunya adalah pembiayaan pembangunan di daerah pulau, Bengkalis dan Rupat yang relatif tinggi dibandingkan dengan daratan.

Di sisi lain, sebelum dan sesudah otonomi daerah, nyaris tidak ada kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini. Padahal Bengkalis adalah salah satu daerah di republik ini yang menyumbang devisa terbesar ke negara, tetapi itu tidak berbanding lurus dengan apa yang diterima rakyat Bengkalis sejak Indonesia merdeka. Akibatnya, siapapun yang memimpin di Kabupaten Bengkalis, selalu mengandalkan APBD sebagai tumpuan pembangunan di seluruh sektor.

Dana APBN

Seharusnya, ada peran Pemerintah Pusat dalam pembiayaan pembangunan di daerah, sehingga pemerataan pembangunan terjadi. Dilihat dari sisi strategis letak Pulau Rupat yang merupakan jalur laut





penghubung internasional dan juga merupakan Pulau terluar di Indonesia serta merupakan salah satu daerah wisata nasional, tentu banyak peluang besar dalam membangun yang tidak tergantung dari APBD Daerah. Bisa dijemput dana dari APBN atau APBD Provinsi, dalam upaya percepatan pembangunan di Rupert yang jauh ketinggalan dari kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bengkalis.

"Pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata, tak ada terbang pilih. Contohnya dalam pengembangan potensi wisata bahari di Pulau Rupert, sampai hari ini belum terlihat ada kemajuan signifikan. Jalan poros di Pulau Rupert yang sedang dibangun, entah kapan selesainya. Demikian juga dengan infrastruktur penunjang pariwisata di Rupert, belum dibangun dan dimanfaatkan dengan baik," ungkap Zamzami.

Ia juga mendapat informasi, kalau potensi pariwisata Pulau Rupert masuk dalam 10 besar objek wisata bahari nasional. Keindahan pasir putih yang membujur di Pulau Rupert serta letaknya yang strategis, tentu harus mendapat sentuhan nyata supaya pembangunan sektor pariwisata tidak hanya menjadi cerita di setiap seminar atau dialog, tetapi harus diaplikasikan. Pulau Rupert harus tumbuh dan berkembang seiring perjalanan waktu.

Salah satu langkah dalam sudut pandang Zamzami adalah bagaimana dana APBN bisa mengalir ke Kabupaten Bengkalis, termasuk dalam pengembangan infrastruktur di Pulau Rupert guna menunjang sektor pariwisata. Mustahil semua pembangunan bertumpu kepada APBD semata. Apalagi persoalan infrastruktur di Pulau Rupert masih jauh dari harapan. Selain jalan, persoalan abrasi merupakan momok bagi masyarakat yang bermukim di pesisir pantai. Sementara untuk menanggulangi abrasi dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

"Apabila hanya mengandalkan APBD Bengkalis untuk membangun turap penahan gelombang di seluruh pulau Rupert ini, 20 tahunpun tak akan selesai. Harus ada sharing budget atau sharing program antara Pemkab Bengkalis dengan Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat. Bukitnya, sampai sekarang baru beberapa kawasan rentan abrasi di Rupert yang sudah dibangun tanggul penahan gelombang, mayoritasnya belum sama sekali," kata ayah lima anak ini.

Belum Tersentuh Maksimal

Selain Pulau Rupert, ia melihat masih banyak skala prioritas pembangunan daerah yang belum tersentuh dan tertangani secara maksimal. Persoalan abrasi juga terjadi di Kecamatan Bantan. Mayoritas kawasan pesisir di Bantan sudah ambles diterjang gelombang Selat Melaka karena penanganannya selalu



terlambat. Hal ini dikarenakan ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah selalu kepada APBD Kabupaten, padahal ada APBD Provinsi dan APBN.

Zamzami juga menyarankan untuk mengurangi ketergantungan 100 persen kepada APBD Bengkalis. Misalnya, jalan poros di Pulau Rupat bisa dijadikan jalan provinsi, dimana nantinya biaya perawatan didanai APBD Provinsi. Apabila pariwisata di Rupat menggeliat suatu hari nanti, orang dari Malaysia atau negeri jiran lainnya, setelah berwisata di Rupat mereka bisa ke Kota Dumai, Duri, Pekanbaru atau Medan. Sehingga dalam mendukung pengembangan pariwisata Pulau Rupat dibutuhkan kebersamaan dari seluruh stakeholder di negeri ini.

Selaku anggota Komisi II, ia juga mengkritik sejumlah proyek yang digulirkan beberapa SKPD yang dinilainya tidak tepat guna. Ditambah lagi mentalitas dari sejumlah oknum birokrasi di Bengkalis seolah-olah kalau setiap kegiatan atau proyek yang digulirkan harus memberikan keuntungan secara pribadi kepada dirinya. Dampaknya, kualitas proyek di lapangan dikerjakan asal-asalan yang kemudian bermuara ke ranah hukum.



Atas dasar itulah, Zamzami menyampaikan alasan kenapa Komisi II sering menggelar hearing dengan SKPD yang merupakan mitra kerja mereka. Ataupun anggota Komisi II turun langsung ke lapangan meninjau pelaksanaan proyek baik itu proyek multiyears yang saat ini tengah dikerjakan ataupun proyek reguler. Setiap ada laporan dan pengaduan masyarakat langsung ditindaklanjuti Komisi II, dengan memanggil SKPD bersangkutan untuk ditanyai.

Alumni Sekolah Tinggi Teknik Pekanbaru (STP) ini, sebelum menjadi wakil rakyat banyak berkiprah di Dumai sebagai seorang wiraswasta. Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Kota Dumai dan Ketua Gabungan Sanggar Sekolah di Dumai.

Bagi seorang Zamzami, ia ingin lebih banyak berbuat, bekerja dan memberikan bakti atas apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena ia sadar seorang anggota DPRD tidak lain adalah perpanjangan tangan rakyat dalam menyerap aspirasi dan mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan.

"Bagi saya posisi sebagai anggota DPRD adalah hal biasa. Karena sejak awal saya terinspirasi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi, berdaulat selaku warga negara dengan mendapatkan keadilan atas hak dan kewajibannya selaku rakyat. Itu adalah tanggungjawab serta tugas kita bersama sebagai bahagian dari pemangku kebijakan di negara ini, dalam lingkup sebuah kabupaten yang heterogen dan masih tertinggal," sebut Zamzami.

Hidup seperti diibaratkan suami Hj Raudah ini, kesadaran adalah matahari, keberanian adalah bumi dalam memperjuangkan apa yang diyakini merupakan sebuah kebenaran dalam memperjuangkan cita-cita. Hakikat dari hidup berbangsa dan bernegara harus saling mengisi dalam mendorong guna terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi segenap tumpah darah Indonesia.***

BIODATA

NAMA : ZAMZAMI HARUN, ST
TEMPAT/TGL LAHIR : Pergam, 12 Maret 1971
ALAMAT : Jl. Semangka Gg. Biro Semangka
No. 01 Kota Dumai

JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 0812 7505519 / 0813 7882 1758.
ISTRI : Hj. Raudah
ANAK : Lima orang
1. Iis Soleha Razami
2. Khaweriyen Razami
3. Hazura Sazami
4. Risky Sazami
5. Keisya Sazami

AYAH : Harun Harifin
IBU : Zainah (Alm)

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SDN
2. SMPN
3. STM
4. Sekolah Tinggi Teknik
Pekanbaru

RIWAYAT PEKERJAAN : Wiraswasta
Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)

RIWAYAT ORGANISASI : 1. Ketua Remaja Masjid
Muslimun (1993)
2. Ketua AKLI (Asosiasi Kontraktor
Listrik Indonesia) Dumai
3. Ketua Gabungan Sanggar
Sekolah Dumai
4. Ketua Dewan Kesenian Dumai



H JASMI, AMK



Isteri Sempat Tidak Setuju

Dalam kehidupan sehari-hari, sosok pria kelahiran Pematang Panjang, 7 April 1970 silam ini, bisa dikatakan biasa-biasa saja. Walau menjadi simpatisan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pemilik nama lengkap H Jasmi, AMK ini sama sekali tidak getol untuk mengatur berbagai strategi agar bisa melenggang sebagai wakil rakyat.

Baginya, keinginan bergabung dengan Partai PKS bukan dilatarbelakangi oleh sebuah harapan agar menjadi anggota dewan. Namun, sebagai tempat menyalurkan ide-ide serta menambah wawasan keilmuan, khususnya tentang Islam. Sama halnya dengan aktivitas partai PKS lainnya, pendekatan partai PKS melalui pengajian-pengajian ke-Islaman menjadi alasan khusus mengapa ayah satu anak ini memilih untuk bergabung.

Ketika sebagian orang saling sikut untuk mendapat kesempatan menjadi anggota dewan, Jasmi justru bersikap santai. Mekanisme pencalonan di PKS, menurut Jasmi ditentukan oleh partai, bukan ketua atau siapapun. Bahkan istrinya sendiri sempat tidak setuju dengan keputusan dirinya untuk ikut dalam pemilihan legislatif setahun silam. Namun berkat pemahaman yang ia berikan, terlebih dengan menjadi anggota dewan akan bisa bekerja sambil berdakwah dan membantu orang banyak, maka perlahan-lahan isterinya pun memberikan dukungan.

"Alhamdulillah, berkat doa dan kepercayaan masyarakat, saya terpilih menjadi anggota dewan untuk masa bakti 2014 – 2019," ujar Jasmi.

Bagi Jasmi, jabatan sebagai anggota dewan merupakan kesempatan emas untuk bisa melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Diminta atau tidak, selaku anggota dewan, sudah menjadi kewajiban bagi dirinya untuk menampung aspirasi masyarakat dalam segala hal. Walau dirinya berlatar belakang kesehatan, namun dalam membantu masyarakat, ia tidak akan membatasi diri. Sejauh aspirasi itu untuk kepentingan masyarakat banyak, apapun jenisnya, ia akan berusaha untuk memperjuangkan.

Butuh Sentuhan

Apalagi desa tempat ia tinggal, Desa Kesumbo Ampai, secara infrastruktur dan sarana prasarana masih serba kekurangan. Jalan-jalan masih banyak yang tanah, berdebu pada saat panas dan becek





pada saat hujan membuat warga kesulitan untuk beraktivitas. "Ya, semua warga baik itu anak-anak yang sekolah maupun orang tua yang ingin membawa hasil-hasil pertanian dan perkebunan, semua merasa kesulitan. Tentu, sebagai anggota dewan kita merasa terpanggil untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah ini," katanya.

Tidak hanya itu, lembaga pendidikan yang ada di Kesumbo Ampai pun masih banyak yang butuh sentuhan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Lembaga pendidikan mulai setingkat SD hingga SMA, menurut Jasmi tidak memadai bila dibandingkan dengan para siswa yang ingin melanjutkan pendidikan. Contoh kecil, SMKN 2 di desanya terpaksa patungan untuk menambah ruang kelas, karena ruang yang ada tidak mencukupi.

"Hal-hal seperti ini kan seharusnya tidak perlu terjadi, mengingat Pemerintah Kabupaten Bengkalis sedang gencar-gencarnya untuk mewujudkan Bengkalis sebagai Kota Pendidikan. Kalau sekolah yang ada saja masih amburadul, tentu untuk mengarah ke sana akan semakin sulit," katanya.

Sebagai pendaftar baru di DPRD, Jasmi mengaku butuh sedikit penyesuaian untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai wakil rakyat. Kebetulan, dia dipercaya fraksinya untuk bergabung di Komisi IV yang membidangi pendidikan, kesehatan dan sosial. Maka, dirinya lebih memfokuskan diri mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Komisi IV.

"Memang sebagai wakil rakyat saya tidak membatasi diri dalam menampung aspirasi masyarakat. Mengingat saya berada di Komisi IV, maka hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan dan persoalan-persoalan sosial lainnya lebih kita fokuskan," kata Jasmi.

Berbicara soal pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya di Mandau-Pinggir, menurut Jasmi masih banyak PR yang belum tuntas. Bersama-sama dengan anggota dewan daerah pemilihan Mandau dan Pinggir, Jasmi akan berusaha mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar meningkatkan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.

Pembangunan infrastruktur jalan dan juga peningkatan SDM menurut jebolan D-3 Keperawatan Medan ini harus terus digesa. Jika kondisi infrastruktur seperti jalan dan jembatan bagus, maka sudah tentu perekonomian masyarakat akan terangkat dan berkembang dengan sendirinya dan akhirnya akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya hal ini menjadi perhatian serius Pemkab. Dirinya optimis, dengan APBD yang besar, segala program pembangunan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat dapat terwujud di daerah ini.

Suami dari Hj Ermayani Lubis, AMKeb ini menambahkan, peningkatan sumberdaya manusia atau SDM juga perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemkab Bengkalis. Memang, untuk merubah karakter masyarakat tidak semudah membalik telapak tangan. Namun, Pemkab perlu mencari formula yang tepat agar program pembangunan di bidang peningkatan sumberdaya manusia tidak hanya sekedar slogan. Pemkab juga harus menyesuaikan program pembangunan dengan keperluan dan kebutuhan, mana yang harus didahulukan.

Sebagai orang yang sebelum ini cukup lama terjun di dunia kesehatan, Jasmi merasakan betapa SDM bidang kesehatan dirasakan masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitas. Kekurangan SDM ini sedikit banyak berdampak kepada kurang optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai contoh, masih sering terdengar adanya keluhan-keluhan pasien yang berobat di Puskesmas dan RSUD, baik di Bengkalis maupun di Mandau. Keluhan masyarakatpun cukup bervariasi, mulai dari kurang optimalnya penanganan oleh dokter karena tenaga medis terbatas, hingga pelayanan yang sepertinya setengah hati bagi pasien-pasien BPJS.



"Menurut saya, ini semua perlu dicarikan solusinya sesegera mungkin agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak hilang. Kita sama-sama tahu bagaimana Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menerapkan program pelayanan kesehatan secara gratis melalui Jamkesmasda. Namun, kalau saat berobat mereka kurang terlayani dengan baik, ya kasihan juga. Kita dari Komisi IV akan mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengatasi persoalan ini agar pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat bisa terwujud," ujarnya.***

BIODATA

NAMA : H JASMI, AMK
TEMPAT/TGL LAHIR : Pematang Panjang, 07 April 1970
ALAMAT : Jalan Simpang Bangko, Desa Kesuma Ampai
JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 0812 620 2783/0852-6572-7525
ISTRI : Hj. Ermayani Lubis, AMKeb
ANAK : Satu orang
Fakhrun Nissya Zain

AYAH : H Zakaria
IBU : Hj Intan

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SD Negeri Pematang Panjang
2. SMPN Swasta Pematang Panjang
3. SMA Alwasliyah I Medan
4. D-3 Keperawatan Medan

RIWAYAT PEKERJAAN : - Bekerja di Rumah Sakit Swasta Medan
- Balai Pengobatan Umum
- Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)

RIWAYAT ORGANISASI : ● DPRA PKS (2000-sekarang)

IRMI SYAKIP
ARSALAN, SSos



Pemuda Salah Satu Elemen Penting dalam Pembangunan Daerah

Namanya cukup membumi di Pulau Bengkalis, meskipun belum duduk sebagai anggota D PRD Bengkalis. Sebelum memangku amanah di dewan, sosok dan pribadinya memang sudah mulai dikenal luas berbagai kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pemuda atau organisasi sebangsanya.

Pria bertubuh mungil dan lincah tersebut adalah seorang pegiat organisasi sejak dari kampus semasa kuliah hingga sudah menjadi wakil rakyatpun, ia masih setia memberikan bakti kepada organisasi di Bengkalis. Saat ini, sosok yang dikenal cukup ramah tersebut menjabat Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bengkalis periode 2015-2018, pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Karang Taruna dan berbagai organisasi kepemudaan lainnya.

Irmi Syakip Arsalan, SSos namanya lengkapnya. Ia dilahirkan 26 Juli 1981 di Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, tempat dimana ia dibesarkan sebelum menimba ilmu ke Pekanbaru dan Kota Medan, Sumatera Utara. Mengawali pendidikan formal di SDN 023 Desa Meskom tahun 1991, SLTPN 8 Desa Pangkalan Batang tahun 1997, MAN Bengkalis tahun 2000 dan menyelesaikan S1 pada jurusan ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Sumatera Utara (USU) Medan tahun 2005.

Sebelumnya Irmi Syakip sempat menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau Pekanbaru. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi kerjasama antara UIN Suska Riau Pekanbaru dan USU Medan. Hingga kemudian mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau Pekanbaru berstatus menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol USU Medan.

Dikisahkan pria yang akrab disapa Ikip ini, semasa kecil hingga kelas 2 SLTP, kesehariannya selalu dekat dengan sosok seorang atok (kakek) yang merupakan tokoh agama atau imam masjid di Desa Meskom. Saat usianya 15 tahun, sang kakek meninggal dunia. Dari tangan beliaulah ia banyak mendapat didikan, pelajaran atau nasihat tentang nilai-nilai kejujuran, keteguhan dan semangat perjuangan untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Sehingga semua pelajaran tersebut sangat bernilai dan memberikan inspirasi dalam menjalani proses kehidupan.





"Bagi saya itulah pondasi awal terbentuknya karakter kepribadian saya. Saya ditempa oleh Atok di desa yang jauh dari kota sehingga banyak pelajaran tentang hidup dan kehidupan yang didapat ketika itu, sekaligus bekal bagi saya dalam mengarungi kehidupan selanjutnya," ungkap Ikip.

Ia menceritakan, ketika mahasiswa sudah terlibat aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan diantaranya Badan Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ushuludin (saat ini disebut dengan BEM Fakultas) tahun 2004-2005, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ushuludin, Himpunan Mahasiswa Islam MPO Kota Pekanbaru 2004-2005, IPNU Kota Pekanbaru 2004-2006, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bengkalis (Inperalis) Pekanbaru 2003-2005, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkalis (IPMKB) Pekanbaru 2003-2005.

Sebelum menjadi anggota DPRD Bengkalis, ia juga sudah aktif di berbagai organisasi di antaranya Wakil ketua KNPI Kabupaten Bengkalis periode 2010-2013, Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Bengkalis, Pengurus Karang Taruna Kabupaten Bengkalis (2009-2014), pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bengkalis dan wakil sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 2015-2020.

"Selain bergabung di berbagai organisasi, saya juga pernah terlibat di dunia konsultan jasa non konstruksi (kajian) dan juga pernah menjadi dosen luar biasa di Politeknik Negeri Bengkalis pada tahun 2012-



2013,” sebut Ikip sekelumit tentang perjalanan hidupnya.

Tantangan

Disinggung tentang perannya sebagai wakil rakyat, diakuinya bahwa dewasa ini sebagian besar masyarakat mulai mengalami krisis kepercayaan terhadap anggota DPRD. Namun hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi dirinya, untuk dapat menjalankan peran dan fungsi DPRD dengan sebaik-baiknya. Baginya perjuangan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat merupakan esensi dari kehadiran seorang politisi sehingga kehadiran DPRD dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Sangat tidak arif jika kita larut dalam asumsi bahwa politik sesuatu yang dipersepsikan kotor atau sesuatu yang negatif. Karena suka maupun tidak suka dalam konteks kebijakan pembangunan, sentuhan dan peran serta politik tidak bisa dielakkan, karena kita menganut azas demokrasi perwakilan,” terang Ikip diplomatis.

Politik dalam perspektifnya dapat berimplikasi baik maupun buruk. Hal ini tentunya tergantung kepada seorang politisi yang memainkan peran dan fungsinya. Pemahaman konsep tersebut tentunya jika seorang politisi dapat menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi hajat hidup orang banyak, atau dalam artian lain melahirkan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi bagi kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, berjuang demi kemaslahatan masyarakat merupakan cita-cita yang mesti dijalankan oleh seorang wakil rakyat, di samping merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang. Akan tetapi juga suatu kewajiban moral yang mesti diperjuangkan. Karena politisi hadir sebagai representasi dari suara-suara masyarakat.

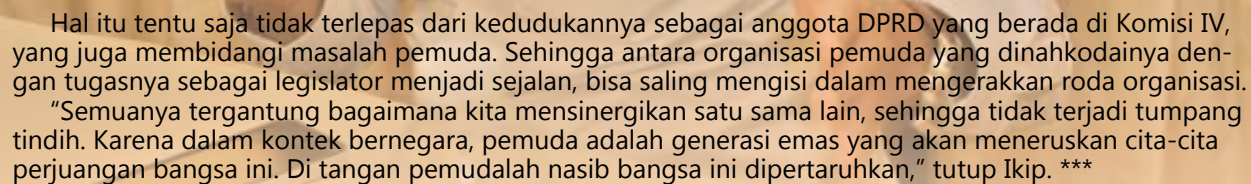
“Masuknya saya ke dunia politik dilandasi oleh semangat untuk mewakili kepentingan masyarakat di pedesaan. Karena saat ini masih banyak suara-suara masyarakat di pedesaan yang belum tersalurkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Kesimpulannya, bahwa DPRD sebagai bagian dari institusi pemerintah yang menjadi pejuang dalam menyerap dan menyuarakan aspirasi masyarakat, demi terwujudnya pembangunan yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat. Harapan ini tentunya dapat kita wujudkan bersama-sama, jika semua elemen bersinergi dengan memiliki tekad dan spirit yang sama dalam perjuangan ini,” ujarnya seraya mengajak masyarakat berperan serta.

Saat ini, Irmu Syakip merupakan salah satu anggota DPRD Bengkalis dari daerah pemilihan Bengkalis-Bantan. Ia duduk di Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat, mulai dari pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga hingga pariwisata dan budaya. Di lembaga wakil rakyat tersebut ia tergabung dalam Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa.

Setelah menjejalkan kaki di parlemen, kiprahnya sebagai seorang pegiat organisasi khususnya pemuda, tidak lantas berhenti. Di awal tahun 2015, Ikip maju dan menang secara aklamasi sebagai ketua DPD KNPI Kabupaten Bengkalis periode 2015-2018, setelah sebelumnya ia menjabat unsur wakil ketua. Otomatis kesibukannyapun terbagi sebagai wakil rakyat dan seorang organisatoris.

“Apapun yang kita lakukan, semuanya terpulang kepada diri sendiri. Meski saya menjadi anggota DPRD, tidak lantas membuat kegiatan saya di sejumlah organisasi ikut padam. Karena saya masih menyimpan obsesi menjadikan pemuda di Negeri Junjungan ini berdayaguna dan berperan serta lewat KNPI, HIPMI dan Karang Taruna maupun organisasi lainnya,” jawab Ikip tentang sejumlah jabatan di organisasi yang diembannya.

Di bidang organisasi kepemudaan, sosoknya sudah dikenal jauh hari sebagai seorang organisatoris yang andal, sehingga tidak salah jabatan bergengsi ketua DPD KNPI kabupaten Bengkalis dipegangnya. Berbagai program digulirkannya di KNPI, mulai dari KNPI Goes To School, KNPI Goes To Village serta sejumlah pelatihan dan seminar untuk menambah wawasan menjadi program andalannya di KNPI.



NAMA	:	IRMI SYAKIP ARSALAN, SSos
TEMPAT/TGL LAHIR	:	Meskom, 2 Juli 1981
ALAMAT	:	Jalan Sultan Syarip Kasim RT02/RT 02 Damon
JENIS KELAMIN	:	laki- laki
AGAMA	:	Islam
NO.TELP/HP	:	0812 6814 927
ISTRI	:	Roslinda, SHI
ANAK	:	Dua orang
		1. Najwa Aqela Syakip
		2. Agatha Adelia Syakip
AYAH	:	Idrus, BA
IBU	:	Khairiyah
RIWAYAT PENDIDIKAN	:	1. SDN 023 Desa Meskom (1988-1994)
		2. SMPN 8 Pangkalan Batang (1994- 1997)
		3. MAN Bengkalis (1997- 2000)
		4. S-1 Fisipol USU – Medan (2000-2005)
RIWAYAT PEKERJAAN	:	1. Konsultan
		2. Dosen Politeknik Negeri Bengkalis
		3. Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019).

- ngkalis
 ngkalis (2010-2013)
 tian dan Pengembangan
 '013-2018)
 ngkalis (2010-2015)
 kitan Bangsa
 15)
 n Bengkalis (2014-2017)
 paten Bengkalis (2009-2014)
 Bangsa
 20)
 alis (2015-2018)

AMRIL MUKMININ,
SE, MM



Pengabdian Tidak Pernah Berhenti

Sosok berbadan tambun dengan kumis tipis ini, sudah memasuki periode ketiga duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bengkalis. Politisi Partai Golkar ini menyebut, menjadi wakil rakyat bukan untuk gagah-gagahan, tetapi adalah sebuah pengabdian yang tidak boleh berhenti selagi masih dipercaya oleh masyarakat.

Dia adalah salah satu dari sekian ribu anak suku Sakai di belahan Pulau Sumatera, tepatnya di Kecamatan Pinggir yang merasakan pahit getirnya duduk sebagai seorang legislator, apalagi sampai tiga periode. Loyalitasnya kepada Partai Beringin tidak diragukan lagi, karena lewat parpol itulah ia mampu menjawab segala dinamika perpolitikan di Negeri Junjungan dengan sikap yang bersahaja serta kedewasaan berpolitik.

Namanya, Amril Mukminin SE, MM. Lahir 42 tahun lalu di Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Sedangkan istrinya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Kasmarni, SSos yang saat ini memegang jabatan strategis di Pemerintahan Kabupaten Bengkalis setingkat pejabat eselon III.

Dalam bincang-bincangnya, Amril menyebutkan bahwa perjuangan maupun pengabdian untuk sebuah cita-cita dan kebajikan tidak akan pernah berhenti. Apalagi selaku wakil rakyat ia mengemban amanah cukup berat bagi konstituennya yang sudah mempercayai dirinya duduk sebagai anggota DPRD selama tiga periode, karena tiga kali ikut Pemilu Legislatif Amril berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Pinggir.

Ia juga mampu membuktikan dirinya lebih 10 tahun sebagai wakil rakyat yang berusaha menjauhi konflik dan segala macam intrik yang mewarnai wajah parlemen Bengkalis. Karena menurutnya, konflik berarti menciptakan banyak musuh dan mengurangi kepercayaan rakyat. Bila tak perlu, ia tak banyak bicara seperti kebanyakan politisi yang suka mengumbar statemen di media massa dan berkonflik di parlemen.

"Kita inikan datang ke DPRD karena dipilih rakyat. Berarti mereka percaya dengan kita. Maka gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya untuk memberikan pengabdian. Karena mengabdikan bagi



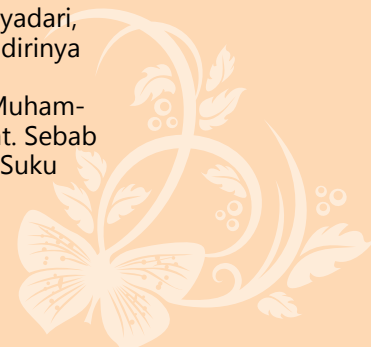


masyarakat adalah tujuan saya menjadi anggota dewan, sebab masih banyak yang harus diperjuangkan,” ungkap Amril.

Anak Sakai

Meskipun terlahir dari Suku Sakai, Amril tidak berpikir terbelakang. Ia adalah seorang politisi moderat yang mengedepankan pertemanan dan menjunjung tinggi etika berdemokrasi. Apalagi ia menyadari, sejak dulu anak Suku Sakai dianggap komunitas terbelakang, hal itu menjadi motivasi kuat dalam dirinya untuk berkarir dalam kancah politik yang penuh intrik dan konflik.

Amril sendiri berasal dari keluarga cukup terpandang di Pinggir, karena ia adalah cucu Syekh Muhammad Yusuf seorang pemuka Islam dan ulama dari Kecamatan Pinggir yang dikenal luas masyarakat. Sebab itulah, sosoknya begitu dikenal oleh masyarakat di Kecamatan Pinggir, tidak hanya oleh kalangan Suku



Sakai dan Melayu semata, tetapi juga etnis Jawa, Batak, Minang dan Tionghoa.

Dalam perspektifnya sebagai seorang politisi senior di DPRD Bengkalis, pembangunan yang berjalan sejak otonomi daerah setidaknya mulai membuka mata banyak orang tentang eksistensi anak Suku Sakai, bukan kelompok marjinal. Melainkan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, punya hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya di republik ini.

Dunia politik di matanya, bukan hanya sebatas sarana mengejar kekuasaan semata. Tetapi lewat dunia politik, adalah sebuah kesempatan untuk berkarya, mengabdikan dan bekerja bagi masyarakat luas, dengan tujuan menciptakan kemakmuran bagi semua orang tanpa memandang suku, agama dan etnis mana dia berasal. Apalagi Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan Mandau dan Pinggir memiliki penduduk yang heterogen atau multietnis.

"Politik itu adalah bagaimana meraih sebuah kesempatan, kemudian menyalurkannya dalam pengabdian kepada orang banyak. Saya berpolitik tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis. Sebagai bagian dari anak Suku Sakai saya selalu berusaha mewujudkan cita-cita memberikan yang terbaik bagi siapa saja," kata Amril tentang dunia politik.

Disinggung soal sikap politiknya yang sudah tiga periode duduk di DPRD Bengkalis dan belum terniat untuk naik level ke tingkat Provinsi Riau, ia menjawab santai bahwa berjuang tidak harus selalu ke posisi atas. Baginya menjadi anggota DPRD Bengkalis sudah cukup untuk berbakti. "Di posisi manapun kita menjabat, kalau tidak berbuat, tidak ada artinya sama sekali," ujarnya.

Ayah tiga anak ini mengaku pernah kecewa karena ketidakadilan ekonomi dan politik terhadap anak Suku Sakai. Ketidakadilan ekonomi dan politik itu coba ditembusnya seiring waktu dan terbukanya ruang untuk melangkah maju, dalam dunia politik maupun kesempatan lainnya. Termasuk meraih jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, dimana Amril mampu menamatkan studi S1 di bidang ekonomi dan S2 Magister Manajemen.

Beri Kontribusi

Dalam diri Amril sudah terpatuh tekad untuk mengarungi dunia politik sekeras apapun gelombang yang datang, karena dengan nawaitu yang baik, gelombang itu pasti bisa dilewati tanpa ikut terseret kedalamannya. Ia juga selalu berusaha, bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang jumlahnya ratusan di Kecamatan Pinggir memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitarnya, minimal sebagai tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit yang terbentang luas.

"Di Pinggir, investasi cukup besar. Artinya disana ada peluang ekonomi bagi masyarakat tempatan untuk bekerja maupun dalam menjalankan usahanya. Kita mencoba mendorong bagaimana anak-anak tempatan memiliki peluang untuk bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut, supaya taraf perekonomian mereka bisa terangkat," harapan Amril.

Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kecamatan Pinggir maupun Kabupaten Bengkalis diingatkannya untuk berpihak kepada masyarakat tempatan maupun kepentingan daerah. Maksudnya, perusahaan harus memperhatikan potensi sumber daya manusia (SDM) dimana mereka beroperasi sehingga tidak hanya mengeruk sumber daya alam (SDA) semata. Ada peluang kerja bagi masyarakat tempatan.

Pemerataan pembangunan sejak otonomi daerah bergulir tahun 2001, diyakininya menjadi momentum kebangkitan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Dengan ditunjang APBD yang lumayan besar setiap tahunnya, tentu saja pemerataan pembangunan harus berjalan, disektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

"APBD Bengkalis yang besar harus merata dalam porsi pembangunan, sehingga ketidakadilan dan ke-

timpaan pembangunan terutama soal infrastruktur tidak melebar antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Untuk diketahui, Kecamatan Pinggir sangat luas, masih banyak masyarakat yang belum merasakan secara nyata hasil pembangunan, baik itu di bidang pendidikan, jalan poros dan lainnya," tukas Amril, yang maju pada Pemilihan Bupati Bengkalis tahun 2015.

Di akhir perbincangan, Amril menyebut kembali bahwa pengabdian yang dilakukannya di DPRD Bengkalis akan terus dilakukan, bisa jadi suatu hari nanti ia mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkalis. Tekadnya untuk berkiprah di dunia politik juga bukan untuk mengejar popularitas semata atau materi, tetapi bekerja untuk kepentingan bersama dengan menjalankan amanah tanpa melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. "Perjuangan belum selesai, kedaulatan rakyat harus ditegakkan".***

BIODATA

NAMA	: AMRIL MUKMININ, SE, MM
TEMPAT/TGL LAHIR	: Muara Basung, 05 Maret 1973
ALAMAT	: Jalan Pelajar No1 Rt 03/02 Muara Basung
JENIS KELAMIN	: Laki-laki
AGAMA	: Islam
NO.TELP/HP	: 0852 7817 7999
ISTRI	: Kasmarni, SSos
ANAK	: Empat orang 1. Septian Nugraha 2. Fanny Anggariani Harnas 3. M Arsy Fadillah 4. M Bangsawan Putra Amril
AYAH	: M Nur (Alm)
IBU	: Yusni
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1. SDN N 14 Duri (1985) 2. SMP N 02 (1988) 3. SMA N 03 Pekanbaru (1991) 4. STIE Teladan Medan (2002)
RIWAYAT PEKERJAAN	: ● Kepala Desa Muara Basung (2000-2004) ● Anggota DPRD Bengkalis (2004-2009) ● Anggota DPRD Bengkalis (2009-2014) ● Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)



H THAMRIN MALI, SH



Aktif Turun ke Desa Lihat Persoalan Masyarakat

Meskipun usianya sudah memasuki 63 tahun, sosok yang bertubuh mungil ini tetap agresif dalam mengemban tugasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Sudah dua priode duduk jadi wakil rakyat, ayah lima anak ini selalu berusaha menjawab persoalan dengan lugas dan tegas.

H Thamrin Mali, SH merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan kecamatan Mandau. Sebelumnya, pada periode 2009-2014, ia juga berasal dari daerah pemilihan yang sama. Sosok yang murah senyum ini merupakan politisi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis, yang santun dan ramah kepada siapa saja.

Karena prinsip yang diemban seorang Thamrin Mali adalah menduduki sebuah jabatan bergengsi dan strategis bukanlah segala-galanya dalam hidup ini, tapi bagaimana mengimplementasikannya dalam bentuk tanggungjawab yang lebih luas kepada masyarakat. Di DPRD Bengkalis, pada priode kedua ini ia dipercaya menjadi sekretaris di Komisi IV yang membidangi kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan dunia pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, budaya sampai persoalan pemberdayaan ibu dan anak.

Terlahir di Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, 28 Oktober 1952, ia seringkali menyoroti masih terjadinya ketimpangan pertumbuhan pembangunan antara kota dengan desa. Meskipun terlahir di Rokan Hilir, yang pada waktu itu masih Kabupaten Bengkalis, ia tinggal dan bekerja di Kecamatan Mandau. Thamrin adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengabdikan diantaranya di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Dalam kacamataanya, politik adalah sebuah jalan menuju tujuan yang diinginkan. Tentu saja tujuan yang hendak dicapai itu adalah sebuah tujuan yang mulia, bukan mengejar kekuasaan semata untuk mendapatkan kemewahan dan sarana yang berlimpah ruah. Apalagi DPRD adalah sebuah lembaga yang mengawal, mengawasi dan mempertanyakan keberlangsungan proses pembangunan yang sepenuhnya berada di tangan eksekutif.



"Kita ini di DPRD hanya sebatas lembaga controlling dan budgetting, kewenangan menjalankan roda pembangunan berada di eksekutif. Peran social control dan budgetting itulah yang harus dimanfaatkan tanpa menimbulkan masalah bagi siapapun, karena DPRD merupakan lembaga yang bersifat kolektif kolegial. Artinya, keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama," ujarnya.

Dalam pandangannya, Kabupaten Bengkalis dengan letak geografis yang sangat luas ditambah penduduk yang heterogen, terutama di daratan Sumatera (Kecamatan Mandau dan Pinggir), seharusnya menjadi modal dan kekuatan besar dalam membangun daerah. Kondisi itu ditopang dengan APBD Bengkalis sejak otonomi daerah digulirkan termasuk yang terbesar di Indonesia, harus dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan yang nyata dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Diceritakan Thamrin, pada periode pertama ia menjadi anggota dewan (2009-2014), ia berada di Komisi III yang membidangi keuangan daerah dan perusahaan daerah. Waktu itu Dinas Penda-patan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kope-rasi dan UMKM, Bagian Keuangan, Bagian Perekonomian sampai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) merupakan mitra kerjanya.

Waktu itu, pihaknya rutin menggelar hearing (dengar penda-pat) terkait persoalan-persoalan yang terjadi didalam organisasi mitra kerja Komisi III itu. Pada periode sekarang, Thamrin me-megang jabatan sebagai sekretaris Komisi IV, dimana ia harus menggeluti persoalan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, memantau dunia pendidikan, kesehatan, pember-dayaan perempuan dan anak serta masalah pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga.

Setelah dilantik pada periode kedua sebagai wakil rakyat, ia mencoba konsen pada hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Komisi IV. Dinilainya, persoalan-persoalan mendasar masih terjadi di sektor pendidikan, kesehatan dan berbagai persoalan dalam pengembangan dunia pariwisata di Bengkalis ini.

"Pembangunan pendidikan, terutama sarana belajar men-ajar jangan hanya diprioritaskan di perkotaan saja, tetapi sarana belajar mengajar terutama sekolah-sekolah juga harus dibangun di desa-desa terpencil. Kualitas guru, khususnya penyebaran guru tidak merata, guru-guru yang berpendidikan lebih tinggi atau se-misal guru yang sarjana S2 terpusat mengajar di kota-kota," papar Thamrin tentang sektor pendidikan.

Pada masalah kesehatan ia juga memandang, program yang bergulir belum seutuhnya menyentuh masyarakat, terutama pada





infrastruktur kesehatan itu sendiri. Masyarakat di pedesaan Kecamatan Mandau umumnya mereka yang jauh tinggal dari Kota Duri sering kesulitan pergi berobat, karena keterbatasan sarana pengobatan dan tenaga medis. Walaupun ada Puskesmas pembantu di suatu desa, tetapi tenaga medisnya tidak mampu melayani penyakit yang diderita masyarakat.

Salah satu yang menjadi masalah adalah rentang geografis dari desa pelosok desa ke pusat Kota Duri sebagai ibukota Kecamatan Mandau sangatlah jauh, karena keterbatasan sarana jalan. Akhirnya banyak masyarakat memilih pengobatan alternatif di luar medis. Ini adalah problema dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Bengkalis, yaitu Dinas Kesehatan harus proaktif menyiapkan tenaga medis yang memadai di Puskesmas pembantu.

"Selama ini keluhan masyarakat di pelosok-pelosok desa Kecamatan Mandau, ketika mereka sakit, tidak ada Puskesmas pembantu. Walaupun ada, tenaga medis atau dokter yang ada tidak mampu memberikan layanan maksimal terhadap masyarakat. Ini harus menjadi catatan kedepannya, bagaimana sarana dan prasarana kesehatan di pelosok desa dibenahi lebih baik lagi," ujar pria yang juga akrab disapa Mamak ini.

Pantas Dimekarkan

Dalam konteks Kecamatan Mandau yang penduduknya melebihi kapasitas sebuah kecamatan, Mamak merasa miris. Menurut dia bagaimana mungkin sebuah kawasan dengan populasi penduduk di atas 300 ribu jiwa hanya dipimpin seorang camat. Belum lagi aspek keamanan lingkungan juga di Kecamatan Mandau tidak memadai, karena hanya ada satu Mapolsek yang melayani 300 ribuan jiwa.

Apalagi sambung Mamak, di Kecamatan Mandau tingkat kriminalitas sangat tinggi. Mulai dari perampokan, narkoba, pencurian dan lainnya sudah mengkhawatirkan. Solusinya adalah pemekaran kecamatan harus segera dilakukan. Jangan lagi pemekaran kecamatan dipandang dari sisi politis semata, tetapi harus dipandang pada kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan jaminan keamanan.

"Saya masih sering turun ke berbagai desa, memantau langsung pelayanan kesehatan dan pendidikan. Juga perkembangan program yang digulirkan pemerintahan Herliyan Saleh-Suayatno seperti UED-SP dan Inbup-PPIP. Hasilnya lumayan bagus, tapi masih ada problema yang dihadapi dalam menjalankan kedua program tersebut. Seperti UED-SP juga belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat yang betul-betul membutuhkan," jabar Mamak.

Ia juga menyebut sektor pariwisata khususnya Pulau Rupat harus dioptimalkan menjadi sektor andalan pariwisata bahari yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan perekonomian masyarakat disana. Tentunya dengan menggesa pembangunan infrastruktur,

baik itu jalan, jembatan, listrik dan sarana air bersih.

Di mata Mamak, investasi di sektor pariwisata tidak akan berjalan ketika infrastuktur tidak bagus. Orang tidak akan pernah datang ke suatu daerah untuk berwisata, selagi daerah itu sendiri belum siap menjadi tuan rumah yang baik, dari seluruh aspek yang dibutuhkan oleh wisatawan ketika berkunjung.

Dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, Mamak tidak hanya berdiam diri menampung aspirasi di kantor dewan atau di rumahnya saat berada di Mandau. Tapi ia aktif turun ke desa-desa walau tidak secara formal, karena tidak harus berlabel sebagai anggota dewan untuk mengetahui persoalan di masyarakat ketika turun ke lapangan.***

BIODATA

NAMA	: H. THAMRIN MALI, SH
TEMPAT/TGL LAHIR	: Tanah Putih, 28 Oktober 1952
ALAMAT	: Jl. Desa Harapan Gg.Matahari No 4 Duri
JENIS KELAMIN	: Laki-laki
AGAMA	: Islam
NO.TELP/HP	: 0811 7587748
ISTRI	: Hj Yuslidar
ANAK	: Lima orang 1. Oce Yulita, AMdKeb 2. Ossa Novita, S.Sos 3. drg Adha Andi Saputra, MM 4. Dede Afridarti, SH 5. Indika Sazita
AYAH	:
IBU	:
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1. SDN Negeri Bagan Siapiapi (1966) 2. SMP Negeri Bagan Siapiapi (1969) 3. SMA Negeri Bengkalis (1991) 4. S1 Universitas Lancang Kuning (Tahun 2014)
RIWAYAT PEKERJAAN	: ● Pegawai Negeri Sipil (1977-2008) ● Anggota DPRD Bengkalis (2009-2014) ● Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)



SYAIFUL ARDI



Jangan Berhenti Berbuat Baik

Syaiful Ardi merupakan anggota DPRD Bengkalis asal pemilihan Mandau. Saat ini tercatat sebagai wakil ketua Komisi I yang membidangi masalah pemerintahan meliputi ketertiban dan keamanan, komunikasi dan hukum dan perundang-undangan, kepegawaian dan aparatur. Kemudian perizinan, sosial politik, organisasi masyarakat, hubungan luar negeri dan pertanahan, catatan sipil, kependudukan dan ketenagakerjaan, perhubungan dan informatika.

Karier politik Syaiful Ardi dimulai ketika dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketika Pemilu Legislatif 2014, dirinya mencoba untuk maju sebagai wakil rakyat. Dengan niat ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat, Syaiful Ardi memantapkan hati maju dari daerah pemilihan Mandau (Bengkalis 4). Sebagai catatan, daerah pemilihan Bengkalis 4 ini merupakan Dapil dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi karena banyak calon incumbent ikut dalam bursa Pemilu Legislatif.

Namun, bukan Syaiful Ardi namanya kalau tingginya persaingan membuat ia patah arang. Dirinya optimis, dengan dukungan masyarakat dan doa dari orang tua serta keluarga, akan bisa mengantarkan dirinya menuju kursi DPRD Bengkalis. "Alhamdulillah, saya berhasil duduk sebagai anggota dewan dengan perolehan 1.504 suara," ujarnya mengawali pembicaraan.

Bagaimana ceritanya hingga suami dari Era Susanti ini bisa mengumpulkan suara sebanyak itu? Menurut penuturan Syaiful Ardi, dari jalur politik, memang dirinya baru benar-benar aktif 2 tahun terakhir sebelum pemilihan. Namun, jauh sebelum itu, dirinya merupakan orang yang gemar terlibat dengan kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan, karena kegemarannya itu, ia dipercaya untuk menduduki posisi ketua GEMPAR'S Kecamatan Mandau. GEMPAR'S merupakan singkatan dari Gerakan Muda Pariaman, yaitu wadah berkumpulnya pemuda-pemuda Pariaman di rantau.

Menurut Syaiful Ardi, selama ini ada imej kalau pemuda-pemuda Pariaman di rantau selalu kurang baik. Dilatarbelakangi imej tersebut, dirinya bertekad, melalui organisasi GEMPAR'S, keberadaan-keberadaan generasi muda Pariman justru menjadi kekuatan yang positif untuk membangun negeri, khususnya Kabupaten Bengkalis.





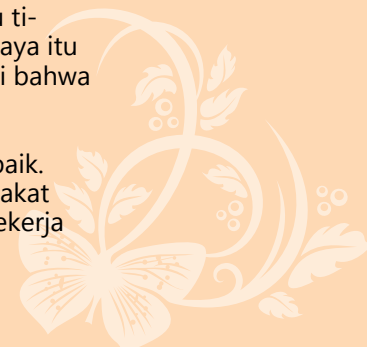
"GEMPAR'S selalu mengikuti kegiatan-kegiatan sosial baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Selaku ketua, saya berupaya mengarahkan para generasi muda Pariaman untuk selalu menebar kebaikan, sekecil apapun itu," katanya.

Dengan berbagai aktivitas yang positif selama di organisasi, ketika musim pemilihan anggota legislatif, sejumlah tokoh masyarakat menginginkan dirinya untuk ikut mencalonkan diri. Terhadap keinginan tersebut, Syaiful Ardi tidak langsung mengiyakan, melainkan mendiskusikan dengan keluarga besar, termasuk istri.

"Dukungan itu benar-benar terbukti mengantarkan saya menjadi anggota dewan. Percaya atau tidak, di kampung saya, 80 persen suara memilih saya. Padahal saat Pemilu Legislatif, di kampung saya itu bukan hanya saya, masih ada dua orang calon lagi yang sama-sama bersaing. Ini merupakan bukti bahwa kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang kita lakukan membekas di hati mereka," ujar Syaiful Ardi.

Prinsip Hidup

Ayah tiga anak ini mengaku, dalam hidup ia memiliki prinsip jangan pernah berhenti berbuat baik. Prinsip tersebut ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kapasitasnya sebagai masyarakat biasa, maupun dalam organisasi dan pekerjaan. "Kalau soal kerja jangan ditanya, saya termasuk pekerja



keras. Dulu saya pernah buka usaha sawmill sebelum kemudian membuka usaha showroom mobil. Saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.

Prinsip hidup untuk selalu berusaha berbuat baik ia terapkan ketika menjadi anggota DPRD Bengkalis. Dirinya yakin, Allah SWT mentakdirkan dirinya sebagai wakil rakyat bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah bagaimana dengan posisinya itu, ia bisa melakukan yang lebih lagi untuk membantu masyarakat. Karena itu, dirinya bertekad untuk bisa membantu masyarakat sebanyak mungkin. Berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, akan berusaha ia carikan solusinya. Kalau itu berhubungan langsung dengan Komisi I, dimana dia duduk sebagai Wakil Ketua, maka akan langsung ditangani oleh Komisi I. Namun, kalau itu berhubungan dengan komisi lain, maka ia akan berkoordinasi dengan komisi lain agar dibantu aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dirinya.

Khusus Komisi I, menurut Syaiful Ardi, ada dua kegiatan yang dilakukan. Pertama, yang bersifat rutin berhubungan dengan mitra kerja adalah koordinasi terkait dengan rencana kegiatan dan realisasi anggaran. Komisi I akan menggelar hearing dengan mitra kerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci program kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan serta bagaimana output dari program kegiatan tersebut.

“Kemudian, ketika APBD sudah disahkan kita kembali menggelar hearing dengan mitra kerja. Ini kita lakukan untuk mendapatkan gambaran secara detail sudah sejauhmana realisasi dari program kegiatan yang sudah disahkan di APBD. Kalau ada persoalan yang muncul apa penyebabnya dan apa solusinya,” ujarnya seraya menambahkan, hearing dengan mitra kerja terkait dengan fungsi anggaran dan pengawasan sudah menjadi agenda rutin, baik karena ada pengaduan maupun tidak.

Selain agenda-agenda kegiatan yang sifatnya rutin, dirinya juga bersama anggota Komisi I DPRD Bengkalis lainnya melaksanakan kegiatan yang sifatnya insidentil atau kasuistik. Pengaduan dari masyarakat terhadap berbagai persoalan yang terkait dengan Komisi I, antara lain persoalan konflik lahan baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun antara masyarakat dengan Pemerintah. Kemudian persoalan ketenagakerjaan, khususnya hubungan antara buruh dengan perusahaan.

Konflik lahan menurut Syaiful Ardi, terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah kurang telitinya kepala desa dalam mengeluarkan surat jual beli tanah. Persoalan konflik lahan ini mungkin tidak menimbulkan dampak yang besar kalau lahan yang dipersoalkan tidak begitu luas dan terjadi antar masyarakat. Namun, lain ceritanya kalau konflik lahan terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Untuk itu, sebelum terjadi, dirinya berharap kepada aparat pemerintahan desa jangan asal mengeluarkan surat jual beli tanah tanpa melakukan kajian terlebih dahulu.

Sedangkan untuk persoalan ketenagakerajaan, khususnya hubungan antara buruh dengan perusahaan, perlu ada perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selama ini ia menilai, konflik buruh terjadi lantaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bengkalis tidak berfungsi secara optimal. SKPD yang seharusnya menjadi mediator justru lebih banyak berpihak kepada perusahaan. Akibatnya, persoalan ketenagakerjaan terus terjadi.

“Peran Kadisnaker saya kira sangat penting dalam persoalan ketenagakerjaan ini. Selagi Kadisnya tidak bisa bertindak tegas kepada perusahaan, maka selagi itulah persoalan tidak akan selesai,” katanya.

Terkait dengan pembangunan, dari sisi penganggaran ia menilai sudah cukup bagus. Artinya, antara legislatif dan eksekutif sudah ada kesepahaman terkait program-program kegiatan apa saja yang perlu dilaksanakan. Begitupun pengesahan APBD sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Persoalannya adalah dari sisi realisasi yang dinilai kurang memuaskan. Dirinya tidak tahu pasti mengapa hal ini bisa terjadi dan menjadi kewenangan dari Komisi II untuk menindaklanjuti.

“Ini gawenya Komisi II, saya harap persoalan keterlambatan pelaksanaan kegiatan tidak terjadi lagi. Karena semakin cepat terealisasi maka semakin cepat pula masyarakat merasakan manfaatnya,” ujar Syaiful Ardi. ***



BIODATA

NAMA : SYAIFUL ARDI
TEMPAT/TGL LAHIR : Batu Gadang , 19 Nopember 1979
ALAMAT : Jalan Tegal Sari RT/RW 02 Mandau
JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 0812 759 3933
ISTRI : Era Susanti

ANAK : Tiga orang
1.Gefrira Ardi
2.Gevita Tora Ardi
3.GOFIAKBAR ARDI

AYAH : Nazir (Alm)
IBU : Hj Nurli

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SD (1992)
2. SMP (1995)
3. Paket C (2010)

RIWAYAT PEKERJAAN : - Pemilik Showroom Gevia Mobilindo
- Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)

RIWAYAT ORGANISASI : ● Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Bengkalis
● Ketua GEMPAR'S Kecamatan Mandau



FAKHRUL NIZAM, ST



Berawal dari Kesenjangan di Depan Mata

Berawal dari kerisauan hati, membunch lalu berubah menjadi gulana. Kesenjangan itu ada di depan mata, namun tidak mampu untuk ikut mengatasinya. Jikapun ada upaya, hasil yang diperoleh tidaklah semaksimal harapan.

Ya, naluri pendiri organisasi mahasiswa Bengkalis-Bandung ini tak bisa dibohongi, apalagi diajak berdiam diri acuh dengan persoalan yang ada di sekitar. Dunia kontraktor yangigeluti selama sekian tahun, tak bisa menjawab keresahan yang sudah begitu besar. Harus turun tangan, harus ada yang memperjuangkan.

Tahun 2009, Fakhru Nizam, ST mencoba peruntungan, ikut beradu nasib menjadi anggota DPRD Bengkalis dari Partai Bintang Reformasi (PBR). Karena dia berpikir, menjadi wakil rakyat akan lebih mudah memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Walau di Dapilnya memperoleh suara terbanyak, namun perolehan suara partai secara keseluruhan belum mampu mengantarkan pria yang akrab disapa Irul ini ke rumah rakyat. Kendati keinginan menjadi dewan di tahun itu kandas, tapi tidak lantas menyurutkan niat dan semangat suami Dona Siska Handayani ini untuk kembali bertarung pada Pemilu berikutnya.

Tahun 2014, Irul kembali bertarung, tapi kali ini sampan yang ditumpangi berganti. Tidak lagi PBR, tapi Partai Amanat Nasional. Kepindahan Irul dari PBR ke PAN bukan seperti kutu loncat, tapi memang terjadi penggabungan partai, PBR melebur ke PAN. Irul yang semula aktivis PBR berubah menjadi kader PAN.

Sebagian mengatakan, Irul menjadi yang diuntungkan karena menjadi kader PAN. Bupati Bengkalis, yang tak lain kerabat dekatnya adalah Ketua DPW PAN Riau. Tapi prasangka itu tidak sepenuhnya benar, tengok saja saat Pemilu 2009, Irul mampu mengantongi suara terbanyak di Dapilnya kala tu.

Seperti ramalan banya orang, ayah Muhammad Faizel Atharizz bakal melenggang ke kursi dewan. Lagi-lagi, perolehan suara yang dikantongi Irul cukup signifikan, mengalahkan semua Caleg di Dapil Bukit Batu-Siak Kecil. "Semuanya berawal dari sebuah kesenjangan, aspirasi dan keluhan jarang didengar. Saya ingin menyambung lidah masyarakat melalui amanah yang telah dibebankan di pundak



saya ini,” ujar alumni Universitas Islam Bandung ini.

Dinamika dan persoalan yang ditemui di tengah masyarakat saat sosialisasi, baik ketika Pemilu Legislatif 2009 maupun Pemilu 2014, tak jauh beda. Berkisar soal pembangunan dan ketersediaan infrastruktur serta peningkatan sumber daya manusia. Pesan itu yang kini menjadi tanggung jawab untuk diperjuangkan.

Diakui, walaupun di era Bupati Herliyan Saleh sudah banyak program yang dijalankan, namun menurutnya, Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil tetap harus mendapatkan perhatian serius, karena masih ada beberapa program yang harus dituntaskan. Seperti program Industri Buruk Bakul, pembangunan pembangkit listrik, air bersih dan lainnya. “Tidak cukup hanya jalan poros Langkat-Buruk Bakul untuk mendorong percepatan program pembangunan industri Buruk Bakul, harus didukung oleh infrastruktur dasar lainnya. Ketersediaan listrik, air bersih juga harus tersedia dengan baik,” sebut Irul.

Revitalisasi Perkebunan

Anak pasangan H Nurzalna dan Hj Fauziah Asmara SS ini sepem- dapat dengan rencana Pemerintah Daerah melakukan revitalisasi perkebunan karet masyarakat. Hal itu didasari banyaknya perkebunan karet milik masyarakat yang kurang produktif karena sudah berumur tua.

Karena menilai sebuah program tepat, Irul terus mendorong agar pemerintah merealisasikan wacana tersebut, hanya memang katanya kebijakan tersebut harus dipersiapkan dengan matang, terutama soal kelangsungan hidup para pemilik kebun itu sendiri.

“Program revitalisasi jangan sampai memutus ekonomi masyarakat. Selama kebun masyarakat direvitalisasi, otomatis masyarakat tidak bisa mengolah kebun mereka, tidak mungkin masyarakat menjadi korban akibat program ini. Maksud saya, kelangsungan hidup mereka harus diperhatikan, entah itu mengolah lahan cadangan atau dipekerjakan di lahan revitalisasi itu,” sebut Irul.

Selain soal revitalisasi perkebunan, mantan pengurus mahasiswa Riau se-Indonesia ini juga menyuarakan banyak hal. Berkaitan dengan Tupoksi Komisi II di mana dirinya bernaung, Irul juga terus mendorong agar proyek multiyears selesai sesuai target. Walau secara pribadi dirinya kurang yakin 6 paket MY bisa selesai tepat waktu, mengingat volume di lapangan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia kontraktor, terlebih basic keilmuannya juga adalah Sarjana Teknik, Irul paham betul dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan dunia ter-





sebut. Makanya, dia tidak mudah percaya dengan laporan yang diterima, sebelum melihat kondisi ril di lapangan.

"Untuk proyek MY misalnya, bisa kita hitung waktu yang tersisa dengan jumlah pekerjaan yang belum diselesaikan, apakah terkejar atau tidak. Bagaimana sarana pendukung, kendala apa yang dihadapi dan lain sebagainya, semua itu bisa kita ketahui dan bisa kita prediksi pekerjaan itu selesai apa tidak," papar Irul.

Irul memang salah seorang anggota dewan yang getol dan terus mengingatkan jika terjadi keterlambatan dalam pekerjaan. Menurutnya, proyek MY sangat vital dan sangat diharapkan oleh masyarakat. Salah satu contoh, jalan poros Pulau Rupert, tersebab jalan tersebut kini denyut Pulau Rupert mulai terasa, pesona Pantai Rupert mulai menjadi tumpuan banyak orang karena akses menjad mudah.

Masih berkaitan dengan program percepatan pembangunan infrastruktur, alumni SMA 6 Pekanbaru ini terus mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan Perta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Ditail Tata Ruang (RDTR). Juga mendorong Pemkab membentuk tim ahli bangunan dan gedung. Sementara untuk Perda Bangunan dan Gedung sudah selesai, dirinya menjadi Ketua Pansus Perda itu.

Diakui, jika beberapa item yang disebutkan tersebut bisa diselesaikan pemerintah, maka program pembangunan yang dijalankan akan berhasil dan tertata dengan baik. "Alhamdulillah untuk Perda Gedung dan Bangunan sudah selesai. Tapi kita tetap mendorong hal-hal yang berkaitan dengan percepatan pembangunan harus segera dituntaskan," jelasnya.

Kejar Target

Tahun pertama menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, menjadi awal pembuktian dirinya kepada masyarakat minimal untuk masyarakat di daerah pemilihan. Banyak hal yang dititipkan oleh masyarakat kepada dirinya untuk diperjuangkan agar masuk di dalam anggaran.

Seperti penuntasan pembagunan jaringan listrik ke ceruk kampung, penyelesaian 4 buah jembatan yang membentang Sungai Siak Kecil, menyelesaikan pembangunan jaringan distribusi air bersih untuk Kelurahan Pakning dan seabrek usulan lainnya.

Untuk jaringan listrik, kata mantan pengurus KPMR Bandung ini, memang sudah terbangun hingga ke ceruk kampung. Hanya memang sampai saat ini sebagiannya belum teraliri arus listrik (daya). Menjadi tanggung jawab dirinya untuk terus mengin-

gatkan dan mendorong pemerintah melalui SKPD terkait untuk melobi pihak PLN agar arus segera masuk.

Sementara untuk 4 buah jembatan yang melintasi sungai Siak Kecil, diakui untuk 1 buah jembatan saat ini sudah fungsional, namun tiga unit lagi mesti harus dituntaskan segera. "Selama ini masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyeberangi sungai Siak Kecil, bukan hanya soal biaya, tapi juga waktu. Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir dimulai pembangunan 4 unit jembatan. Saat itu 1 jembatan sudah bisa digunakan, 3 buah lagi tahap penyelesaian," sebut Irul.

Sudah puas dengan kinerja di tahun pertama dirinya menjadi anggota dewan? Rasa puas memang sulit diukur, tapi setidaknya kata Irul dari sekian banyak usulan yang diperjuangkan sebagian sudah terakomodir, walau belum tuntas 100 persen. Untuk itu dirinya akan terus menggesa dan memperjuangkan agar apa yang menjadi haknya masyarakat bisa segera dinikmati.

Lalu apa upaya yang menjadi target di tahun kedua dirinya menjadi anggota DPRD Bengkalis. Hak-hak masyarakat tetap menjadi prioritas untuk diperjuangkan. Kali ini kata Irul sekalanya bukan lagi ke persoalan percepatan pembangunan infrastruktur, tapi kepada hal-hal ekonomi masyarakat.

Seperti diketahui, masyarakat Siak Kecil dan Bukit Batu tinggal berhampiran dengan hutan yang kini dikuasi oleh sejumlah perusahaan besar, seperti PT Arara Abadi, PT Surya Dumai. Juga perusahaan perminyakan seperti Pertamina dan PT BSP. Dirinya tidak ingin masyarakat sekitar perusahaan tersebut hanya menjadi penonton.

"Mereka harus diperhatikan, tidak sebatas direkrut sebagai tenaga kerja tapi juga diperhatikan hak-hak lainnya. Perusahaan harus ikut terlibat membangun dunia pendidikan, kesehatan dan lainnya. terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang belum terbangun dengan baik," sebut Irul lagi.

Selain itu kata Irul, di tahun kedua dirinya akan terus mendorong agar program UED SP, In-bup-PPIP dan program-program yang menyentuh masyarakat lainnya tetap dilanjutkan. Namun katanya, evaluasi terhadap program tersebut harus tetap dilakukan agar tepat sasaran, sistemnya juga harus diperbaiki. Sistem pengawasan juga harus jelas, bangun koordinasi antara pemerintah desa, Kecamatan hingga dinas terkait agar proyek yang dikerjakan (Inbup-PPIP) tidak tumpang tindih.

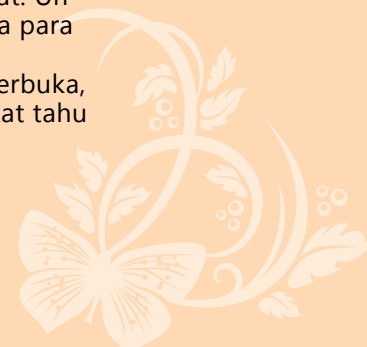
Selain itu katanya, sejauh ini masih banyak jalan-jalan lingkungan dan poros desa yang belum terbangun dengan baik atau mengalami kerusakan. Pekerjaan perbaikan selalau saja lambat dikarenakan menunggu proses tender yang terkadang juga terjadi keterlambatan. Untuk menyiasati persoalan itu, Irul menyarankan agar dana perawatan untuk masing-masing kecamatan diperbesar.

"Ketika terjadi kerusakan bisa langsung kita tangani, tidak harus menunggu tender, jadi kerusakan tidak bertambah parah. Untuk itu anggaran perawatan jalan di Kecamatan harus diperbesar. Akan lebih baik jika pemerintah juga memiliki stok material seperti pernah diwacanakan sebelum ini," sebutnya.

Awasi Kinerja Dewan

Sebagai wakil rakyat, selayaknyalah para wakil rakyat mendapatkan pengawasan dari rakyat. Untuk itu dirinya mengajak dan mendorong seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi kinerja para anggota dewan.

Banyak kegiatan di DPRD Bengkalis, seperti paripurna dan hearing-hearing yang sifatnya terbuka, dirinya berharap kegiatan seperti itu bisa dihadiri masyarakat secara langsung, agar masyarakat tahu dan bisa mengawasi apa yang dilakukan para wakilnya di gedung rakyat itu.





“Harus terbangun sinergi yang baik antara semua stakeholder, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dewan, begitu juga sebaliknya. Dewan juga tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan masyarakat. Semuanya serba kait kelindan harus saling dorong dan mengingatkan,” pesannya.

Seperti itu pula kritik yang sering disampaikan. Kendati kepala daerah adalah kerabat terdekat dan dibawah naungan satu partai, tidak membuat dirinya berdiam diri ketika melihat ada hal-hal yang

menurutnya perlu diingatkan.

Menurutnya, tidak mungkin kepala daerah mengetahui dan menguasai semua persoalan di lapangan. Adakala para pembantu (SKPD) juga abai dengan pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawab mereka. Disitulah kata Irul dirinya menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD. "Kritik konstruktif dalam upaya mengingatkan dan itu kita sampaikan dengan elegan. Saya sering sampaikan, saya memang Kader PAN, tapi saya membawa pesan masyarakat dan adakalanya kita harus berkorban demi kepentingan yang lebih besar, yakni rakyat," sebut Irul.

Penyamaan persepsi dan komitmen dalam membangun daerah ini harus dilakukan di semua lini. Tidak hanya antara legislatif dan eksekutif, tapi juga di tubuh legislatif dan eksekutif itu sendiri. Berasal dari beragam latar belakang yang berbeda, bendera juga berbeda, tidak heran jika di dalam internal DPRD sendiri terkadang terjadi perbedaan pendapat. Tapi perbedaan itu tidak lantas membuat mereka berkecai, dirinya yakin semangat yang ada tetap bermuara kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu rakyat.***

BIODATA

NAMA : FAKHRUL NIZAM, ST
TEMPAT/TGL LAHIR : Minas , 28 April 1976
ALAMAT : Jalan Sudirman Desa Lubuk Muda, Siak kecil
JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 085365193220
ISTRI : Dona Siska Handayani
ANAK : Dua orang
1. Muhammad Fairel Atharizz
2. Muhammad Azzam Ransi Alden
AYAH : H Nurzalna
IBU : Hj Fauziah Asmara, SS
RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SD Negeri 13 Lubuk Muda
2. SMP Negeri 1 Lubuk Muda
3. SMA Negeri 6 Pekanbaru
4. Universitas Islam Bandung
RIWAYAT PEKERJAAN : 1. Direktur CV Tuah Siak Kecil (2003 -2013)
2. Anggota DPRD Bengkalis (2014-2015)
RIWAYAT ORGANISASI : 1. Pendiri Organisasi Mahasiswa
Bengkalis- Bandung (2002)
2. Pengurus KPMR Bandung (1995- 1999)
3. Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau se-Indonesia (1999)



H MAWARDI



Sempat Hijrah

Balam kancah politik, H Mawardi bisa dikatakan pemain baru. Berbeda dengan anggota DPRD Bengkalis lainnya yang sebagian besar sudah makan asam garam di dunia politik. Pria yang hobi berpakaian jubah ini lebih banyak menghabiskan aktivitas sehari-hari sebagai wiraswasta. Namun, dari dunia wiraswasta inilah namanya cukup dikenal dan mengantarkan dirinya menjadi anggota DPRD Bengkalis periode 2014–2019.

Pernah gagal menjadi anggota DPRD Bengkalis pada Pemilu Legislatif 2004 silam, membuat anak pasangan H Usman dan Hj Maryam ini memutuskan untuk hijrah. Bukan karena merasa menyesal, melainkan ingin lebih mendekatkan diri kepada kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan. Saat itu, kenang Mawardi, dirinya mencalonkan diri dengan menggunakan Partai Persatuan Daerah (PPD), salah satu partai yang muncul pasca era reformasi. Saat itu, jumlah partai peserta Pemilu sebanyak 24 partai dengan jumlah calon yang cukup banyak.

Tingginya tingkat persaingan membuat putra asli Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis ini belum berhasil meraih suara yang cukup untuk mengantarkan dirinya menjadi anggota DPRD Bengkalis. "Saya gagal, sejak saat itu saya melupakan dunia politik dan lebih menekuni kegiatan-kegiatan keagamaan. Cukup lama juga sebelum akhirnya saya diajak bergabung dengan Partai PBB untuk kembali ikut pada bursa calon anggota legislatif pada Pemilu Legislatif 2014," ujar Mawardi.

Mendapat tawaran untuk kembali terjun di dunia politik, tidak lantas membuat ia menerima bulat-bulat. Melalui pertimbangan yang matang seberapa besar manfaat serta peluang dirinya untuk tetap istiqomah pada kegiatan keagamaan yang selama ini ia tekuni. Setelah melalui pertimbangan yang matang dan tidak lupa memohon petunjuk dari Allah SWT, ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke dunia politik. Ada misi khusus yang ia siapkan seandainya terpilih sebagai anggota DPRD Bengkalis, yaitu tetap berdakwah melalui jalur politik.

"Agama bagi saya itu nomor satu, tidak ada alasan untuk dinomorduakan. Begitu saya memutuskan untuk terjun ke dunia politik, saya pun sudah istiqomah, kalau terpilih nanti akan tetap berdakwah dan memberi warna pada setiap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah," ujarnya mantap.





Politik untuk Kemaslahatan

Kedudukan anggota dewan merupakan jabatan politis, artinya tidak terlepas dari intrik-intrik politik yang bagi sebagian orang selalu dinilai negatif. Menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi. Namun, pendapat seperti itu tidak berlaku bagi Mawardi. Pria yang dibesarkan kental dengan ajaran-ajaran Islam mengatakan, politik hanyalah sebuah cara, yang bernilai positif kalau sejak awal diniatkan untuk kemaslahatan umat. Sebaliknya, bernilai negatif kalau sejak awal memang diniatkan untuk hal-hal yang tidak benar.

Bagi ayah tiga anak ini, ia cenderung memanfaatkan jabatan politis ini untuk hal-hal yang bisa memberikan kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat. Dalam perspektif Islam, Mawardi mengatakan, harus diingat bahwa setiap jabatan politik hakekatnya berupa amanah dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik baiknya. Amanah itu tidak boleh disalahgunakan, misalnya untuk memperkaya diri atau menguntungkan kepentingan golongan sendiri dan menelantarkan kepentingan umum. Kedua, erat yang disebut



di atas, setiap jabatan politik mengandung dalam dirinya Masuliyyah atau pertanggung jawaban (accountability), sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW, setiap orang pada dasarnya pemimpin yang harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya dan tugas-tugasnya.

Kesadaran akan tanggung jawab ini menurut Mawardi, bukan terbatas dihadapkan pada institusi-institusi atau lembaga yang bersangkutan dalam hal ini DPRD misalnya. Lebih penting lagi adalah tanggung jawab dihadapan Allah SWT, dan dihadapan mahkamah yang lebih adil besok yakni akhirat. "Bagi umat Islam mutlak pentingnya iman kepada Allah SWT dan pertanggung jawaban kita di hadapan-Nya," ujarnya.

Seorang anggota dewan, yang kesadaran tanggung jawabnya pada Tuhan sangat dalam secara otomatis memiliki built in control yang tidak ada takarannya. Ia memiliki kendali dari dalam yang sangat kuat untuk tidak terperosok kedalam rawa-rawa kemunafikan.

Tidak kalah pentingnya, menurut Mawardi, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip uhkuwah (brotherhood), yakni persaudaraan diantara sesama umat manusia. Dalam arti luar meliputi batas-batas etnik, rasial, agama, latar belakang sosial, keturunan dan lain sebagainya. Misalnya, setiap orang terlepas dari latar belakang manapun ia datang, jika dipukul pasti merasa sakit, jika tidak makan pasti akan merasa lapar dan seterusnya.

Konsep Islam

Jebolan salah satu Madrasah Aliyah ini mengatakan, dengan menganut prinsip-prinsip di atas, maka berdakwah melalui jalur politik sebenarnya menghasilkan manfaat yang sangat luar biasa dalam membangun peradaban umat. Keberadaan wakil rakyat dengan mengedepankan politik Islam akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. kekhawatiran-kekhawatiran seperti adanya kepentingan kelompok, tindakan-tindakan KKN di lembaga legislatif tidak perlu terjadi ketika politik Islam benar-benar dilaksanakan. "Ini merupakan bagian dari dakwah bil hal (perbuatan). Kita beri contoh, dalam politik Islam itu seperti ini," katanya.

Dalam program-program perencanaan pembangunan, dirinya juga akan berupaya melakukan dakwah bil lisan yaitu melalui percakapan mengajak seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu mengedepankan nilai-nilai Islam. Islam menurut Mawardi, tidak hanya berbicara soal akhirat, tetapi juga kehidupan di dunia, karena dunia merupakan jalan menuju akhirat. Untuk itu, segala aspek kehidupan di dunia terutama dalam pemerintahan baik di bidang pendidikan, sosial, pembangunan fisik dan non fisik hendaknya selalu mengedepankan nilai-nilai Islam.

"Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, alangkah baiknya kalau para pelajar di Kabupaten Bengkalis menggunakan pakaian seragam yang Islami sebagaimana juga dilakukan di daerah-daerah lain seperti di Kampar," ujarnya.

Bisa juga diusulkan bahwa untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi, misalnya dari SD masuk SMP atau dari SMP masuk SMA harus ada tes membaca Alquran bagi umat Islam. Ini kesannya sepele, tapi memberikan dampak yang sangat besar dalam meningkatkan pemahaman pelajar dalam membaca Alquran. "Kadang saya merasa sedih melihat anak-anak kita yang nota bene Islam, tapi ketika membaca Alquran masih banyak kesalahan-kesalahan. Bahkan, ada yang sama sekali tidak bisa membaca Alquran dalam bahasa arab, melainkan pakai bahasa latin. Ini sungguh memprihatinkan," kata Mawardi.

Menyinggung tentang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis, Mawardi mengatakan, secara fisik masih jauh dari yang diharapkan. Seyogyanya pembangunan sarana fisik seperti jalan dan jembatan menjadi prioritas yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Dirinya beralasan, saran jalan dan jembatan merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ketika akses jalan dan jembatan menjadi ken-



dala, maka baik langsung atau tidak, pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan kena imbasnya. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, program subsidi terhadap produk pertanian maupun perkebunan yang sampai saat ini belum berjalan. Padahal, dengan kondisi ekonomi dunia yang gonjang ganjing, membuat harga jual karet dan sawit mengalami penurunan. Masyarakat Kabupaten Bengkalis yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari karet dan sawit merasa terpukul. Kalau program subsidi tersebut berjalan, maka masyarakat tidak perlu khawatir ketika terjadi penurunan produk-produk perkebunan dan pertanian mereka. Pemerintah Daerah akan menalangi harga jual yang rendah itu dengan memberikan subsidi sehingga perekonomian masyarakat di tingkat lokal tetap stabil. "Ini perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan saya akan mendorong agar program ini secepatnya bisa diwujudkan," ujarnya.***

BIODATA

NAMA : H MAWARDI
TEMPAT/TGL LAHIR : Bengkalis , 16 September 1976
ALAMAT : Jalan Utama Pangkalan Batang Bengkalis
JENIS KELAMIN : Laki- laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 08565709408
ISTRI : Irmawati
ANAK : Tiga orang
1. M Taufik Maulana
2.M Alpin Ama Aulia
3.M Haris

AYAH : H Usman
IBU : Hj Maryam

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SD
2. Madrasah Tsanawiyah
3. Madrasah Aliyah

RIWAYAT PEKERJAAN : - Wiraswasta
- Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)

RIWAYAT ORGANISASI : ● Karang Taruna Desa
● Pemuda Olahraga
● Anggota BPD



Memahami Apa yang Dibutuhkan Masyarakat

Pendidikan dan latar belakang pekerjaan serta kondisi lingkungan yang berbeda, seringkali memunculkan kesan dan tujuan atau cita-cita yang berbeda pula. Tujuan ingin memperjuangkan pemerataan pembangunan mungkin bukan menjadi hal aneh bagi sebagian para wakil rakyat, tapi meletakkan target itu menjadi tujuan utama bisa jadi tidak semua anggota dewan bisa melakukannya.

Tahun 1990, Lamhot Nainggolan pertama kali menginjakkan kaki di Negeri Junjungan, tepatnya di Duri, Kecamatan Mandau. Memang ia bukanlah siapa-siapa kala itu. Tak sungkan pula dia menyebut saat menginjakkan kaki di Duri hidupnya sangat sederhana, bekerja sebagai pengumpul barang bekas dan menjual ikan.

Kehidupan masyarakat grassroot dialami langsung suami Santi Nababan ini. Sehingga tidak mengherankan kalau dirinya tahu banyak dan paham betul apa yang menjadi keinginan dan apa yang harus diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat di akar rumput.

Berbekal pengalaman dan keprihatinan atas kondisi yang ada, tahun 2004, ayah lima anak ini memberanikan diri untuk bermain-main di ranah politik. Mantan wartawan Warta Pembangunan Riau dan kepala perwakilan Surat Kabar Prestasi ini bergabung dengan PKP Indonesia. Sayangnya, Lamhot yang saat itu maju dari Dapil Bukit Batu-Selat Panjang belum berhasil duduk sebagai anggota dewan.

Kegagalan menjadi wakil rakyat tidak lantas membuat pria hobi berkaca mata hitam ini putus asa. Lamhot malah terus memacu diri dengan banting setir menjadi wartawan, setelah bertahun-tahun berkutat di sejumlah perusahaan Migas yang berada di Duri.

Menjadi wartawan membuat wawasan dan relasi pria kelahiran Pandiangan, 19 Juni 1968 ini bertambah luas. Tidak hanya memahami karakteristik masyarakat, tapi juga memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka. Persoalan kesetaraan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur dan pendidikan selalu menjadi buah pikirnya.

"Harus kita akui, pembangunan yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Sebagian mereka ada yang masih berkutat dengan buruknya infrastruktur jalan, ketiada-



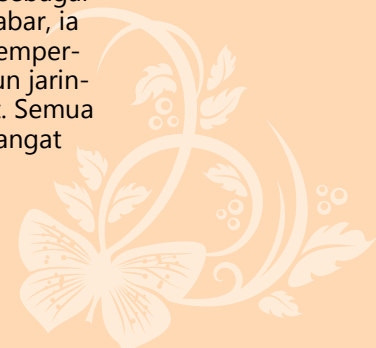
an listrik, bahkan untuk mengecap pendidikan juga sulitnya minta ampun," ujar Lamhot.

Karena semangat ingin memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat itulah, Lamhot kembali nekat mencalonkan diri untuk kembali bertarung menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Perahu yang ditumpangnya masih sama, PKP Indonesia, hanya daerah pemilihan yang berbeda, Mandau-Pinggir.

Lagi-lagi, nasib baik belum menyebelahi anak pasangan S Nainggolan dan Br Nababan ini. Cita-cita Lamhot kembali kandas, walau perjuangan yang dilakukan sudah maksimal. Sesetengah orang, mungkin kapok dan tidak akan pernah lagi bermain di dunia politik. Atau bisa jadi kegagalan dua kali ini membuat patah semangat lalu melampiaskan kepada hal-hal yang menyimpang atau melanggar aturan.

Tapi, tidak dengan pria satu ini. Dua kali gagal menjadi anggota dewan malah memecutnya untuk lebih serius berkiprah di dunua jurnalistik seraya terus membangun jaringan di tengah masyarakat. Bukti keseriusan di bidang yang ditekuni, Lamhot dipercaya menjadi kepala perwakilan Surat Kabar Prestasi Provinsi Riau.

Di sela-sela pekerjaan sebagai kepala perwakilan surat kabar, ia terus membangun diri, memperluas relasi dan membangun jaringan di tengah masyarakat. Semua itu dilakukan, karena semangat





atau keinginan untuk menjadi wakil rakyat masih begitu kuat.

"Makin saya tekuni dunia wartawan, makin banyak tahu dengan berbagai persoalan dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Makanya, semangat untuk berkecimpung di dunia politik memperjuangkan aspirasi masyarakat seperti ini tak pernah padam," sebutnya.

Puncaknya pada Pemilu 2014, Ketua DPK PKPI Kecamatan Mandau ini kembali bertarung untuk menjadi wakil rakyat. Masih dengan partai yang sama, mantan ketua solidaritas Batak Ladang Tengah yang terjun di Dapil V Mandau ini akhirnya terpilih dan melenggang berkantor di gedung rakyat. "Puji Tuhan, akhirnya saya diberikan kemenangan," ujarnya.

Pembangunan Seimbang

Tahun pertama duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis, Lamhot berkuat dengan seabarek tugas. Mulai membahas Tata Tertib Dewan bersama anggota yang lain, menyamakan persepsi tentang fungsi legislatif dan hak-hak serta kewajiban, seraya mengingat-ingat apa yang menjadi tujuan utama dan memperjuangkannya hingga terealisasi di anggaran.

Selain soal pemerataan pembangunan, hak-hak untuk memperoleh pendidikan yang sama bagi anak-anak di Kabupaten Bengkalis adalah sebagian aspirasi yang harus diperjuangkan. Satu hal yang menjadi persoalan di dunia pendidikan katanya, sulitnya anak-anak lulusan SLTP untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kurangnya ruang belajar menjadi isu utama saban tahun setiap proses Penerimaan Siswa Baru (PSB). Tak jarang, sulitnya masuk sekolah lalu dengan alasan lokal kurang, dimanfaatkan oknum kepala sekolah "menjual" bangku kepada para orang tua siswa. Maka, transaksi atau jual beli bangku seringkali terdengar, walau hanya sayup dan redup.

"Saya tahu persis itu, karena terjadi saban tahun atau setiap kali penerimaan siswa baru, terutama di Kecamatan Mandau. Mestinya hal-hal semacam ini tidak terjadi, apalagi alasan kekurangan lokal di daerah kaya seperti Bengkalis ini," sebutnya.

Kenyataan di depan mata itu memang menjadi target bagi Lamhot bersama rekan dewan yang lain untuk segera dicarikan jalan penyelesaiannya. Dinas Pendidikan, sebut Ketua Bidang Kebudayaan IBKRD Duri ini harus memiliki data, berapa jumlah ruang belajar serta berapa daya tampung siswa setiap tahun. Jika memang ruang belajar kurang sehingga daya tampung tidak memadai, maka mau tak mau harus ditambah ruang belajar.

Tapi sebutnya, jika kekurangan ruang belajar di satu sekolah terjadi karena penumpukan siswa, harus pula ada kebijakan Dinas Pendidikan. Misalnya, siswa mana saja yang boleh masuk sekolah tersebut. Ditentukan berdasarkan jarak dari sekolah atau seperti apa kebijakannya.

"Yang penting menurut saya adalah langkah-langkah kongkrit dari SKPD terkait untuk menuntaskan persoalan ini sehingga tidak berlarut-larut saban tahun. Kami terus mendorong SKPD terkait untuk mencari solusi guna memecahkan persoalan ini," katanya.***

BIODATA

NAMA : LAMHOT NAINGGOLAN
 TEMPAT/TGL LAHIR : Pandiangan, 19 Juni 1968
 ALAMAT : Jalan subrantas Gg Amal RT 04 RW 05 Duri Timur
 JENIS KELAMIN : Laki laki
 AGAMA : Kristen Protestan
 NO.TELP/HP : 0823 83685111
 ISTRI : Santi Nababan
 ANAK : Lima orang
 1. Harry Nainggolan
 2. Susy Nainggolan
 3. Eva Dahlia Nainggolan
 4. Fery Nainggolan
 5. Golfry Nainggolan
 AYAH : S Nainggolan
 IBU : Br Nababan

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SD Negeri 030403 Pandiangan (1980)
 2. SMP Masyarakat Sempung (1983)
 3. SMA Trisakti Medan (1986)
 4. Mahasiswa Hukum STIH Persada Bunda
 RIWAYAT PEKERJAAN : - Jadi Pemulung, Menjala Ikan (1990-1993)
 - PT Radiant Utama (1993 -1996)
 - PT Tripatra (1996- 2003)
 - Wartawan Warta Pembangunan Riau (2003-2007)
 - Koordinator Surat Kabar Harian Prestasi (2007 - 2013)
 - Anggota DPRD Bengkalis 2014-2019
 RIWAYAT ORGANISASI : ● Protokoler Adat Batak (1997-2013)
 ● Ketua Bidang Kebudayaan IKBRD Duri (2013)
 ● Ketua Solidaritas Batak Ladang Tengah
 ● Ketua DPK PKPI Kabupaten Bengkalis (2014-sekarang)



Tidak Ada yang Mustahil, Semua Tergantung Niat

Berpenampilan nyentrik dengan rambut gimbal panjang hingga menyentuh pinggang, membuat politisi Partai Golongan Karya satu ini mudah dikenal dan selalu menjadi perhatian. Bukan hanya soal penampilan yang selalu menjadi buah bibir, tapi juga soal kemauannya menjadi anggota dewan, karena pria berlatar belakang pengusaha perkebunan ini terbilang sangat sukses.

Lalu mengapa Sihol Pangaribuan terjun berusah-susah menjadi anggota dewan. Membahas anggaran hingga larut malam bahkan dini hari, meladeni segala bentuk aspirasi, belajar memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi dewan. Jawabannya pasti bukan karena materi, mengingat untuk yang satu itu sudah ada di genggaman.

Jawabannya memang tidak jauh berbeda dengan rekan dewan yang lain, Sihol ingin berbuat lebih dari yang sudah dilakukan sebelum ini. Apalagi menurutnya, masih banyak hak-hak rakyat sipil yang belum terakomodir dengan baik.

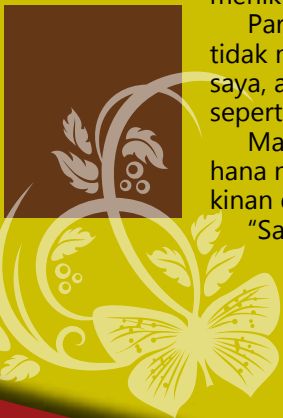
"Saya ingin berbuat lebih dari apa yang sudah saya lakukan selama ini, tidak sekadar untuk lingkungan atau orang-orang terdekat, tapi untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis. Minimal untuk daerah pemilihan saya," sebut pria kelahiran 1971 ini.

Diakui, di negeri kaya ini masih begitu banyak masyarakat yang hidup dengan ekonomi pas-pasan. Tidak hanya dari segi materi, apa yang menjadi hak mereka juga sering terabaikan. Seperti hak untuk menikmati infrastruktur dasar yang layak, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Parahnya, kata Ketua SPTI Duri periode 2006-2010 ini, terkadang kebijakan yang diputuskan pemerintah tidak memihak kepada mereka. Bahkan terkadang mereka tergerus oleh kebijakan tersebut. "Semampu saya, akan saya perjuangkan apa yang menjadi hak mereka. Baik itu kebutuhan akan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air dan lainnya. Juga kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan," sebut Sihol.

Mampukah ayah tiga orang anak ini mewujudkan cita-citanya tersebut. Terlahir dari keluarga sederhana namun teguh memegang prinsip, bagi Sihol tidak ada yang tidak bisa dilakukan, asal memiliki keyakinan dan kemauan serta berusaha maksimal untuk mewujudkannya. Semuanya tergantung niat.

"Saya terlahir dari keluarga sederhana, namun orang tua saya selalu menanamkan kepada anak-anak-

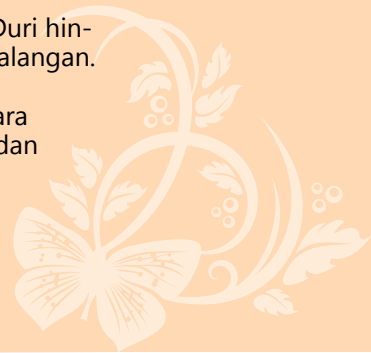




nya betapa pentingnya pendidikan dan kerja keras. Alhamdulillah, berkat semangat dan keyakinan itu, kami menjadi seperti yang sekarang ini. Begitupun soal memberikan pelayanan dan membangun ekonomi masyarakat, bagi kami tak ada yang mustahil, kuncinya kita harus bekerja sungguh-sungguh," sebut suami Lasminah ini.

Dipercaya sebagai Ketua IKBRD priode 2009-2012 serta menjadi penasehat Ikatan Mahasiswa Duri hingga sekarang, membuat dirinya sudah terbiasa mendengar dan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan. Tidak hanya dari para anggota IKBRD yang diayominya, tapi juga dari kalangan intelektual.

Modal keaktifan dirinya di sejumlah organisasi termasuk kala menjadi Ketua Yayasan Bela Negara membuat pria kelahiran Marihat Ulu ini tidak canggung saat menyuarakan berbagai kepentingan dan





aspirasi masyarakat kecil. Sadar jika 44 rekannya di DPRD juga memperjuangkan aspirasi konstituen, Sihol terus berupaya maksimal termasuk melakukan lobi-lobi, agar usulannya tidak tertindih kepentingan atau usulan orang lain.

Diakui, tahun pertama duduk sebagai anggota DPRD, banyak hal yang harus dipelajari. Tidak hanya soal aturan dan tata tertib serta tugas pokok yang melekat di lembaga negara tersebut, tapi juga soal memahami karakter teman-temannya di dewan.

Berbeda latar belakang dan pendidikan, membuat cara pandang masing-masing anggota dewan berbeda pula. Apalagi mereka juga berasal dari partai politik yang berbeda. "Komitmennya sama, men- gemban amanah masyarakat dan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi mereka. Soal



bagaimana caranya, bagi saya itu tidaklah penting. Lalu apa yang penting, masyarakat mendapatkan apa yang menjadi hak mereka,” tegas Sihol.

Lalu bagaimana sikap dan pandangannya masuk tahun kedua sebagai anggota DPRD. Bagi Sihol, sebagai orang yang memegang teguh pesan dan nasehat orang tua, dirinya tetap mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Karena baginya, duduk sebagai anggota dewan semata-mata untuk menyambung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Semangat di tahun kedua, tetap sama seperti di awal-awal jadi anggota DPRD. Terus bekerja keras, berusaha maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat banyak. Apapun hasilnya nanti, tergantung bagaimana kita berusaha mewujudkannya,” paparnya.***

BIODATA

NAMA	: SIHOL PANGARIBUAN
TEMPAT/TGL LAHIR	: Marihat Ulu, 13 Januari 1971
ALAMAT	: Jalan Kayangan No 126 Duri Mandau
JENIS KELAMIN	: Laki-laki
AGAMA	: Islam
NO.TELP/HP	: 0812 620 2783
ISTRI	: Lasminah
ANAK	: Tiga Orang 1. Tantowi Saputra Pangaribuan 2. Hendrik Firnanda Pangaribuan 3. Rindang Mardiana Pangaribuan
AYAH	: Firman Pangaribuan
IBU	: Portina
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1. SDN 01 Marihal Ulu Sumut 2. SMPN 08 Pematang Siantar Sumut 3. SMA Harapan Sumut 4. Universitas Generasi Muda
RIWAYAT PEKERJAAN	: - Wiraswasta - Direktur PT Taherin - Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)
RIWAYAT ORGANISASI	: ● Ketua Yayasan Bela Negara ● Ketua SPTI Duri (2006- 2010) ● Ketua IKBRD (2009- 2012) ● Penasehat Ikatan Mahasiswa Duri



SIMON LUMBAN GAOL



Petani Sawit Menjadi Legislatif

Nama Simon Lumbangaol sudah tak asing bagi warga Duri XIII Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selain dikenal sebagai petani sawit, dia juga merupakan ketua adat Batak di desa tersebut.

Posisi sebagai ketua adat membuat, Simon ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah dalam pergaulan oleh masyarakat Batak di Duri XIII. Walau demikian hal itu tidak mengubah sosoknya yang bersahaja itu. Baginya, jabatan adalah amanah.

Kematangan berpikir ini merupakan hasil dari pengalaman hidup yang dijalannya baik semasa di kampung maupun diperantauan. Tamat SMA di Langkat, Sumatera Utara tahun 1993, dia mengadu untung ke Medan dengan bekerja di bengkel las selama 1 tahun.

Sebagaimana kebanyakan anak muda yang selalu ingin berkembang, anak keempat dari enam bersaudara inipun demikian. Bagi anak pasangan Dominikus Lumban Gaol- Leria Br Sihombing Simon ini, bekerja sebagai tukang las dirasa belumlah cukup.

Apalagi saat menuntut ilmu di bangku SMA, Simon termotivasi oleh perkataan Calvin Sinurat, guru PMP-nya. "Dari pada kamu melamar pekerjaan ke perusahaan yang besar, lebih baik kamu membuka pekerjaan sekecil apapun," kata Simon mengutip perkataan gurunya itu.

Niat membuka pekerjaan tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu ilmu dan modal. Tahun 1994, Simon mencoba mencari kehidupan yang lebih baik dari sekedar tukang las. Ia kemudian merantau ke Pekanbaru, di Kota Bertuah itu Simon tinggal di Labuh Baru.

Berbekal ijazah SMA dan ilmu di bengkel las, Simon kemudian diterima bekerja di PT Andipo perusahaan yang bergerak di sektor eksplorasi minyak (kontraktor Caltex). Kecerdasan dan wataknya yang keras menjadi pertimbangan pihak perusahaan dengan mengangkat Simon sebagai mandor sehingga kemudian ia menetap di Duri XIII.

Dari PT Andipo, pada tahun 1998 Simon kemudian pindah kerja ke PT Sikampak, masih perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan (kontraktor Caltex). Saat itu, Simon sudah berumah tangga dengan mempersunting gadis pujaanya Sintauli Veronica A Manik.



Dia perusahaan ini dia kembali mendapat jabatan bagus, yakni sebagai koordinator. Lazimnya perusahaan mencari minyak, kontrak kerjanya hanya hitungan bulan, bukan tahunan seperti perusahaan-perusahaan lainnya.

Situasi ini membuat lelaki kelahiran Desa Paya Bengkuang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini memutar otak untuk masa depan keluarganya yang lebih baik. Dia kemudian membeli sebidang lahan seluas 2 hektar di Duri XIII yang kemudian ditanaminya kelapa sawit. Ternyata jalan hidup sebagai petani ini membuat kehidupannya lebih tenang.

Namun demikian, kata-kata sang guru masih tengiang jelas di telinganya. Kata-kata itu bagi Simon bukan beban, tetapi sebaliknya motivasi untuk membuka pekerjaan bagi orang lain. Bermodalkan jiwa berorganisasi dan semangat kerja yang bergelora, ayah dari Leo Batistuta Lumban Gaol, Evandro Batis Tirta Lumban Gaol, Sarianan Defar Lumbangaol dan Taripar Mezar Lumban Gaol ini masuk organisasi buruh pada tahun 2005.

Masuk Sistem

Simon bergabung dengan Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI) Mandau-Pinggir. Di organisasi buruh ini, pria kelahiran 1974 ini menjabat sebagai Sekjen Dewan Pimpinan Cabang Mandau-Pinggir.

Masuk ke organisasi buruh semakin membuat cakrawala berpikir Simon semakin matang dan kritis. Jiwanya mulai berontak melihat kesenjangan penyaluran dana bantuan sosial antara masyarakat kota dengan masyarakat pelosok atau dusun.

Semakin hari pertanyaan di dadanya semakin membuncah. Ini membuat seorang Simon terpenggil dan ingin mencari titik simpul masalahnya. Untuk mengetahui itu, ia harus masuk ke sistem sebagai mitra pemerintah. Ia kemudian bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jabatan Ketua Ranting di Desa Kesumbo Ampai pada tahun 2007.

Enam tahun kemudian, Simon naik dari ketua ranting menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Bengkalis. Ia membidangi Departemen Bidang Organisasi di partai berlambang banteng moncong putih itu. Rupanya, selain petani dan organisasi buruh, di politik Simon juga selalu dipayungi dewi furtuna. Pemilu 2014, ia mencoba keberuntungan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari daerah Pemilihan Mandau B.

Ternyata kerja keras dan doa Simon dikabulkan tuhan. Dengan mengantongi sebanyak 1.997 suara, ia pun melenggang ke gedung dewan di Jalan Antara, Bengkalis. Saat ini, Simon tidak hanya dikenal masyarakat sebagai petani, ketua adat dan buruh, tetapi juga anggota DPRD Bengkalis.

Dengan masuk ke sistem, tentu besar harapan masyarakat khususnya masyarakat di pedusunan untuk mendapatkan perhatian pembangunan dari pemerintah. "Sekarang Bansos tak ada. Tapi, saya tetap membantu masyarakat melalui dana reses. Jika tak bisa memberi seribu, lima ratus tetap saya kasih," ujarnya.

Di mata Simon, potensi ekonomi masyarakat di pedesaan Kabupaten Bengkalis sangat tinggi. Hanya saja, tidak ditunjang oleh infrastruktur jalan yang memadai. "Saya ingin pemerintah membangun jalan akses ke kebun-kebun masyarakat agar hasil panen mereka cepat dipasarkan. Bukan seperti saat ini, panen mereka sulit dibawa keluar, karena jalan tak memadai," ujarnya.

Selain itu, hari kerja petani khususnya petani sawit lebih banyak santai. Mereka panen dua minggu sekali. Agar mereka produktif, instansi terkait harus membuat program agar tak ada hari yang terbuang sia-sia. Program yang dimaksud Simon adalah perikanan darat.

"Petani sawit panennya dua minggu sekali. Berarti mereka kerja hanya sekali dalam dua minggu. Agar mereka produktif, pemerintah harus membuat program perikanan darat (tambak), biar hari luang mereka produktif dan perekonomian mereka meningkat," ujar Simon ***



BIODATA

NAMA : SIMON LUMBAN GAOL
TTL : Paya Bangkuang , 23 Agustus 1974
ALAMAT : Jalan Duri XIII, Kecamatan Mandau
JENIS KELAMIN : Laki laki
AGAMA : Khatolik
ISTERI : Sintauli Veronica A Manik
ANAK : Empat Orang

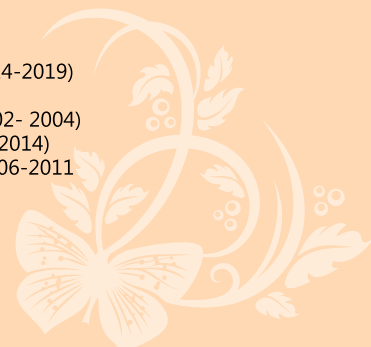
1. Leo Batistuta Lumban Gaol
2. Evandro Batis Tirta Lumban Gaol
3. Sariaman Defar Lumban Gaol
4. Taripar Meizar Lumban Gaol

AYAH : Dominikus Lumban Gaol (Alm)
IBU : Leria Br Sihombing

RIWAYAT PENDIDIKAN :
1. SD Bukit Mengkirai Sumut (1987)
2. SMP Swasta Yayasan Wijasarma Langkat Indah, Sumut (1990)
3. SMA Swasta Wijasarma Langkat Indah, Sumut 1993

RIWAYAT PEKERJAAN :
- PT Andipa (1995)
- PT Sikampak (1998)
- Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)

RIWAYAT ORGANISASI :
1. Sekretaris Serikat Pekerja (2002- 2004)
2. Ketua PUK FSPTI-SPSI (2005- 2014)
3. Ketua Ranting PDIP Tahun 2006-2011



SUSIANTO SR



Kebutuhan Infrastruktur Dasar Jadi Target

Berbeda dengan sebagian orang yang harus jatuh bangun untuk mengejar impian jadi anggota dewan. Tidak hanya satu kali, ada yang sampai berkali-kali namun retak tangan tak juga mengantar mereka ke kursi dewan.

Di lain pihak, tak jarang mereka yang sebelumnya tidak punya niat sama sekali menjadi wakil rakyat, tapi kemudian bisa melenggang tanpa harus bersusah payah. Entah retak tangan atau memang sudah kehendak yang kuasa, tapi itulah yang dialami politisi PKS, Susianto, SR ini.

Di Desa Bulu Apo pemekaran Desa Petani Kecamatan Pinggir, petani sawit sukses satu ini memang sudah cukup dikenal. Dia satu diantara tokoh masyarakat yang cukup disegani. Karena ketokohan itu pula, dirinya didekati sejumlah pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dan kemudian dimasukkan kedalam daftar Caleg pada Pemilu Legislatif 2014.

"Terus terang sejak dulu saya tidak pernah berkecimpung di dunia politik, menjadi pengurus partai atau apalah istilahnya. Sampai kemudian pada Pemilu 2014, kawan-kawan PKS mengajak saya bergabung untuk ikut menjadi Caleg Dapil IV," ungkap Susianto.

Lalu mengapa harus PKS. Tidak pernah terpikir olehnya untuk memilih partai yang pernah merajai perolehan kursi di DPRD Bengkalis pada periode 2009-2014 itu, kebetulan saja waktu itu yang mengajak dirinya para pengurus PKS.

Atas rayuan itu, tidak serta merta pria kelahiran Pulu Raja, 19 Maret 1969 silam ini mengiyakan. Pria yang akrab disapa Ukok ini terlebih dahulu bertanya dengan istri dan karib kerabatnya. "Setelah berembuk dengan keluarga, akhirnya semua sepakat, menyetujui saya bergabung dengan PKS untuk ikut ambil bagian pada Pemilu 2014," kenangnya.

Ia mengaku banyak dibantu para pengurus DPRA PKS yang ada di Kecamatan Pinggir. Setiap kali turun untuk sosialisasi, dirinya selalu didampingi para DPRA. Sebagai kader partai baru dan memang tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik, suami Sulindawati ini cukup terbantu dan memanfaatkan kesempatan itu dengan sungguh-sungguh demi meraih simpati masyarakat.

Tak disangka, pekerjaan di masa injury time itu ternyata membuahkan hasil yang manis. Ayah empat







orang anak itu terpilih satu diantara sekian Caleg yang lolos sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2014-2019.

Komitmen Junjung Amanah

Tahun pertama duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis, Ucok memang harus banyak belajar tentang dunia kerja barunya di gedung rakyat. Walau sebetulnya, bekal untuk berkarier di dunia politik sudah didapat dari wejangan para sepuh kader partai dan rekan sejawat.

"Awalnya memang tidak menduga bakal menjadi anggota dewan, tapi tidak mesti setelah berhasil duduk saya berleha-leha dengan fasilitas yang ada. Di pundak saya saat ini ada amanah ribuan masyarakat, saya harus perjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka," tegas Ucok.

Pria yang menamatkan pendidikan di Universitas Negeri Medan tahun 2003 lalu ini berambisi merealisasikan hak-hak dasar yang belum dinikmati sebagian masyarakat di daerah pilihannya. Seperti kondisi jalan poros yang belum seluruhnya terbangun, listrik yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan sejumlah infrastruktur lainnya.

Diakui, untuk meloloskan usulan-usulan tersebut dirinya harus bekerja ekstra, karena tidak hanya usulan konstituennya yang harus dikabulkan, puluhan anggota dewan yang lain juga membawa pesan yang sama dari masyarakat.

"Alhamdulillah di tahun pertama, walau belum seluruhnya terealisasi, tapi setidaknya sudah ada yang diakomodir. Seperti jalan poros, jalan lingkungan dan listrik. Insyaallah di tahun kedua, kebutuhan infrastruktur dasar ini tetap menjadi target untuk saya perjuangkan," sebutnya.

Karena komitmen ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat, mantan karyawan PT Rokan Permai Timber ini harus rela mengorbankan banyak waktu. Masa-masa senggang dan santai saat sebelum menjadi

wakil rakyat sudah jauh berkurang, kini sebagian besar waktunya dihabiskan untuk terus menjalin komunikasi dengan masyarakat, menyerap aspirasi mereka dan aktif di berbagai kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis.

Lalu apa harapan untuk institusi dimana dirinya menjadi bagian di dalamnya, kata Susianto, sadar atau tidak, stigma kurang baik saat ini melekat di rumah rakyat itu. Marwah DPRD harus kembali diangkat, agar keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu upaya ke arah itu, hubungan antara sesama anggota dewan dan pimpinan harus dipaduserasikan, agar kinerja DPRD semakin baik untuk kedepannya.

Tidak hanya kompak di dalam, hubungan antara Pemkab dengan Dewan juga harus sinergi. Dewan dan Pemkab punya kewajiban untuk bersama-sama merealisasikan apa yang menjadi tujuan awal. Dewan berkomitmen menjalankan tiga fungsi sesuai dengan amanat undang-undang dan Pemkab juga berkomitmen merealisasikan apa yang sudah menjadi kesepakatan.

"Kalau semuanya sinergi, berkomitmen dan satu pandangan, saya yakin program percepatan pembangunan yang kita jalankan akan semakin ringan dan mudah. Memang bukan pekerjaan yang mudah, karena kita berasal dari rahim yang berbeda. Tapi tak ada yang mustahil jika kita memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita," ujarnya.***

BIODATA

NAMA	: SUSIANTO SR
TEMPAT/ TGL LAHIR	: Pulu Raja, 19 Maret 1969
ALAMAT	: Jalan Rokan RT 02 RW 09 Desa Pinggir
JENIS KELAMIN	: Laki-laki
AGAMA	: Islam
NO. Telp/HP	: 081371014641
ISTERI	: Sulindawati
ANAK	: Empat Orang
	1. Ardiansyah Ramadhan
	2. Aldino Syahputra
	3. Dicky Setiawan
	4. Dini Nurputri Atika
AYAH	: Saru (Alm)
IBU	: Kasminah(Almh)
RIWAYAT PENDIDIKAN	1. SDN 094147 Parmonangan (1991)
	2. SMPN 1 Tiga Balata (1994)
	3. SMAN 1 Siantar (1997)
	4. Universitas Negeri Medan (2003)
RIWAYAT PEKERJAAN	:
	● Pegawai PT Rokan Permai Timber
	● Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)



SUKADDI



Asa Masyarakat Harapan Baru

Kesuksesan Sukaddi duduk di DPRD Kabupaten Bengkalis bisa dikatakan sebuah lompatan besar dalam hidupnya di kancah politik. Sebab, tak banyak orang yang bergabung dengan partai politik bisa duduk menjadi anggota legislatif.

Bungsu dari delapan bersaudara ini awalnya tak terpikir untuk betul-betul terjun ke dunia politik, apalagi menjadi anggota dewan. Maklum, setiap Pemilu buah hati pasangan Kar-midi-Siyam ini hanya menjadi simpatisan. Boleh dikatakan hanya pengembira sebagaimana umumnya rakyat kebanyakan dalam pesta demokrasi sekali lima tahun itu.

Selain itu, masa kecil Sukaddi memang jauh dari hingar bingar politik. Masa kecil hingga dewasa banyak dihabiskan di lingkungan perkebunan. Sebab, sang ayah adalah mandor kebun di PTP III. Jadi kebun bagi Sukaddi bisa dikatakan adalah urat nadi kehidupannya.

Setamat dari SMA 1 di Tanjung Balai, Asahan, Sukaddi langsung bekerja di perusahaan dimana ayahnya mengabdikan. Sebagaimana orang tuanya, Sukaddi juga dipercaya sebagai mandor di perusahaan milik BUMN itu.

Namun posisi sebagai mandor tak membuat Sukaddi puas. Jiwa mudanya yang selalu ingin mencari suasana baru membawa langkahnya ke Provinsi Riau. Sukaddi menyebutnya hijrah. Ia hijrah ke Riau tahun 1989 dan bekerja di PT Ivo Mas di kilometer 37, Balam, Baganbatu.

Hanya setahun di PT Ivo Mas, Sukaddi pindah ke PT Murini. Kendati sudah menjadi karyawan perusahaan besar, tetap membuat Sukaddi kurang nyaman. Jiwa tani yang melekat pada diri suami Lagiem ini, mendorongnya untuk kembali menjadi petani.

Ia kemudian membeli lahan di Desa Harapan Baru yang kemudian ditanaminya kelapa sawit. Selain menjadi petani, bapak 7 anak ini juga dipercaya masyarakat mengelola pembangkit listrik tenaga diesel yang dibeli dari swadaya masyarakat desa.

Kerja keras Sukaddi membuat PLTD berkembang dan saat ini sudah memiliki 750 pelanggan. Kehidupan di desa yang penuh kekeluargaan dan ditambah sebagai pengelola PLTD, membuat nama Sukaddi sangat dikenal di desa berpenduduk 1.000 kepala keluarga itu.







Sangatlah tepat ketika koleganya Nanang Harianto dan Rismayeni mengajaknya bergabung ke Partai Demokrat menjelang Pemilu 2014. "Saya masuk partai tahun 2014 diajak Pak Nanang Harianto dan Buk Rismayeni, langsung mencalon. Alhamdulillah terpilih," kenang Sukaddi.

Inilah awal karier lelaki kelahiran Bandar Pulau, Asahan, Provinsi Sumatera Utara ini di percaturan politik Kabupaten Bengkalis. Baginya, sukses sebagai politisi adalah sebuah amanah yang harus dipegang teguh.

Selain bangga memiliki wakil dari desa sendiri, masyarakat Desa Harapan Baru juga menggantungkan asa kepada Sukaddi. Masyarakat desa yang berjarak 20 kilometer dari Kota Duri itu sangat berharap agar Sukaddi dan para legislator lainnya bisa memperjuangkan peningkatan infrastruktur jalan dari Kota Duri ke Desa Harapan Baru dan desa-desa lainnya di Dapil Sukaddi. Dengan adanya jalan yang baik, tentu perekonomian masyarakat desa semakin meningkat.

"Dari Desa Harapan Baru saja setiap hari menghasilkan sebanyak 600 ton tandan buah segar sawit. Tapi, kalau musim hujan hasil panen sulit dibawa keluar karena jalan rusak," ujarnya.

Untuk itu, Sukaddi terus berupaya meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam setiap hearing menganggarkan peningkatan jalan baik di Desa Harapan Baru maupun desa-desa lainnya, agar hasil panen petani bisa cepat diangkut keluar.

Di samping itu, Sukaddi juga menjelaskan beberapa bidang lain yang perlu ditingkatkan agar pembangunan betul-betul dirasakan masyarakat. Diantaranya pendidikan, agama, olahraga dan kesehatan. Salah satunya, puskesmas Pembantu sangat dibutuhkan masyarakat.***

BIODATA

NAMA : SUKADDI
TEMPAT/TGL LAHIR : Bandar Pulau, 28 Maret 1965
ALAMAT : Jalan Sukojadi RT 09 /03
JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 0852 6426 7111
ISTRI : Lagiem
ANAK : Tuju Orang
1. Citra Suci Dewi
2. Rahmat Wahyudi
3. Muhammad Yogi Prayoga
4. Dewi Safitri
5. Arie Pratiwi
6. Indah Pratiwi
7. Achica Zhara Azhar

AYAH : Karmidi
IBU : Siyam

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SD (1980)
2. SMP (1983)
3. SMA (1986)

RIWAYAT PEKERJAAN : 1. PTPN III (1986-1989)
2. PT Ivo Mas Balam (1989-1990)
3. PT Murini Timber (1990-2000)
4. Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)

RIWAYAT ORGANISASI : 1. Pengurus LSM
2. Anggota Partai Demokrat



EDDY BUDIANTO



789 yang Bawa Haki

Sebagai manusia, kita tentu hanya bisa berencana, namun Tuhanlah yang menentukan segalanya. Seperti yang dialami Eddy Budianto, anak jati Desa Parit Rodi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, yang kini duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis.

Eddy menuturkan, setamat Sekolah Menengah Atas 1994, ia bercita-cita masuk Polisi. Namun niatnya itu ditentang oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya menginginkan agar anaknya itu berwiraswasta.

Padahal kalau kembali ke belakang, engkongnya adalah seorang veteran. Tapi, itulah kenyataan hidup. Keinginan Eddy untuk masuk Polisi kandas. Pupus cita-citanya jadi anggota Polri, tak lantas membuat anak keempat dari sepuluh bersaudara ini patah semangat.

Setahun kemudian anak pasangan Ahmad-Hj Umi Kalsum ini mencoba keberuntungan di Kota Duri. Berbekal keterampilan teknik sepeda motor, Eddy bersama temannya Heri Irsanto membuka bengkel sepeda motor "Maju Motor" di Simpang Padang, Duri. Cukup lama dia join dengan Heri. Barulah pada tahun 1998, Eddy memutuskan membuka bengkel sendiri yang diberinama Rosetor (Rombak Service Sepeda Motor).

Di Kota Duri, Eddy aktif di organisasi Paguyuban Tionghoa. Dia duduk sebagai Humas Peguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Duri. Selain itu, selaku cucu veteran, ia bersama temannya Syafruddin Ate tahun 1995 membentuk kepengurusan Pemuda Panca Marga Cabang Mandau dan sekaligus diangkat sebagai Komandan Batalion PPM Mandau.

Selain organisasi sosial, Eddy juga masuk partai PPIB dan ikut Pemilu Legislatif 2009. Di partai yang didirikan Dr Syahril ini, karier politik Eddy kurang cemerlang. Suara yang diperolehnya tak cukup untuk membawanya melenggang ke DPRD Bengkalis.

Namanya juga usaha, gagal soal biasa. Setahun menjelang Pemilu 2014, Eddy bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya. Dengan jabatan Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara, (Organisasi Sayap Partai Gerindra). Di partai yang didirikan Mantan Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto ini, Eddy mencoba mewujudkan mimpinya menjadi wakil rakyat.





Ternyata hokinya ada di Partai Gerindra. Dengan perolehan 789 suara, saudara kandung dai kondang Ustad Koko Liem inipun berhak atas satu kursi dewan dari Daerah Pemilihan 4 Mandau A. Seiring suksesnya Eddy menjadi anggota dewan, posisinya di PSMTI pun naik dari wakil ketua menjadi dewan kehormatan PSMTI Provinsi Riau.

Nomor Cantik

Di balik kesuksesan Eddy melenggang di DPRD Bengkalis, ternyata ada yang menarik dari hasil Pemilu Legislatif 2014 itu. Yakni hasil perolehan suara 789 menjadi nomor cantik baginya. Dengan urutan menaik itu, angka 789 ini memang menarik. Eddy kemudian menjadikan angka perolehan suaranya itu plat mobilnya.

"Suara saya 789, angka itu saya abadikan menjadi BM mobil saya," ungkap kakak kandung Ustad Koko Liem ini.

Selain pekerja keras untuk manggapai impiannya, Eddy juga orang teguh pada pendirian. Ketika kedua orang tuanya dan sembilan saudaranya masuk Islam, dia tetap memilih agama nenek moyangnya, Budha.

"Ibu dan Bapak saya mualaf, termasuk sembilan saudara saya. Tapi, saya menunggu hidayah," ujar ayah dari Yenny Agustina dan Dicky Julianto ini dengan suara mantap. ***



BIODATA

NAMA : EDDY BUDIANTO
TEMPAT/TGL LAHIR : Parit Rodi, Bengkalis 1 Desember 1973
ALAMAT : Jalan Mawar No 10/RT 03/ RW 05
JENIS KELAMIN : Laki- laki
AGAMA : Buddha
NO.TELP/HP : 0823 9191 2222
ISTRI : Dewana
ANAK : Dua orang
1. Yenny Agustina
2. Dicky Julianto

AYAH : Achmad (Alm)
IBU : Hj Umi Kalsum

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SDN 034 Temeran (1988)
2. SMPS Nusantara Pekanbaru (1991)
3. SMAS Nusantara Pekanbaru (1994)

RIWAYAT PEKERJAAN : - Direktur CV Rosetor Services (1998)
- Direktur Perumahan Cendrawasih
- Rigency (2002-2013)
- Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)

RIWAYAT ORGANISASI : ● Humas PSMTI Duri (1995-2008)
● Danyon PPM Mandau (1998)
● Wakil Ketua PSMTI Mandau (2008)
● Anggota Partai PPB (2009-2013)
● Ketua DPC Gemasadhana Bengkalis (2013-2015)
● Dewan Kehormatan PSMTI Riau (2014)
● Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Mandau (2015)
● Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia
● Raya Kabupaten Bengkalis
● Sekretaris fraksi Gerindra Kabupaten Bengkalis

ITA AZMI



Berawal dari Foto Copy KTP

Jika kala itu Bupati Herliyan Saleh tak meminta foto copy KTP-nya, tentulah sampai sekarang ia tetaplah Kepala Desa Serai Wangi yang dalam bahasa setempat disebut penghulu.

Itulah rahasia Allah SWT. Pertemuan, jodoh, rezeki dan maut hanya Allah yang tahu. Demikian juga dengan perjalanan hidup seorang anak bangsa bernama Ita Azmi. Sebelumnya pria kelahiran Muara Kelantan, Kecamatan Mandau tahun 1962 ini menganggap, dua periode menjadi Kepala Desa atau Penghulu merupakan sebuah anugerah dan pencapaian tertinggi.

Ternyata lembaran sejarah karir seorang Ita Azmi masih panjang dan menanjak. Ini berawal ketika suatu hari di tahun 2014 lalu, tiba-tiba telepon selulernya berdering. Ia pun kaget saat melihat yang menelponnya adalah Amril Mukminin, anggota DPRD Bengkalis.

Amril ternyata menyampaikan pesan Bupati Herliyan Saleh, agar ia menyerahkan foto copy kartu tanda penduduknya kepada Bupati. "Pak Penghulu, Pak Bupati minta foto copy KTP," kata Ita mengutip kata Amril saat menelponnya.

Permintaan orang nomor satu di Negeri Junjungan kala itu, tentu saja tak mungkin bisa ditolak. Dengan jabatan kepala desa, Ita adalah bagian dari sistem Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Posisi ini mengharuskan ia patuh dan menjalankan semua instruksi Bupati.

Foto copy KTP tersebut diserahkan kepada Herliyan Saleh pada saat acara pembagian ambulans desa di kantor Camat Pingir. Oleh Herliyan Saleh, foto copy KTP tersebut untuk memasukkan Ita Azmi dalam barisan Partai Amanat Nasional (PAN). "Seminggu kemudian, saya ikut pelatihan kader PAN," kenangnya.

Itulah awal Ita Azmi, anak ketiga dari lima bersaudara ini terlibat dalam politik yang sebenarnya. Sekaligus memperpanjang catatan riwayat hidupnya. Dua periode sebagai Kepala Desa Serai Wangi dan pernah menjadi Sekretaris Desa Tasik Serai pada tahun 1997, itu yang mendasari PAN merekrutnya guna mendulang suara di Pemilu Legislatif 2014.

Prediksi Herliyan Saleh yang juga Ketua DPW PAN Provinsi Riau, ternyata benar. Kepala desa yang mayoritas penduduknya adalah transmigrasi lokal hutan tanaman industri itu mendongkakan perolehan suara PAN. Alumni Sekolah Usaha Perikanan Pertama Dumai 1982 ini meraih 973 suara dari Daerah Pemilihan Pinggir dan



membawanya duduk menjadi anggota DPRD Bengkalis.

Di dewan, ayah 7 anak ini punya obsesi yang ingin diwujudkan. Yaitu melanjutkan program yang masih terkendala, seperti peningkatan jalan untuk 7 desa, Kesehatan, pendidikan, listrik masuk desa, peningkatan jalan dari ibu kota kecamatan ke desa-desa dan pemekaran kecamatan Tualang Mandau.

Sebelum pindah ke Desa Tasik Serai tahun 1995, Ita menetap di Kota Duri. Di kota minyak itu, ia pernah jadi pengurus berbagai organisasi, diantaranya pengurus Lembaga Adat Mandau, Karang Taruna dan Ketua RW. Pengalaman ini merupakan modal untuk mewujudkan obsesinya, yakni merealisasikan aspirasi masyarakat di Dapilnya. ***

BIODATA

NAMA	: ITA AZMI
TEMPAT/TGL LAHIR	: Muara Kelantan, 25 Juli 1962
ALAMAT	: Jalan Durian Desa Serai Wangi, Kecamatan Pingir
JENIS KELAMIN	: Laki-laki
AGAMA	: Islam
NO.TELP/HP	: 0812 6849397
ISTRI	: Khuraisen
ANAK	: Tujuh Orang 1. Rostiana 2. Novi Susanti 3. Muhammad Ginanjar Rismantara 4. Muhammad Ikhsan 5. Risa Tifa Sifa Putri 6. Muhammad Syarif 7. Nabil Fikri
AYAH	: H Abdul Karim (Alm)
IBU	: Hj Jamilah (Almh)
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1. SDN (1976) 2. SMPN/ SUPP (1983) 3. SMA/Paket C (2011)
RIWAYAT PEKERJAAN	: - Pedagang Keliling (1984 –1995). - Sekdes Tasik Serai (1995- 2004) - Kepala Desa Serai Wangi (2003-2009) - Kepala Desa Serai Wangi (2009-2015/mundur) - Anggota DPRD Bengkalis (2014-2019)
RIWAYAT ORGANISASI	: ● Pengurus LAM Mandau (1989-1993) ● Ketua Karang Taruna Serai Wangi (1995-2004) ● Partai Golkar (1995-2005) ● Partai Amanat Nasional (2014-sekarang)



ZULKIFLI



Hasil Hari Ini Adalah Perbuatan Masa Lalu

*Siapa menanam pasti akan menuai
Hasil hari ini adalah perbuatan masa lalu*

Ungkapan ini sepertinya diyakini betul oleh Zulkifli keampuannya. Tanpa ini semua, bisa jadi dia tidak akan mendapat simpati masyarakat untuk bisa duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2014-2019.

Kenapa demikian. Sebab, saat maju mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Hati Nurani Bangsa (Hanura), bapak dua orang anak ini tidak memakai tim sukses sebagaimana Caleg pada umumnya. Bukan berarti ia menganggap tim sukses tidak penting, tapi lebih disebabkan faktor finansial, tidak punya dana untuk itu.

"Saya tak punya tim sukses, karena tak punya uang," kenangnya waktu itu.

Kendati tak memiliki tim sukses bukan berarti Zul, demikian dia biasa disapa, tak punya modal. Modalnya adalah lima tahun sebagai ketua Rukun Warga alias Pak RW 02, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau. Dari tahun 2009-sampai tahun 2014 menjabat ketua RW, warga paham betul dengan sepak terjang dan kinerjanya, yang tanpa pamrih dan tidak membedakan suku dan agama.

Selaku ketua RW, Zul menjadi tempat berkeluh kesah warga. Mulai dari masalah KTP sampai tak ada biaya melahirkan pun diadukan warga kepadanya. Lelaki berpostur tegap ini juga peduli dengan masalah agama. Dengan dibantu warga, dia menyelenggarakan zikir bersama dengan mendatangkan Ustad Koko Liem dari Jakarta. Kegiatan ini biayanya dari swadaya masyarakat. Kemudian pada tahun 2013, Zul diangkat sebagai ketua panitia Hari Besar Islam Kecamatan Mandau.

Selain aktif di keagamaan, Zul juga aktif di organisasi kemasyarakatan. Tahun 2000, ia menjadi pengurus Pemuda Pancasila Kecamatan Mandau. Selanjutnya, tahun 2010 menjadi pengurus Majelis Pengurus Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bengkalis.

Di samping itu, Zul juga aktif di organisasi adat. Zul salah seorang pengurus Lembaga Adat Melayu Riau-Duri. Hal hasil, ketika suami dari Trilina Yati, SE, ini maju sebagai anggota legislatif, masyarakat sangat mendukungnya.



Hanya saja, Zul tetap tahu diri karena tak punya uang untuk membiayai kampanye seperti Caleg lainnya. Jika Caleg lain pakai tim sukses untuk menyampaikan programnya kepada masyarakat, Zul sebaliknya turun langsung menyampaikan kepada warga bahwa dia ikut Caleg. “Kepada teman-teman, dimana bertemu, saya bilang, tolong dibantu saya. Hanya ucapan itu, tidak ada embel-embel lain,” kata Zul bersahaja.

Cara kampanye dialogis ini dilakukannya selama masa kampanye, baik di jalan maupun di kedai. Bukan dengan memberikan beragam bantuan material kepada masyarakat. Ini dilakukan agar masyarakat tahu bahwa dia maju sebagai Caleg.

“Jika bicara dana kampanye, saya pasti kalah. Dibandingkan dengan teman-teman sesama Caleg lainnya, saya nggak ada apa-apanya,” ujar Zul.

Politik bagi Zul bukan hal baru. Setiap pesta demokrasi (Pemilu) dia selalu didatangi calon legislatif dan diminta menjadi tim sukses sang Caleg. Dan orang yang dibantunya itu berhasil duduk menjadi anggota dewan. Berangkat dari kesuksesan Caleg yang dibantunya, Zul kemudian betul-betul terjun ke politik.

Pada tahun 2011, ia bergabung dengan Partai Hanura dengan jabatan wakil ketua Bidang Organisasi. “Dulu saya hanya partisan PAN, tahun 2011 saya masuk Hanura,” ujar Zul mengenang masa-masa awal dia serius berpolitik.

Ternyata, Zul tak hanya sukses sebagai tim sukses orang lain, sekarang dia juga sukses sebagai pelaku. Padahal waktu itu, bapak dua anak ini mengaku maju sebagai Caleg pada Pemilu Legislatif 2014 dengan istilah iseng-iseng berhadiah. ***

BIODATA

NAMA	: ZULKIFLI
TEMPAT/TGL LAHIR	: Duri, 1 Juni 1968
ALAMAT	: Jalan Pertanian Kelurahan Duri Barat, Mandau
JENIS KELAMIN	: Laki-laki
AGAMA	: Islam
NO Telp/HP	: 0813 7831 9480
ISTRI	: Trilina Yati, SE
ANAK	: Dua Orang 1. Derry Kurniawan 2. Violanda Kenichi Cheva
AYAH	: Abdul Salam (Alm)
IBU	: Asmara Murni
RIWAYAT PENDIDIKAN	: 1. SDN 2 Senter Duri (1981) 2. SMPN 2 Duri (1984) 3. SMAN 2 Duri (1987)
RIWAYAT PEKERJAAN	: 1. PT Thiess Indonesia (2004-2006) 2. PT Sugico Graha (2003-2004) 3. PT Inti Karya Persada Nusantara (2000-2002) 4. Anggota DPRD Bengkalis (2014-2015)
RIWAYAT ORGANISASI	: 1. LAMR Kelurahan Duri Barat 2. Pemuda Pancasila Kecamatan Mandau 3. Pemuda Panca Marga Mandau 4. Ketua Forum Sosial Peduli Lingkungan



H ABI BAHRUN, SS, MSi



Awalnya Sempat Menolak

Tak pernah terpikirkan olehnya, kalau kelak ia duduk menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu seperti sekarang ini. Tapi jika Allah sudah berkehendak, tentu apapun bisa terjadi dengan izinnya. Begitulah jalan hidup seorang H. Abi Bahrhun, SS, MSi. Saat ini, ia diamanahkan oleh masyarakat untuk duduk di sebagai anggota DPRD Bengkulu periode 2014-2019.

Sedikit flashback ke belakang, Abi begitu ia akrab disapa, memulai karier di bidang pendidikan sebagai kepala cabang Pasca Sarjana Sumatera Utara tahun 1998, sambil menjalankan usaha milik pribadinya. Ia juga pernah bekerja di perusahaan di bawah naungan Chevron dengan jabatan terakhir manajer sekuriti.

"Kalau terlibat politik praktis, baru pada tahun 2006 bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Waktu itu, saya tidak pernah bercita-cita ingin menjadi seorang legislator, karena background saya adalah pekerja dan pengusaha," kata pria yang kini dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkulu.

Apalagi menurut suami Elvi Susanti ini, PKS ini merupakan Parpol yang unik. "Di PKS kita tidak boleh mengajukan diri untuk pencalonan. Misalnya, saya punya ambisi untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau anggota DPRD, PKS sendiri yang akan menunjuk kader-kader terbaiknya, tidak boleh kita mengajukan diri. Jadi diantara kader terbaik, mereka menunjuk saya, pimpinan partai datang ke rumah memerintahkan agar saya mencalonkan diri," ujarnya.

Putra H. Muhammad Ya'coeb ini sebenarnya sempat menolak ketika ditunjuk pimpinan PKS Kabupaten Bengkulu agar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2014 lalu. "Saya sempat menolak. Tetapi karena di PKS itu ada kaedah-kaedah yang tidak bisa dilanggar, seperti ketika ada perintah harus dijalankan. Mau tidak mau, kita harus taat. Alhamdulillah berkat pandangan dari pimpinan dan dukungan masyarakat Mandau serta izin Allah, saya duduk sebagai anggota DPRD Bengkulu saat ini," ujar Abi.

"Isteri juga sempat menolak, namun karena ia juga kader dan sangat memahami kaedah yang berlaku di PKS. Masih terkesan di hati saya pesan isteri, 'Mas, Adek infakkan Mas di jalan Allah'. Dia ikhlas waktu saya lebih banyak ke masyarakat, dibanding untuk dia dan keluarga," tambahnya.

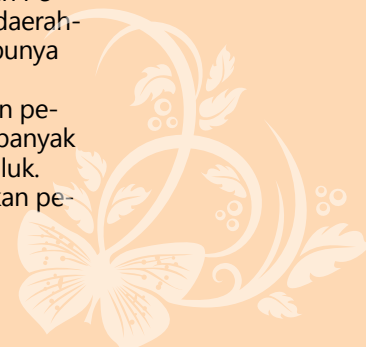


Perhatian Pemerintah

Lantas apa yang akan diperjuangkannya setelah duduk menjadi wakil rakyat, khususnya untuk daerah pemilihan Mandau?

Kalau dilihat secara kasat mata, menurut pria kelahiran Tanah Merah, 10 Februari 1979 ini, perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih sangat kurang di Mandau, meskipun kita pahami masih banyak daerah-daerah lain juga sangat membutuhkan perhatian. Namun, yang terpenting adalah pemerintah harus punya skala prioritas.

"Memang hari ini perhatian sudah ada. Harapan kita selaku Anggota DPRD Dapil Mandau, ke depan pemerintah dapat memprioritaskan kebutuhan di Mandau, begitu juga daerah lainnya. Jangan sampai, banyak anggaran yang dikeluarkan justru dianggap masyarakat mubazir. Mereka tidak butuh yang muluk-muluk. Untuk saat ini, jalan, lingkungan, air bersih, listrik, pendidikan dan kesehatan itu yang harus diprioritaskan pe-





merintah," tegas pria berbadan tinggi tegap ini.

Politisi PKS ini mengaku sedikit kesal dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pasalnya, masih banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya, yang tidak diakomodir. "Kenapa legislatif dan eksekutif beberapa tahun ini komunikasi tidak baik?. Masalahnya bukan soal kepentingan pribadi dewan yang tidak diakomodir, tapi kepentingan masyarakat. Kalau Sekda ke bawah selaku ASN mereka menjadi pejabat karena karier, kalau kita di sini (anggota DPRD) diamanahkan oleh rakyat. Hingga saat ini masih banyak yang diusulkan dewan untuk kepentingan masyarakat, belum dilaksanakan oleh eksekutif," sebut Ayah tiga anak ini.

Berbicara soal karakteristik masyarakat Mandau, secara umum ia melihat merupakan pekerja, ditambah dengan banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di sana. Sebut saja Chevron, membuka peluang pekerjaan yang besar bagi masyarakat. Harapan Abi, dengan banyaknya perusahaan yang beroperasi di Mandau, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan catatan perusahaan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra asli Kabupaten Bengkalis, khususnya Kecamatan Mandau.

"Saya melihat Mandau itu lengkap. Lengkap semuanya, baik itu dari sisi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Untuk mewujudkan agar perusahaan besar nasional maupun internasional yang ada di Mandau agar lebih mengakomodir anak daerah, dukungan Pemerintah Daerah tentu sangat diharapkan melalui kebijakan yang ada. Jangan terkesan membiarkan," harapnya.

Abi sangat mendukung Pemkab Bengkalis mendirikan SMA Perminyakan, yang merupakan cikal bakal Bengkalis untuk bisa mengelola sendiri sumberdaya alam yang ada, khususnya di sektor minyak dan gas. Apalagi rencana untuk mendirikan Politeknik Perminyakan benar-benar bisa terwujud.

"Inilah yang harus kita kelola, kalau perlu kita harus banyak menyalurkan beasiswa di bidang itu. Sekarang SMA perminyakan sudah ada, kami juga berharap ada sebuah Polteknik disana guna menunjang peningkatan SDM sesuai dengan kultur dan potensi yang ada," tutup.***



BIODATA

NAMA : H ABI BAHRUN, SS, MSi
TEMPAT/TGL LAHIR : Tanah Merah, 10 Februari 1979
ALAMAT : Jalan Aman Gg Pelita V No 25 Duri
JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
NO.TELP/HP : 081268656666
ISTRI : Hj Elvi Susanti
ANAK : 3 Orang
1. Muhammad Sulthan Alfarisy
2. Salwa Assyifa
3. Khansa Izzatun Nisa

AYAH : H Muhammad Ya'coeb
IBU : Hj Siti Nursyam

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SD Tanah Merah (1991)
2. MTs Pesantren Al-kautsar (1993)
3. MAN Pesantren Al- Kautsar (1997)
4. STBA Medan (S1)
5. FISIP Universitas Riau (S2)

RIWAYAT PEKERJAAN : ● Wiraswasta
● Kepala Cabang Pasca Sarjana Sumut (1998)
● Manager Scurity PT Chevron
● Anggota DPRD Bengkalis 2014-2019

RIWAYAT ORGANISASI : - Partai Keadilan Sejahtera (2006-sekarang)
- Pemuda Pancasila Bengkalis (2011-2014)
- Sekum KONI-Bengkalis (2013-2014)



LEONARDUS MARBUN



Prihatin Melihat Sulitnya Akses Masyarakat Pinggir

Di kalangan masyarakat Pinggir, pria ini lebih dikenal dengan sebutan Marbun Mantri. Hal itu juga tidak terlepas dari usahanya sehari-hari yang menjadi supplier tandan buah segar (TBS) bagi perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS). Siapa menyangka, dari usahanya sebagai mantri dan supplier TBS, mengantarkan dirinya menjadi anggota DPRD Bengkalis periode 2014–2019.

Pemilik nama lengkap Leonardus Marbun ini dilahirkan dari pasangan Posman Marbun dan Resmina Br Simbolon, menghabiskan pendidikan sejak SD hingga Sekolah perawat kesehatan di Sumatera Utara dan ahli Anesthesi di Cekini. Dengan bekal yang dimiliki di bidang kesehatan, ia mencoba peruntungan dengan membuka Balai Pengobatan.

Daerah pertama tempat ia mengadu nasib di Tanjung Balai Asahan sekitar tahun 1992. Seiring berlalunya waktu terutama setelah menikah, ia pindah ke Pinggir sekitar tahun 1997. Di Pinggir, Leonardus membuka Balai Pengobatan Kasih Ibu. Untuk menambah penghasilan, ia juga perlahan-lahan menjadi supplier TBS ke perusahaan pabrik kelapa sawit.

Leonardus menceritakan, tahun 1998 ketika krisis moneter terjadi, usahanya sempat goyang karena tingginya nilai tukar dolar. "Saya berusaha bertahan dengan kondisi yang ada. Ketika masa sulit ini, anak saya pertama lahir Chris Alfiany. Ia kami panggil Krismon, untuk mengenang masa-masa sulit yang kami alami," kata Leonardus.

Lalu, bagaimna ceritanya dirinya bisa menjadi anggota DPRD Bengkalis? Menurut Leonardus itu berawal dari usahanya yang sehari-hari sebagai mantri dan supplier. Aktivitas yang digeluti itu memaksa dirinya untuk keluar masuk desa. Dari situ, ia merasakan betapa masih sulitnya akses jalan di Kecamatan Pinggir. Sampai kapan masyarakat harus merasakan penderitaan itu.

"Dengan latar belakang ini, akhirnya saya mencoba untuk memperjuangkan masyarakat Pinggir melalui jalur politik. Menggunakan Partai Hanura, saya ikut bertarung pada Pemilu Legislatif 2014. Berkat dukungan keluarga dan masyarakat, saya akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD Bengkalis periode 2014 – 2019," tutur Leonardus.

Walau baru kali pertama menjadi anggota DPRD Bengkalis, tapi pemikirannya mengenai hubungan



antara legislatif dan eksekutif cukup cerdas. Baik legislatif maupun eksekutif, menurut dia harus sejalan. Tidak ada yang satu lebih hebat dari yang lain, karena baik eksekutif maupun legislatif sama-sama memiliki satu tujuan, mensejahterakan masyarakat menuju Kabupaten Bengkalis yang maju. Hal itu berdasarkan pengalaman saya sewaktu menjadi anggota BPD Desa Trenganu selama dua periode. Harus ada sinkronisasi antara kepala desa dan DPD.

"Kalau berbicara soal kepentingan, semua pasti punya kepentingan. Legislatif kepentingannya seperti ini, eksekutif kepentingannya lain pula. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kepentingan itu arahnya kemana. Kalau kepentingan untuk urusan pribadi, ya ketepikan dululah. Tapi kalau kepentingannya untuk rakyat, harus kita utamakan," ujarnya dengan logat khas Batak.

Kalau salah satu komponen, baik itu legislatif maupun eksekutif lebih mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan, maka yang akan menjadi korban adalah rakyat. Tidak mengherankan, dengan APBD Kabupaten Bengkalis yang besar, tapi masih banyak daerah-daerah yang belum merasakan kue pembangunan.

"Tak usah jauh-jauh lah, saya ini kan utusan dari daerah pemilihan Pinggir. Coba lihat itu, jalan utama yang menghubungkan desa-desa di Kecamatan Pinggir, masih banyak yang sulit dilalui. Jangankan kendaraan roda empat, roda dua saja susah," kata Leonardus.

Ada desa-desa di Kecamatan Pinggir, seperti Desa Tasik Serai, Tasik Serai Timur, Desa Serai Wangi, Desa Malibur dan Desa Beringin yang pada waktu-waktu tertentu seperti musim hujan, akses transportasi ke sana sulit, bahkan hampir putus (jalan musiman).

"Sebagian besar jalan tanah, kalau hujan lengket dan banyak lubang. Kasihan warga yang mau membawa hasil kebun, yang mau berurusan ke ibukota kecamatan, anak-anak sekolah juga susah kalau mau ke sekolah, harus jalan kaki" katanya.

Harus Sejalan

Ketika dirinya masih warga biasa, Leonardus mengaku heran juga dengan para anggota DPRD Bengkalis Daerah Pemilihan Pinggir. Apa saja yang mereka kerjakan, sampai-sampai pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pinggir terkesan lamban. Namun, setelah dirinya duduk sebagai anggota dewan, baru ia menyadari ternyata persoalannya tidak sesederhana yang dibayangkan.

Sebagai contoh, ketika ada usulan-usulan dalam bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan ke dirinya. Harapan masyarakat, aspirasi tersebut bisa diakomodir eksekutif. Faktanya, lain yang diusulkan lain pula yang direalisasikan. "Ini terjadi menurut saya ya itu tadi, antara legislatif dan eksekutif tidak sejalan karna tidak adanya sinkronisasi. Ada semacam gap yang membuat komunikasi antara legislatif dan eksekutif tidak nyambung sehingga program-program yang tertuang dalam APBD, bukan sepenuhnya berasal



dari aspirasi masyarakat.

"Ke depan, saya berharap perlu dibangun komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Harus ada persamaan persepsi, karena walau bagaimana pun, kita ini dipilih rakyat dan dipercaya oleh mereka sebagai penyambung lidah," katanya.

Masih terkait dengan persoalan infrastruktur, pria kelahiran Taput 27 Februari 1973 juga berharap ada sumbangsih dari perusahaan-perusahaan di Kecamatan Pinggir. Menurut dia, perusahaan wajib melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Terdapat 2 UU yang menegaskan tentang CSR yakni UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 74 dan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15, 17 dan 34. Dengan program CSR tersebut, dirinya berharap perusahaan di Kecamatan Pinggir bisa menyediakan jalan umum yang layak bagi masyarakat dan membantu secara material untuk peningkatan perekonomian masyarakat tempatan.

"Memang PT ADEI sudah juga memberikan akses jalan perusahaan ke masyarakat. Tapi sifatnya baru buka tutup, ya kalau bisa jangan lagi pakai buka tutup, tapi terbuka untuk umum. Anggap itu bagian dari CSR perusahaan," ujar Leonardus.

Di samping infrastruktur jalan, Leonardus juga menyinggung tentang persoalan jaringan listrik yang belum sampai ke desa-desa, khususnya yang jauh dari ibukota kecamatan. Menurut dia, mustahil PLN mau membangun jaringan ke desa-desa kalau akses jalan ke desa tersebut masih melalui jalan perusahaan. Sebagian besar di sekitar jalan perusahaan merupakan pepohonan yang berpotensi menyebabkan gangguan jaringan listrik.

"Menurut pendapat saya, kalau tetap memanfaatkan jalan perusahaan tanpa ada jalan penghubung antar desa, ya listrik tidak bisa masuk. Mana mau PLN membangun jaringan tapi banyak pohon-pohon HTI PT Arara Abadi yang kalau tumbang bisa menimpa jaringan," papar Leonardus.

Masih ada satu hal lagi yang ingin terus ia perjuangkan, yaitu memekarkan Kecamatan Pinggir agar pelayanan Administrasi yang terpadu dapat dirasakan masyarakat. Dengan luasnya Kecamatan Pinggir dan akses jalan yang masih banyak jalan tanah, akses ke ibukota Kecamatan menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat harus menempuh waktu berjam-jam agar bisa sampai ke ibukota kecamatan untuk berurusan dalam segala hal.

"Kalau kecamatan bisa dimekarkan, maka selain pembangunan bisa lebih cepat, pelayanan masyarakat juga bisa dioptimalkan. Nah, ini yang terus saya perjuangkan, tak perlulah menjadi kabupaten. Bukan tidak setuju, tapi saya menilai pemekaran kecamatan lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat," alasan Leonardus. ***



BIODATA

NAMA : LEONARDUS MARBUN
TEMPAT/TGL LAHIR : Taput , 27 Pebruari 1973
ALAMAT : Jalan Pulai RT 01 RW 02
Desa Tegganau

JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Protestan
NO.TELP/HP : 0812 76547848
ISTRI : HOTMAULI BR MANIK
ANAK : Tujuh Orang

1. Chris Alfiany Marbun
2. Liza Dameria Marbun
3. Chalvin Ciputra G Marbun
4. Yershie Apriling Marbun
5. Anasthsya Marbun
6. Shalmon Felix Marbun
7. Leo Dhafingki Marbun

AYAH : Posman Marbun
IBU : Resmina Br Simbolon

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SD Negeri 173730 Simbolon Kecamatan Palipi
2. SMP Swasta Budi Mulia Panguruan - Sumut
3. SPK Pematang Siantar - Sumut

RIWAYAT PEKERJAAN :

- Tenaga Pengajar SMP Harapan Teluk Pulai (Jurusan Biologi)
- Tenaga Medis PT Palmec - Medan
- Tenaga Perawatan/ Anastesi permata Bunda Medan
- Pemilik Balai Pengobatan Kasih Ibu
- Anggota DPD Desa Tegganau (dua periode)
- Anggota DPRD Bengkalis 2014-2019
- Sekretaris PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Pinggir
- Sekretaris Lembaga Keuangan Masyarakat Tempatan Desa Tegganau
- Pengurus IKBRT Kecamatan Pinggir

RIWAYAT ORGANISASI :

SYAHRIAL, ST



Jangan Sebut Rupat Pulau Harapan

Suaranya tiba-tiba meninggi ketika disinggung soal Pulau Rupert, tempat dimana ia dilahirkan. Pasalnya, selama ini pulau di belahan utara Kabupaten Bengkalis itu selalu disebut-sebut Pulau Harapan atau Permata di Tepian Selat Melaka dengan segala potensi yang terkandung di Pulau yang memang membujur di alur Selat Melaka itu.

Nada kecewa terlontar dari mulutnya dengan suara lantang tentang proses pembangunan yang dilakukan di Rupert selama ini, masih jauh dari harapan. Begitulah sosok politisi yang enerjik, kritis dan tegas dalam menyikapi berbagai persoalan pembangunan daerah yang masih carut marut di kabupaten nomor dua terkaya di republik ini.

Itulah sekelumit gambaran tentang pria berusia 35 tahun yang menyandang gelar sarjana teknik itu. Lahir di Kelurahan Batu Panjang Rupert, pada Pemilu Legislatif 2014 lalu terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai Golkar. Tentu saja, ia melaju ke kantor parlemen di Jalan Antara Bengkalis itu dari Daerah Pemilihan Pulau Rupert (Kecamatan Rupert dan Rupert Utara).

Baru pertama kali duduk menjadi wakil rakyat, ia langsung dipercaya menjabat Ketua Komisi II yang membidangi pembangunan daerah. Di komisi itulah, masalah pembangunan khususnya infrastruktur dibahas bersama dengan sejumlah SKPD yang menjadi mitra kerja komisinya. Banyak orang menyebut Komisi II adalah salah satu perangkat kerja di DPRD yang cukup berpengaruh dan basah.

Tapi bagi Syahrrial itu bukan tujuan utamanya. Karena ia maju menjadi wakil rakyat berbekal pengalaman berorganisasi ketika masih menjadi mahasiswa, kemudian bergabung dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di bawah Partai Golkar. Selama mengurus underbouw partai beringin itulah, ia ditempa dengan pengalaman berorganisasi serta jiwa kepemimpinan yang sudah tumbuh sejak muda.

Kecewa

Berbicara mengenai proses pembangunan daerah, ia terus terang mengaku sangat kecewa dengan apa yang dilaksanakan sejak otonomi daerah bergulir. APBD yang besar ternyata tidak menjadi jaminan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan gaya kepemimpinan yang cenderung berorientasi kepada proyek semata dengan mengabaikan kualitas, adalah salah satu titik permasalahan menuju keberhasilan

dalam membangun daerah.

“Coba lihat, di hampir semua kecamatan persoalan infrastruktur dasar tidak kunjung tuntas. APBD yang melambung sejak otonomi daerah tidak sebanding dengan keberhasilan pembangunan daerah. Karena oknum pejabat di Bengkalis ini menjadikan nilai APBD yang besar itu hanya untuk meraup keuntungan lewat proyek-proyek yang mereka gulirkan setiap tahun, tapi outputnya kurang menyentuh masyarakat,” tegas Syahrial.

Bahkan, ayah dua anak itu mempertanyakan keberhasilan pekerjaan proyek multiyears di seluruh kecamatan yang dilaksanakan sejak tahun 2012 karena sampai sekarang progresnya masih jauh dari yang diinginkan. Padahal anggaran yang dicadangkan untuk membangun enam jalan poros dan lingkaran tersebut mencapai Rp2,4 triliun, semuanya bersumber dari APBD Bengkalis.

Mantan Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Bengkalis (IPMKB) di Pekanbaru ini merasa miris melihat hasil pembangunan yang sudah dan sedang dijalankan eksekutif. Di matanya, terlalu banyak retorika dan basa-basi dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengabaikan azas manfaat dari pekerjaan yang digulirkan.

Ketika disinggung soal pembangunan di Pulau Rupat, Syahrial dengan tegas menyampaikan kekecewaannya. Karena proyek jalan lingkaran multiyears dari Batu Panjang ke Pangkalan Nyirih, tidak mendapat progres di atas 50 persen dan kemungkinan tidak tuntas tahun ini.

“Membangun Rupat tidak hanya cukup dengan jalan lingkaran semata. Ada faktor manusia yang tinggal di dalamnya yang juga harus diberdayakan serta potensi alam yang terkandung bisa memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat Rupat, itu yang belum dikelola secara maksimal. Jadi, jangan hanya menyebut Rupat dengan slogan Pulau Harapan untuk meninabobokkan orang Rupat, kalau tidak dibenahi secara utuh,” papar Syahrial.

Sejumlah Persoalan

Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Sutan Syarif Kasim (Suska) Pekanbaru itu menyebut persoalan yang masih menghantui Pulau Rupat saat ini, antara lain, abrasi yang sudah menghantam lahan dan perumahan masyarakat bertahun-tahun. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang belum maksimal, sarana dan prasarana kesehatan yang masih sulit dijangkau masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota kecamatan serta masih banyak sekolah yang tidak layak pakai dan keterbatasan tenaga pengajar.

Pulau Rupat merupakan kawasan terluar atau garda terdepan di republik ini karena berhadapan langsung dengan negara jiran Malaysia. Faktor keamanan juga seharusnya menjadi perhatian. Di samping itu, potensi wisata bahari yang terkandung di dalamnya seperti hamparan pantai berpasir putih sepanjang belasan kilometer di Tanjung Lapin, Desa Tanjung Punak dan Pantai Teluk Rhu di Kecamatan Rupat Utara maupun pantai Alohong di Teluk Ketapang Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupat belum dimanfaatkan dengan baik.

“Saya melihat masterplan dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Rupat ini kabur. Bagaimana investasi di sektor pariwisata mau masuk ke Rupat, kalau persoalan abrasi, air bersih, listrik belum kunjung dapat diatasi pemerintah daerah. Untuk menjadikan Rupat sebagai destinasi wisata bahari, tentu juga harus ditunjang dengan pelabuhan yang memadai, jadi semua itu bukan sebatas lips service atau retorika belaka seperti yang kita dengar selama ini,” kritik Syahrial.

Masih soal potensi Rupat, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bengkalis ini menyebutkan, selain pariwisata bahari, perkebunan dan perikanan, ada potensi pasir laut yang memiliki kualitas bagus. Sayangnya, pasir laut itu tidak boleh ditambang oleh masyarakat Rupat sendiri. Ironisnya, perusahaan besar justru dibolehkan mengeruk pasir Rupat oleh pemerintah.

“Itu juga salah satu masalah yang cukup mendasar, karena ada ratusan warga Rupat hidup dari menambang pasir laut secara tradisional dan sudah turun temurun. Sekarang mereka dihadapkan dengan sanksi



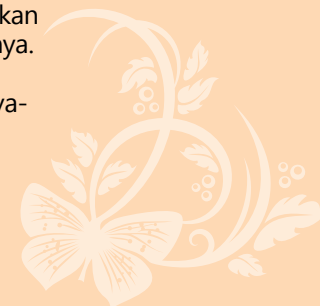
hukum bila melakukan penambangan, karena dituding ilegal. Ini namanya ketidakadilan ekonomi, kekayaan alam Rupert bisa dikeruk orang lain, tapi orang Rupert tidak boleh. Harus ada kebijakan Pemkab Bengkalis soal pasir laut Rupert ini, sehingga masyarakat tempatan bisa menambang di kampung halamannya sendiri,” ujar pria yang bergabung di Partai Golkar sejak tahun 2008.

Terkait hubungan kelembagaan ataupun kinerja DPRD Bengkalis periode sekarang, terutama di Komisi II, ia menyebut cukup dinamis dan harmonis. Ada perubahan yang signifikan dari anggota dewan sekarang, spirit baru dalam bekerja serta rasa keingintahuan terhadap berbagai permasalahan yang mencuat ke permukaan patut diberi apresiasi.

Komisi II termasuk yang cukup proaktif dan responsif, begitu ada persoalan yang berhubungan dengan masyarakat. Ada regulasi dalam memahami masalah secara komprehensif dengan melakukan pemanggilan langsung terhadap SKPD yang dinilai patut ditanyai melalui hearing (dengar pendapat). Dan peran itulah yang sekarang sedang dimainkan Syahril selaku nahkoda Komisi II, demi terwujudnya harmonisasi hubungan antar lembaga sekaligus mengetahui persoalan urgen dalam masyarakat.

“Wakil rakyat tidak boleh kaku, jangan terlalu terjebak dengan retorika. Pada prinsipnya dewan adalah perpanjangan tangan rakyat, di satu sisi masih banyak persoalan mendasar di tengah masyarakat yang belum diketahui serta diselesaikan secara kelembagaan,” tukasnya.

Dalam sudut pandangnya, eksistensi sebagai politisi atau segudang gelar akademik tidak akan memberikan arti apa-apa, ketika seorang wakil rakyat tidak mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada dirinya. Peran selaku anggota dewan tentu saja harus memberi manfaat kepada masyarakat, tidak hanya sekedar menampung aspirasi semata, tetapi harus turun langsung melihat dan mengetahui apa yang terjadi di masyarakat, karena berpolitik sama dengan berjuang.***





BIODATA

NAMA : SYAHRIAL, ST
 TEMPAT/TGL LAHIR : Batu Panjang , 1 Juli 1980
 ALAMAT : Jalan Laban Gg Pulai
 RT/RT 002/ 008 Kelurahan
 Labuh Baru Barat, Kecamatan
 Payung Sekaki, Pekanbaru
 JENIS KELAMIN : Laki-laki
 AGAMA : Islam
 NO.TELP/HP : 0812 6850 7444
 ISTRI : Julia Roslin, SKep
 ANAK : Dua orang
 1. Muhammad Attila Putera Syahrial
 2. Muhammad Anggara Putera Syahrial
 AYAH : H Basri T
 IBU : Hj Rusni HK

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SDN 1 Batu Panjang Rupert (1993)

2. SMPN 1 Batu Panjang Rupert (996)
 3. SMKN 2 Dumai (1999)
 4. S1 UIN Suska Pekanbaru (2004)

RIWAYAT PEKERJAAN : Entrepreneur
 Anggota DPRD Bengkalis 2014-2019

RIWAYAT ORGANISASI :

1. Ketua IPMKB Kab Bengkalis 2002-201
2. Ketua KNPI Kecamatan Rupert
3. Ketua MKGR 2008-2014
4. Waka Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Bengkalis 2010-2012
5. Sekretaris DPD Golkar Bengkalis 2012-Sekarang

